



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2025

KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2025

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA



Kata Pengantar

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan selama Tahun 2025 dimana dapat menjadi gambaran tentang Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, dan merupakan satu di antara upaya sebagai penyempurnaan dokumen perencanaan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan agar pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dapat tercapai maksimal dan berdampak bagi masyarakat.

Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara selama tahun 2025 secara umum sudah berjalan baik. Secara umum pencapaian tujuan dan sasaran Sangat Memuaskan. Pencapaian ini tentunya harus dipertahankan dan ditingkatkan di masa akan datang dengan upaya perbaikan melalui strategi dan inovasi yang didasari komitmen dalam meningkatkan kinerja yang menjadi tanggung jawab bersama seluruh aparatur sipil negara.

Kami mengharapkan saran dan kritik demi sempurnanya penyusunan laporan ini, yang nantinya akan kami pergunakan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan laporan di tahun mendatang.

Penajam, 31 Maret 2026

Bupati Penajam Paser Utara,



H. Mudyat Noor, S.Hut



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2025 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan atas penggunaan anggaran tahun 2025.

Pencapaian Tujuan/ Sasaran, Indikator dan target kinerja yang sebelumnya ditetapkan dengan Perjanjian Kinerja masih mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Penajam Paser Utara 2024-2026. Namun di dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2025 ini selain menyajikan pencapaian target kinerja terhadap RPD 2024 – 2026, juga menyajikan pencapaian target kinerja terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025 – 2029.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disajikan pengukuran kinerja beserta dengan analisis terhadap keberhasilan, kegagalan, kendala, upaya atau strategi ke depan yang dapat dilakukan, serta analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai target yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan pengukuran kinerja terhadap realisasi capaian kinerja masing-masing program dan kegiatan yang ditetapkan Tahun 2025, Sasaran tercapai Sangat Memuaskan dengan Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 121,97 %. Pencapaian Kinerja ini didorong oleh adanya komitmen yang kuat dari pimpinan, seluruh aparatur negara, serta masyarakat yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara. Pencapaian kinerja ini tidak terlepas dari kendala atau hambatan yang dihadapi, namun dapat diminimalisir dengan berbagai upaya dan strategi. Adapun kendala atau hambatan yang mempengaruhi pencapaian akan dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan dengan cara peningkatan kinerja melalui pengembangan inovasi, komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, serta masyarakat.



Daftar Isi

Kata Pengantar	i	Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii	Daftar Tabel	iv
Daftar Grafik	vii		
		BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Daerah	1		
B. Kedudukan dan Fungsi Organisasi	4		
C. Sumber Daya Aparatur	5		
D. Permasalahan dan Isu Strategis	7		
E. Sistematika Penyajian	14		
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16		
		A. Rencana Strategis	17
		B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	28
		BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	31
A. Hasil dan Tindak Lanjut Evaluasi AKIP 2025	32		
B. Capaian Kinerja Organisasi	34		
C. Realisasi Anggaran	143		
D. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran	144		
BAB IV PENUTUP	151		
Lampiran I	Rencana Kinerja Tahunan 2025		
Lampiran II	Perjanjian Kinerja Tahun 2025		
Lampiran III	Pengukuran Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target RPD 2024 – 2026		
Lampiran III	Pengukuran Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target RPJMD 2025 - 2029		
Lampiran IV	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025		

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Kecamatan, Kelurahan, dan Desa di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025	2
Tabel 1.2	Penyebaran Penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025	3
Tabel 1.3	Permasalahan Daerah	7
Tabel 1.4	Isu Strategis Daerah	10
Tabel 2.1	Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan	21
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	28
Tabel 2.3	Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target pada RPJMD 2025-2029	30
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	32
Tabel 3.2	Rekomendasi dan Tindak Lanjut Atas Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025	33
Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun 2025	35
Tabel 3.4	Persentase Kemiskinan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 - 2025	38
Tabel 3.5	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis Peningkatan Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial Kepada Masyarakat Miskin dan Rentan	45
Tabel 3.6	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat.....	48
Tabel 3.7	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis Perluasan Kesempatan Kerja serta Peningkatan Kapasitas dan Perlindungan Tenaga Kerja	53
Tabel 3.8	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis Peningkatan Kualitas Pendidikan	61
Tabel 3.9	Sepuluh Besar Penyakit di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025	63
Tabel 3.10	Faktor yang Mempengaruhi Usia Harapan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025	64
Tabel 3.11	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis Peningkatan Kualitas Kesehatan	66
Tabel 3.12	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis Peningkatan Kualitas Kehidupan Keluarga Sejahtera dan Responsif Gender	70

Tabel 3.13	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis Peningkatan Kualitas Pembangunan Kebudayaan dan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Kepemudaan yang Berwawasan Kebangsaan	73
Tabel 3.14	Hasil Evaluasi AKIP Seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2023 dan 2024	78
Tabel 3.15	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis Penguatan Birokrasi yang Efektif dan Efisien	81
Tabel 3.16	Indeks Kepuasan Masyarakat Per Unsur Pelayanan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 – 2025	83
Tabel 3.17	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis Peningkatan Pelayanan Prima Kepada Publik	85
Tabel 3.18	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 - 2025	87
Tabel 3.19	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis Peningkatan Kontribusi PDRB Sektor Non Pertambangan dan Penggalian	91
Tabel 3.20	Nilai Investasi Tahun 2021 - 2025	93
Tabel 3.21	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis Optimalisasi Capaian Investasi/ Penanaman Modal Investor di Daerah	95
Tabel 3.22	Kategori IKA, IKU, IKL	98
Tabel 3.23	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	102
Tabel 3.24	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis Peningkatan Ketahanan Kebencanaan	106
Tabel 3.25	Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Penajam Paser Utara (Km) Tahun 2021 - 2025	108
Tabel 3.26	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis Peningkatan Pelayanan Infrastruktur	110
Tabel 3.27	Perolehan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2025	111
Tabel 3.28	Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD Tahun 2025 – 2029	112
Tabel 3.29	Niai AKIP Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 202 – 2025	134
Tabel 3.30	Kategori Indeks Integritas	137

Tabel 3.31	Komposisi Belanja Tahun Anggaran 2025	144
Tabel 3.32	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran Sasaran Strategis Kabupaten Penajam Paser Utara 2025	145



Daftar Grafik

Grafik 1.1	Penduduk Penajam Paser Utara Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025	3
Grafik 1.2	Jumlah Penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara Menurut Agama yang Dianut, Tahun 2025	3
Grafik 1.3	PNS dan PPPK Berdasarkan Jabatan Tahun 2025	6
Grafik 1.4	PNS Berdasarkan Golongan Tahun 2025	6
Grafik 1.5	PNS Berdasarkan Golongan Tahun 2025	6
Grafik 1.6	PNS dan PPPK Berdasarkan Pendidikan Tahun 2025	7
Grafik 3.1	Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2025 Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2025	35
Grafik 3.2	Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2025 pada RPJMD Tahun 2025 - 2029	37
Grafik 3.3	Persentase Kemiskinan Penajam Paser Utara Tahun 2021 - 2025	38
Grafik 3.4	Persentase Kemiskinan Kabupaten/ Kota Se Kalimantan Timur, Prov. Kalimantan Timur, Nasional Tahun 2025	39
Grafik 3.5	Rasio Gini Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 - 2025	40
Grafik 3.6	Rasio Gini Kabupaten/ Kota Se Kalimantan Timur, Prov. Kalimantan Timur Tahun 2025	41
Grafik 3.7	Status Desa Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 - 2025	46
Grafik 3.8	Tingkat Pengangguran Terbuka Penajam Paser Utara Tahun 2021 - 2025	49
Grafik 3.9	Tingkat Kesempatan Kerja Penajam Paser Utara Tahun 2022 - 2025	50
Grafik 3.10	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/ Kota Se Kalimantan Timur, Prov. Kalimantan Timur Tahun 2025	50
Grafik 3.11	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 - 2025	54
Grafik 3.12	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/ Kota se Kalimantan Timur, Prov. Kalimantan Timur Tahun 2025.....	55
Grafik 3.13	Harapan Lama Sekolah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 - 2025	57



Grafik 3.14	Harapan Lama Sekolah Kabupaten/ Kota se Kalimantan Timur, Prov. Kalimantan Timur, Nasional Tahun 2025.....	57
Grafik 3.15	Rata-rata Lama Sekolah Penajam Paser Utara Tahun 2021 - 2025	58
Grafik 3.16	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/ Kota se Kalimantan Timur, Prov. Kalimantan Timur, Nasional Tahun 2025	59
Grafik 3.17	Angka Harapan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 - 2025.....	62
Grafik 3.18	Angka Harapan Hidup Kabupaten/ Kota se Kalimantan Timur, Prov. Kalimantan Timur, Nasional Tahun 2025	63
Grafik 3.19	Prevalensi Stunting Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 - 2025	64
Grafik 3.20	Indeks Pembangunan Gender Penajam Paser Utara Tahun 2021 - 2024	68
Grafik 3.21	Indeks Pembangunan Gender Penajam Kabupaten/ Kota se Kalimantan Timur, Prov. Kalimantan Timur, Nasional Tahun 2024 ...	68
Grafik 3.22	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 - 2025	74
Grafik 3.23	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten/ Kota se Kalimantan Timur, Prov. Kalimantan Timur Tahun 2025	75
Grafik 3.24	Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 - 2025	79
Grafik 3.25	Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 - 2025	80
Grafik 3.26	Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 - 2025	84
Grafik 3.27	Laju Pertumbuhan Ekonomi Penajam Paser Utara Tahun 2021 - 2025 .	86
Grafik 3.28	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota se Kalimantan Timur, Prov. Kalimantan Timur, Nasional Tahun 2025	88
Grafik 3.29	LPE Non Pertambangan dan Penggalian Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 - 2025	89
Grafik 3.30	Indeks Kualitas Air, Udara, dan Tutupan Lahan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 - 2025	98
Grafik 3.31	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 - 2025	99
Grafik 3.32	Indeks Risiko Bencana Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 - 2025	103



Grafik 3.33	Indeks Risiko Bencana Kabupaten/ Kota se Kalimantan Timur, Prov. Kalimantan Timur Tahun 2025	104
Grafik 3.34	Indeks Kapasitas Daerah Kabupaten/ Kota se Kalimantan Timur Tahun 2025	105
Grafik 3.35	Rapor Pendidikan Kabupaten/ Kota se Kalimantan Timur, Prov. Kalimantan Timur Tahun 2024	115
Grafik 3.36	Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 – 2024	118
Grafik 3.37	Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten/ Kota se Kalimantan Timur, Prov. Kalimantan Timur Tahun 2024	118
Grafik 3.38	Kontribusi Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025	124
Grafik 3.39	Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 – 2025	127
Grafik 3.40	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 – 2024	135
Grafik 3.41	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/ Kota se Kalimantan Timur, Prov. Kalimantan Timur Tahun 2024	136
Grafik 3.42	Indeks Integritas Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 – 2025	137
Grafik 3.43	Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 – 2025	140
Grafik 3.44	Indeks Pelayanan Publik Kabupaten/ Kota as Kalimantan Timur, Prov. Kalimantan Timur Tahun 2025	140





Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur.

Kabupaten Penajam Paser Utara secara geografis terletak antara 00°48'29"-01°36'37" Lintang Selatan dan 116°19'30"- 116°56'35" Bujur Timur. Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki luas wilayah 3.333,06 Km² meliputi wilayah daratan seluas 3.060,82 Km² dan wilayah lautan seluas 272,24 Km². Sebagian wilayah berganti menjadi Kawasan

Strategis Nasional Ibu Kota Negara, sehingga luas wilayah yang semula 3.333,06 Km² menjadi 231.158,59 Km².

Secara administratif pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara terbagi atas 4 kecamatan, 24 kelurahan dan 30 desa yang terdiri dari :

Tabel 1.1 Kecamatan, Kelurahan, dan Desa di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025

Kecamatan Penajam	Kecamatan Waru	Kecamatan Babulu	Kecamatan Sepaku
Kelurahan Tanjung Tengah	Kelurahan Waru	Desa Gunung Makmur	Kelurahan Maridan
Kelurahan Saloloang	Desa Api-api	Desa Gunung Intan	Kelurahan Mentawir
Kelurahan Lawe-lawe	Desa Sesulu	Desa Sumber Sari	Kelurahan Pemaluan
Kelurahan Pejala	Desa Bangun Mulia	Desa Sri Raharja	Kelurahan Sepaku
Kelurahan Petung		Desa Rawa Mulia	Desa Telemow
Kelurahan Kampung Baru		Desa Sebakung Jaya	Desa Binuang
Kelurahan Sesumpu		Desa Babulu Laut	Desa Bumi Harapan
Kelurahan Sungai Parit		Desa Babulu Darat	Desa Wono Sari
Kelurahan Nipah-nipah		Desa Labangka	Desa Semoi Dua
Kelurahan Nenang		Desa Rintik	Desa Argo Mulyo
Kelurahan Gunung Seteleng		Desa Gunung Mulia	Desa Suko Mulyo
Kelurahan Penajam		Desa Labangka Barat	Desa Tengin Baru
Kelurahan Buluminung			Desa Suka Raja
Kelurahan Sotek			Desa Bukit Raya
Kelurahan Sepan			Desa Karang Jinawi
Kelurahan Riko			
Kelurahan Pantai Lango			
Kelurahan Gersik			
Kelurahan Jenebora			
Desa Girimukti			
Desa Bukit Subur			
Desa Sido Rejo			
Desa Giri Purwa			
19 Kelurahan, 4 Desa	1 Kelurahan, 3 Desa	12 Desa	4 Kelurahan, 11 Desa

Jumlah penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara pada Tahun 2025 berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, berjumlah 205.456 jiwa. Penyebaran penduduk masih belum merata di setiap kecamatan. Dengan melihat luas wilayah kecamatan

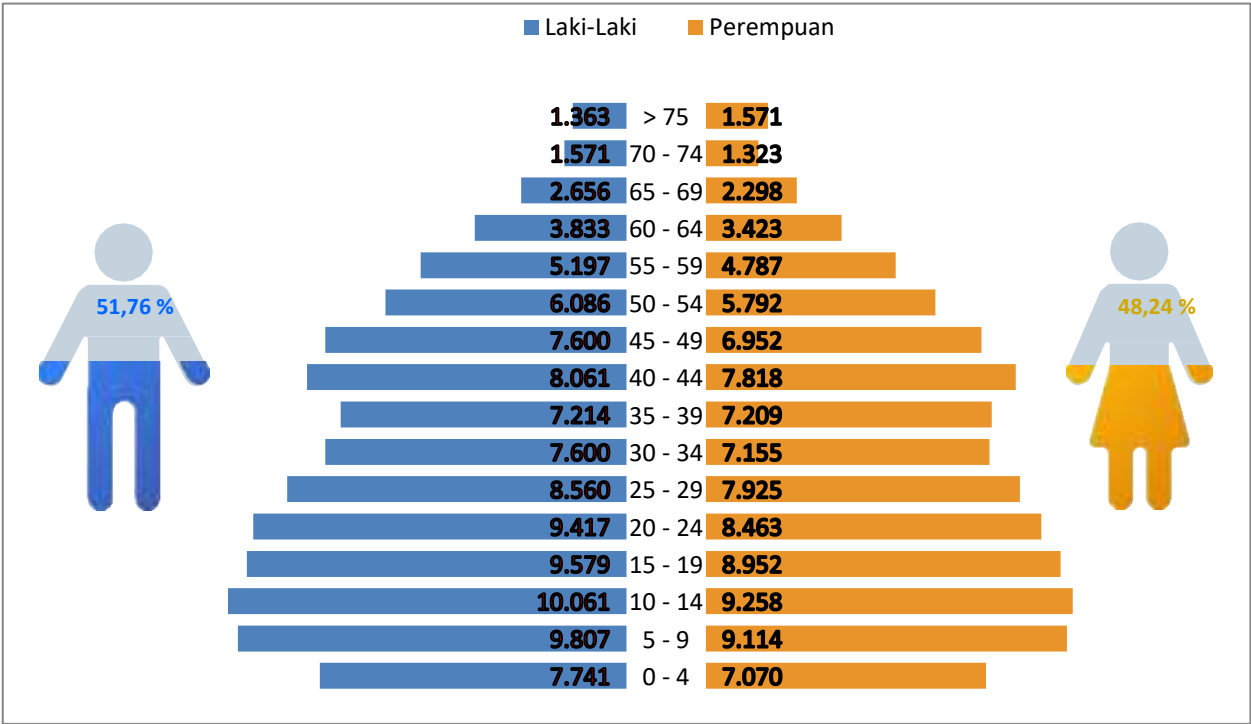


dan jumlah penduduk, maka dapat dilihat kepadatan penduduk per km², dapat dilihat pada tabel berikut :

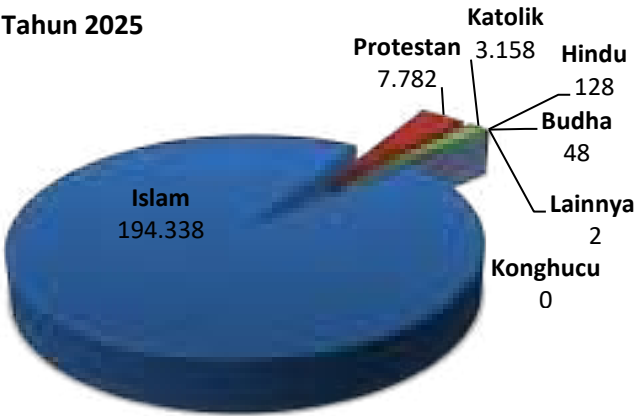
Tabel 1.2 Penyebaran Penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025

Kecamatan	Luas (Km ²)	Penduduk	Kepadatan (per Km ²)
Penajam	1.110,60	100.053	90,09
Waru	555,83	21.736	39,11
Babulu	398,54	41.255	103,52
Sepaku	246,62	42.412	171,97
Total	2.311,59	205.456	88,88

Grafik 1.1 Penduduk Penajam Paser Utara Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025



Grafik 1.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara Menurut Agama yang Dianut, Tahun 2025



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mempunyai kewenangan mencakup semua kewenangan pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi Negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam, serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional.



Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terdapat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, yaitu:

1. Seketariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Inspektorat
4. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
5. Dinas Kesehatan
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
8. Satuan Polisi Pamong Praja
9. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
10. Dinas Sosial
11. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
12. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
13. Dinas Ketahanan Pangan
14. Dinas Lingkungan Hidup
15. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
17. Dinas Perhubungan
18. Dinas Komunikasi dan Informasi
19. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
20. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
21. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
22. Dinas Perpustakaan dan Arsip
23. Dinas Perikanan
24. Dinas Pertanian
25. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
26. Badan Keuangan dan Aset Daerah
27. Badan Pendapatan Daerah
28. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
29. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
30. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
31. Rumah Sakit Umum Daerah
32. Kecamatan Penajam
33. Kecamatan Waru
34. Kecamatan Babulu
35. Kecamatan Sepaku

Sumber Daya Aparatur

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat maka perlu ditunjang oleh sumber daya aparatur yang memadai. Satu di antara tiga kebijakan pemerintah provinsi dan juga kebijakan utama yang akan diterapkan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, hal ini sangat penting dalam rangka meningkatkan kompetensi dan produktivitas masyarakat yang sebelum berlangsungnya otonomi daerah, masih ketinggalan dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan investasi yang tak ternilai harganya dan sangat berperan dalam kelangsungan

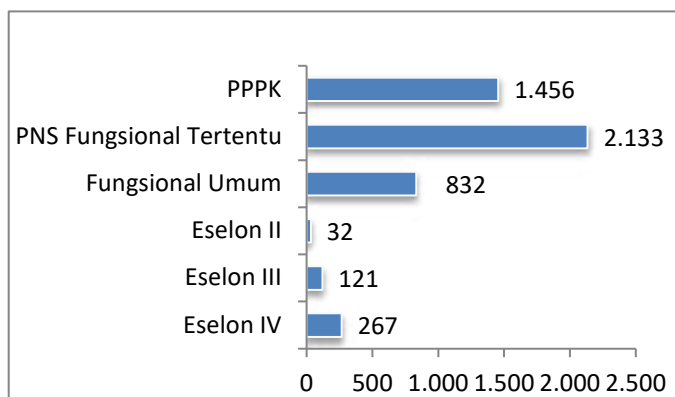


kemajuan Kabupaten Penajam Paser Utara khususnya dan Kalimantan Timur pada umumnya di masa yang akan datang.

Sumber daya aparatur Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara pada Tahun 2025 berjumlah 6.539 orang, yang terdiri 3.385 Pegawai Negeri Sipil, 1.456 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan 1.698 PPPK Paruh Waktu dengan gambaran komposisi aparatur menurut jabatan dan golongan adalah sebagai berikut :

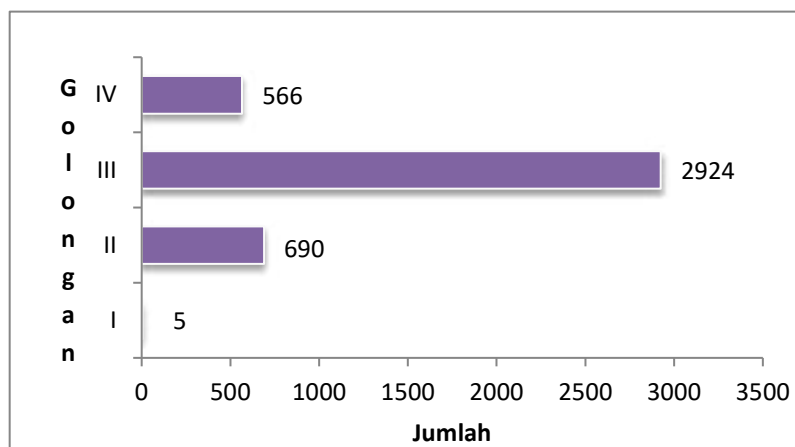
a. Berdasarkan Jabatan

Grafik 1.3 PNS dan PPPK Berdasarkan Jabatan Tahun 2025

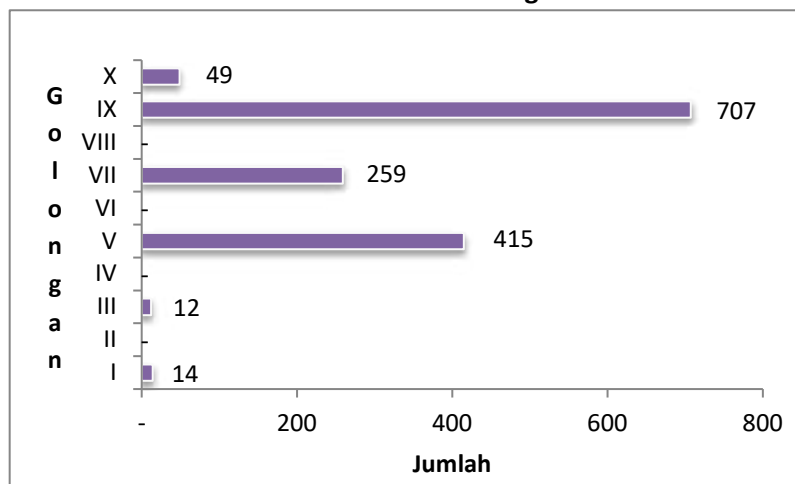


b. Berdasarkan Golongan

Grafik 1.4 PNS Berdasarkan Golongan Tahun 2025

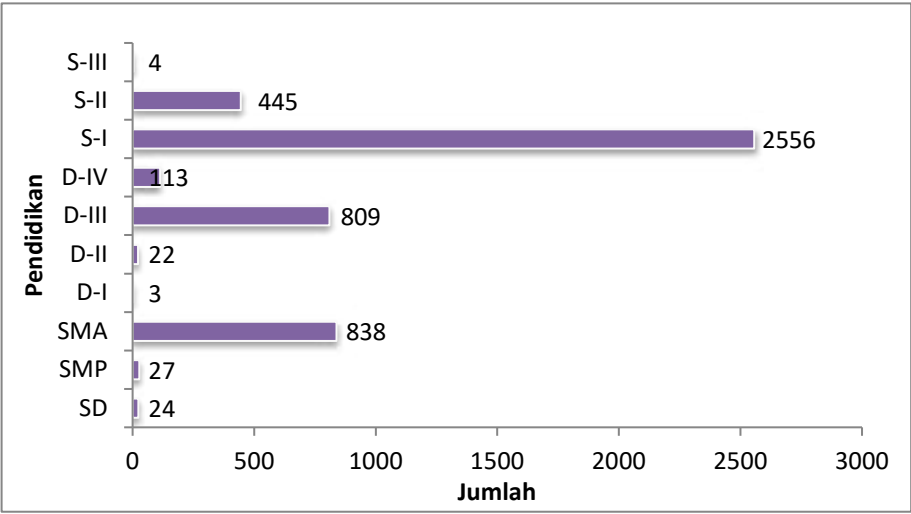


Grafik 1.5 PPPK Berdasarkan Golongan Tahun 2025



c. Berdasarkan Pendidikan

Grafik 1.6 PNS dan PPPK Berdasarkan Pendidikan Tahun 2025



D Permasalahan dan Isu Strategis

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan pembangunan daerah dihasilkan dari evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah periode tahun sebelumnya. Selain itu, mandatori pembangunan dari nasional maupun lingkungan global menjadi tantangan dan peluang yang perlu dikelola.

Tabel 1.3 Permasalahan Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1. Belum optimalnya implementasi transformasi ekonomi berkelanjutan	Masih rendahnya kesejahteraan sosial	Investasi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan ekonomi belum optimal
		Pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan perlu ditingkatkan
		Pasar tenaga kerja dan kualitas sumber daya manusia
		Kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri belum optimal
		Pengembangan IKM, UMKM, dan Koperasi belum optimal
		Belum optimalnya peningkatan nilai tambah sektor ekonomi potensial (pertanian, perikanan, pariwisata)
		ekosistem ekonomi dan talenta digital yang maish rendah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum optimalnya penanganan akses rumah tidak layak huni
		Implementasi insentif/disinsentif investasi belum optimal
	Belum optimalnya keberdayaan sosial	Belum optimalnya perlindungan sosial yang terintegrasi dengan pemberdayaan masyarakat
		Kapasitas tenaga kerja sesuai kebutuhan belum memadai
	Belum optimalnya infrastruktur perhubungan pendukung perekonomian	Belum optimalnya sistem manajemen pelayanan perhubungan
2. Belum optimalnya kualitas SDM	Belum optimalnya akses dan kualitas infrastruktur konektivitas wilayah	Masih rendahnya kualitas infrastruktur jalur darat terbangun
	Belum meratanya akses dan kualitas terhadap sarana dan prasarana pendidikan	Ketersediaan sarana dan prasarana sekolah yang memadai belum merata
		Belum optimalnya kompetensi dan kualifikasi guru
	Belum optimalnya tingkat partisipasi siswa	Masih tingginya angka putus sekolah
		Belum optimalnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan
	Belum optimalnya peningkatan keluarga yang berkualitas	Belum optimalnya penguatan pendidikan karakter pada anak
3. Belum meratanya pelayanan kesehatan yang berkualitas	Belum optimalnya akses dan kualitas kesehatan	Belum optimalnya peran keluarga dalam membentuk karakter anak
		Akses layanan kesehatan yang berkualitas masih belum merata
		Pemenuhan Universal Health Coverage (UHC) masih perlu ditingkatkan baik secara data maupun kondisi di lapangan
		Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) perlu ditekan ke angka yang paling minimal
		Penanganan prevalensi stunting perlu ditingkatkan
		Belum optimalnya gerakan PHBS
4. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi	Kualitas tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang belum optimal	Jumlah tenaga medis dan non medis masih belum memenuhi standar
		Belum optimalnya akses terhadap pelayanan publik
		Ekosistem inovasi daerah yang masih rendah
		Belum optimalnya penerapan sistem akuntabilitas dan integritas
		Belum optimalnya sistem kerja dinamis dan kolaborasi lintas sektor



Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Kualitas manajemen ASN dalam mendukung kinerja belum optimal
		Kualitas tata kelola desa yang masih perlu ditingkatkan
5. Belum optimalnya implementasi ketahanan ekologi dan resiliensi perubahan iklim	Belum optimalnya perlindungan, pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam dengan optimal	Perlindungan dan pengelolaan sumber daya air belum optimal
		Belum optimalnya pengelolaan sampah dan limbah
		Pengendalian alih fungsi lahan yang belum optimal
		Belum optimalnya rehabilitasi lahan pasca tambang
		Implementasi aksi penurunan emisi GRK belum optimal
6. Penurunan tingkat risiko bencana belum optimal	Belum optimalnya penyelenggaraan penganggulangan bencana dan keselamatan	Belum meratanya penyebaran informasi dan peningkatan kapasitas masyarakat terkait kebencanaan
		Belum memadainya ketersediaan infrastruktur penanganan banjir dan kebakaran
		Belum meratanya cakupan pelayanan penganggulangan bencana dan kebakaran
		Penguatan regulasi dan tata kelola kelembagaan penanganan bencana yang belum optimal
7. Belum optimalnya perlindungan sosial yang adaptif	Belum optimalnya upaya penanggulangan risiko kelompok rentan	Masih tingginya pernikahan dini/anak
		Masih tingginya angka PPKS khususnya ODGJ, orang terlantar, lansia dan anak yang bermasalah dengan hukum, pengemis
		Belum memiliki layanan rumah singgah dan penampungan yang representatif
		Pemenuhan ruang dan hak anak masih belum optimal
		Pemberdayaan dan bantuan sosial masih belum tepat sasaran
		Belum optimalnya pengarusutamaan gender

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah. Melalui hasil penelaahan terhadap potensi daerah, dan permasalahan di Kabupaten Penajam Paser Utara, mempertimbangkan hasil telaahan terhadap isu strategis Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta isu lingkungan dinamis di level global, nasional, dan dalam cakupan Provinsi Kalimantan Timur, maka dihasilkan rumusan isu strategis daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara, sebagai berikut:



Tabel 1.4 Isu Strategis Daerah

Potensi Daerah	Permasalahan Daerah	Isu Strategis Daerah
Sebagai Kawasan Superhub Ekonomi Ibu Kota Nusantara	Belum optimalnya implementasi transformasi ekonomi berkelanjutan	Akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan
Tingginya usia produktif	Belum optimalnya kualitas SDM	Pengentasan kemiskinan terintegrasi
Stabilitas daerah yang terjaga	Belum meratanya pelayanan kesehatan yang berkualitas	Pengembangan sektor ekonomi potensial bernilai tambah
Dukungan infrastruktur wilayah	Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi	Pemerataan infrastruktur pelayanan publik dan pendukung perekonomian wilayah yang belum optimal
Potensi nilai budaya dan kearifan lokal daerah	Belum optimalnya implementasi ketahanan ekologi dan resiliensi perubahan iklim	Pengelolaan kelestarian lingkungan hidup dan kebencanaan
	Penurunan tingkat risiko bencana belum optimal	Kualitas manajemen ASN dan kinerja pelayanan publik
	Belum optimalnya perlindungan Sosial yang adaptif	Sinergi dan kolaborasi dengan IKN dan daerah sekitar

1. Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan

Berdasarkan analisis data harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius. Kendala yang dihadapi oleh Kabupaten Penajam Paser Utara dalam mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas diantaranya yaitu akses layanan pendidikan yang belum merata, kompetensi dan kualifikasi tenaga pendidik yang belum optimal, motivasi dan kesadaran masyarakat terhadap pendidikan masih rendah, dan dukungan sarana dan prasarana bidang pendidikan yang belum optimal. Upaya akselerasi layanan pendidikan berkualitas di Kabupaten Penajam Paser Utara perlu mendapatkan perhatian serius, mengingat kehadiran IKN Nusantara akan membuka peluang besar bagi penyerapan tenaga kerja dalam berbagai bidang. Upaya penyediaan layanan pendidikan vokasional menjadi penting untuk merespon kebutuhan tenaga kerja dan menjamin SDM Kabupaten Penajam Paser Utara mampu bersaing di dunia kerja.



Di samping itu, Kualitas layanan kesehatan di Kabupaten Penajam Paser Utara masih menghadapi beberapa tantangan diantaranya akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas masih belum optimal, dukungan sarana dan prasarana penunjang kesehatan yang masih belum lengkap, pelayanan kesehatan ibu dan anak yang belum optimal, kesadaran masyarakat akan pentingnya kualitas kesehatan masih rendah, serta upaya pemenuhan gizi seimbang bagi anak masih belum optimal. Lebih lanjut, komposisi penduduk lansia yang terus bertambah memerlukan fasilitas layanan kesehatan secara holistik sesuai dengan kebutuhan kelompok lansia.

Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas akan berdampak luas pada kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara. Pembangunan daerah diarahkan untuk menciptakan sumber daya manusia yang produktif dan mampu bersaing dan beradaptasi di tengah tantangan kemajuan teknologi dan perkembangan daerah yang berjalan begitu cepat. Untuk itulah, penguatan layanan dasar pendidikan dan kesehatan menjadi faktor penting untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang merata dan berkeadilan.

2. Pengentasan Kemiskinan Terintegrasi

Data indeks gini dan kemiskinan di Kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan bahwa rendahnya ketimpangan tidak disertai dengan tingginya tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal itu tampak dari indeks gini yang hanya pada angka 0,299 dan berhasil berada di bawah capaian Provinsi Kalimantan Timur serta nasional, namun tingkat kemiskinan juga mencapai 6,97 persen pada tahun 2023. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan melalui pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif yang ditandai dengan adanya perluasan sumber penghidupan yang dapat diakses serta dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Lebih lanjut lagi, permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan multidimensional yang tidak hanya terbatas pada persoalan sumber penghidupan. Sektor-sektor yang berkaitan dengan hajat hidup dan kesejahteraan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, jaminan sosial dan ketenagakerjaan juga perlu dirumuskan strategi pembangunannya secara integratif dengan tujuan akhir pengentasan kemiskinan yang holistik. Akses serta kualitas pendidikan dan kesehatan yang memadai, ketersediaan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah yang optimal, keberadaan jaminan sosial yang adaptif dan menyeluruh, serta perluasan kesempatan pekerjaan yang layak perlu



dilakukan untuk menurunkan kondisi kemiskinan di Kabupaten Penajam Paser Utara secara menyeluruh.

3. Pengembangan Sektor Ekonomi Potensial Bernilai Tambah

Pengembangan sektor ekonomi potensial dapat dijalankan dengan peningkatan kapasitas produksi, kualitas produk dan peningkatan kapasitas pemasaran produk-produk ekonomi potensial. Peningkatan kapasitas produksi dapat dijalankan dengan cara peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaku ekonomi, peningkatan kualitas sarana dan prasarana, peningkatan akses kemudahan terhadap bantuan permodalan, penggunaan metode modern serta peningkatan kemudahan akses dan mutu terhadap bahan produksi. Peningkatan kualitas produk dapat dijalankan dengan cara meningkatkan sertifikasi produk-produk ekonomi potensial. Peningkatan kapasitas pemasaran dapat dijalankan dengan penerapan metode pemasaran baruran (marketing-mix) secara berkesinambungan.

Proses industrialisasi terhadap produk-produk ekonomi potensial juga harus dijalankan secara berkesinambungan untuk meningkatkan nilai tambah dari berbagai produk di sektor ekonomi potensial. Riset dan inovasi produk unggulan dan potensial daerah juga harus dijalankan secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Nilai-nilai pembangunan berkelanjutan juga harus diperhatikan agar pertumbuhan ekonomi, kohesivitas sosial dan kualitas lingkungan dapat dijaga dengan baik.

4. Pemerataan Infrastruktur Pelayanan Publik dan Pendukung Perekonomian Wilayah yang Belum Optimal

Di beberapa daerah, termasuk Kabupaten Penajam Paser Utara, ketimpangan dalam pembangunan infrastruktur pelayanan publik ini masih menjadi masalah serius. Ketidakmerataan infrastruktur tersebut memiliki dampak terhadap kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Beberapa dampak tersebut di antaranya:

- a. Keterbatasan akses terhadap layanan publik: wilayah yang kurang berkembang sering kali memiliki akses terbatas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan fasilitas publik lainnya. Hal ini dapat berdampak pada kualitas hidup masyarakat dan potensi pengembangan sumber daya manusia di daerah tersebut.
- b. Perlambatan pertumbuhan ekonomi: infrastruktur yang tidak memadai dapat menghambat mobilitas barang dan orang, yang pada gilirannya dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah. Keterbatasan infrastruktur juga dapat mengurangi daya tarik investasi dan memperbesar kesenjangan ekonomi antarwilayah.



c. Peningkatan ketimpangan sosial: ketidakmerataan infrastruktur dapat memperparah ketimpangan sosial, karena daerah yang kurang berkembang tidak memiliki akses yang sama terhadap peluang ekonomi dan pendidikan. Hal ini dapat memperburuk kemiskinan dan memperlebar jurang ketimpangan sosial. Dengan demikian, pemerataan infrastruktur pelayanan publik dan pendukung perekonomian perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Melalui strategi yang tepat, termasuk tata kelola alokasi anggaran yang lebih adaptif, insentif untuk investasi, serta pemanfaatan teknologi, diharapkan permasalahan tersebut dapat teratasi dengan baik.

5. Pengelolaan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan

Kehadiran IKN yang berdekatan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara, menjadikan perencanaan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup maupun mitigasi dan penanggulangan bencana perlu direncanakan dengan baik. Kabupaten Penajam Paser Utara yang berbatasan langsung dengan IKN, tentu akan merasakan dampak dari segala bentuk aktivitas pembangunan maupun dampak ikutan lainnya, khususnya bagi kelestarian lingkungan hidup dan potensi kebencanaan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Kerusakan pada lingkungan seringkali memiliki hubungan terhadap potensi terjadinya bencana, seperti tanah longsor, banjir, banjir bandang, kebakaran hutan. Di antara bentuk perlindungan maupun pengawasan terhadap kelestarian lingkungan hidup sekaligus mitigasi kebencanaan di Kabupaten Penajam Paser Utara melalui penjagaan dan konservasi pada sumber-sumber air dan juga pada daerah tangkapan air, dengan harapan ketersediaan sumber daya air dan tata aliran air di Kabupaten Penajam Paser Utara dan daerah sekitarnya dapat terjaga dengan baik. Selain itu, penjagaan terhadap pemanfaatan lahan sesuai dengan tata ruang juga memiliki urgensi yang tinggi dalam upaya perlindungan lingkungan hidup sekaligus sebagai bentuk mitigasi kebencanaan di Kabupaten Penajam Paser Utara.

6. Kualitas Manajemen ASN dan Kinerja Pelayanan Publik

Manajemen ASN merupakan pengelolaan ASN untuk menghasilkan ASN yang profesional, bersih, dan bebas dari berbagai intervensi politik. Manajemen ASN yang tidak dikelola secara baik dapat berpengaruh terhadap kinerja pelayanan publik buruk. Salah satu cara meningkatkan kualitas manajemen ASN, yaitu melalui digitalisasi manajemen ASN seperti memanfaatkan TIK, baik dalam membangun sistem ataupun data untuk mempermudah penyelenggaraan dan pelayanan manajemen ASN. Pengelolaan manajemen ASN juga harus sesuai dengan prinsip meritokrasi sehingga penempatan atau promosi



jabatan misalnya sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi serta keterampilan yang dibutuhkan.

Kinerja pelayanan publik perlu ditingkatkan. Dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik dapat dilakukan melalui digitalisasi pelayanan publik dan meningkatkan inovasi untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan publik. Selain itu, profesionalitas ASN yang didukung oleh manajemen ASN yang sesuai dengan prinsip meritokrasi juga menjadi prasyarat penting dalam peningkatan kinerja pelayanan publik.

7. Sinergi dan Kolaborasi dengan IKN dan Daerah Sekitar

Sebagian wilayah dan penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara yang turut masuk ke dalam kawasan IKN, mengharuskan adanya sinergitas dan kolaborasi pembangunan antara Penajam Paser Utara dengan IKN. Integrasi dan sinergitas pembangunan dengan IKN menjadi isu strategis yang harus direspon baik dalam kebijakan jangka panjang, menengah, maupun pendek. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara harus memastikan integrasi dan sinergitas pembangunan IKN memiliki dampak positif yang lebih besar dibandingkan dampak negatifnya terhadap pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara, sehingga dapat maju dan berkembang bersama. Integrasi dan sinergitas harus diimplementasi di seluruh aspek pembangunan daerah, baik ekonomi, sosial budaya, lingkungan, dan politik agar terwujudnya pembangunan daerah yang menyejahterakan.

E **Sistematika Penyajian**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025 ini menyajikan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara selama Tahun 2025 berdasarkan perjanjian kinerja dan perbandingan dengan capaian kinerja beberapa tahun sebelumnya serta capaian terhadap kondisi akhir RPD tahun 2026 sebagai tolak ukur keberhasilan pemerintah daerah. Laporan Kinerja ini juga menyajikan pencapaian kinerja atas target pada RPJMD tahun 2025 - 2029, dimana Tahun 2025 ini merupakan tahun awal RPJMD 2025-2029.

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan



Pada bab ini disajikan gambaran umum daerah, kedudukan dan fungsi organisasi, Sumber Daya Aparatur, permasalahan umum dan isu strategis yang sedang dihadapi organisasi, serta sistematika penyajian.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar sasaran strategis daerah, dan perjanjian kinerja tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Hasil dan Tindak Lanjut Evaluasi AKIP 2025

Pada sub bab ini disajikan hasil evaluasi AKIP oleh KemenPAN dan RB tahun 2025 beserta rekomendasi dan tindak lanjutnya.

B. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan kabupaten/ kota seKalimantan Timur, dan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
7. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya.

C. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah dibelanjakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.



D. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran kaitannya dengan kinerja atas penggunaan anggaran.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

- 1). Rencana Kinerja Tahun 2025
- 2). Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- 3). Pengukuran Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target RPD 2024 – 2026
- 4). Pengukuran Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target RPJMD 2025 – 2029
- 4). Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang tahun 2025 – 2029 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 - 2029. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah memuat tentang penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran daerah, strategis dan arah kebijakan, serta program prioritas daerah.

A**Rencana Strategis****1.****Visi dan Misi**

Visi Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan landasan utama dalam merumuskan berbagai kondisi pendukung, baik pada level misi, tujuan, sasaran, hingga program prioritas daerah. Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025 – 2029 adalah :

“Berkolaborasi Membangun Penajam Paser Utara yang Unggul, Berkeadilan, Sejahtera, dan Berdaya Saing sebagai Gerbang Ibu Kota Nusantara erwujudnya

Dalam mewujudkan visi yang tercantum di dalam RPJMD Tahun 2025-2029 tersebut, ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara, sebagai berikut :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Berdaya Saing.

Misi ini berorientasi pada upaya pemerintah untuk menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing. SDM yang unggul mengacu pada individu yang memiliki keterampilan, wawasan, dan karakter yang tangguh dalam menghadapi

tantangan pembangunan. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan upaya peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan, pelatihan keterampilan, serta program peningkatan kapasitas tenaga kerja melalui pendidikan vokasional sehingga mampu meningkatkan daya saing SDM baik di Tingkat lokal, nasional, maupun global. Selain itu, aspek layanan kesehatan yang berkualitas, kesejahteraan sosial, dan pembentukan karakter juga menjadi faktor krusial dalam menciptakan SDM yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga sehat dan berintegritas.

Sebagai daerah yang memiliki posisi strategis, terutama dengan keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara perlu menyiapkan sumber daya manusia yang kompetitif di berbagai sektor. Oleh karena itu, upaya penguatan inovasi, peningkatan produktivitas, serta pengembangan ekosistem ekonomi kreatif dan digital perlu dilakukan. Melalui langkah-langkah ini, sumber daya manusia Kabupaten Penajam Paser Utara diharapkan mampu memiliki daya saing yang lebih baik, sehingga tidak hanya menjadi pengamat dalam pembangunan, melainkan turut serta dalam memajukan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dalam kerangka inovasi dan digitalisasi pelayanan publik Meningkatkan sarana prasarana penunjang produktivitas ekonomi masyarakat.

Misi ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dalam kerangka kolaborasi. Hal ini dilakukan melalui penerapan prinsip good governance dan clean governance, yang berorientasi pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pelayanan publik. Tata kelola pemerintahan yang semakin baik dan bersih dicapai melalui reformasi birokrasi yang berkelanjutan, dengan fokus pada penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, efisien, dan berintegritas. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi aspek utama dalam reformasi tata kelola pemerintahan yang melayani, akuntabel, dan bersih. Keberhasilan dalam aspek ini dapat dilihat menggambarkan sejauh mana masyarakat merasakan kemudahan, kecepatan, dan keterbukaan dalam memperoleh layanan pemerintahan. Optimalisasi ini dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi, penyederhanaan proses birokrasi, serta penguatan sistem pengawasan yang mendorong keterbukaan dan efisiensi. Kolaborasi antar pemangku kepentingan juga menjadi kunci dalam menciptakan pemerintahan yang lebih responsif dan partisipatif, sehingga dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.



3. Mewujudkan pembangunan ekonomi daerah yang menyejahterakan, berkeadilan dan inklusif

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi terkadang mendatangkan persoalan tersendiri terlebih jika tidak diikuti dengan prinsip pembangunan ekonomi yang inklusif. Pembangunan ekonomi daerah seharusnya tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi juga mampu menjamin kesejahteraan masyarakat. Mewujudkan pembangunan ekonomi daerah yang menyejahterakan dan berkeadilan berbasis ekonomi kerakyatan menjadi misi yang akan mengawal agenda pembangunan ekonomi di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pengembangan ekonomi kerakyatan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat menjadi kunci pemerataan pembangunan ekonomi di Kabupaten Penajam Paser Utara. Secara lebih spesifik, kebijakan yang berpihak pada UMKM dan ekonomi kreatif menjadi salah satu fokus pembangunan ekonomi daerah. Keberadaan UMKM dan ekonomi kreatif diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan nilai tambah perekonomian daerah.

4. Mewujudkan ketahanan pangan daerah

Misi Ketahanan pangan daerah dimaknai dengan kemampuan dari Kabupaten Penajam Paser Utara nantinya dalam menyediakan pangan yang cukup, bergizi, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat, serta memastikan kestabilan pangan daerah. Misi ini menunjukkan komitmen untuk menciptakan sistem pangan yang tidak hanya bergantung pada pasokan eksternal, tetapi lebih pada kemandirian daerah dalam memproduksi dan mengelola sumber daya pangan lokal.

Pemaknaan dari misi ini juga dititikberatkan pada upaya untuk membangun sistem pangan yang tangguh, mampu mengatasi berbagai tantangan yang muncul, seperti bencana alam, fluktuasi harga pangan global, dan krisis ekonomi. Lebih lanjut lagi, ketahanan pangan daerah tidak hanya terkait jumlah pangan yang tersedia, namun juga terkait dengan kualitas, keberagaman, dan keberlanjutan sumber daya pangan yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara. Dengan demikian, misi ini juga mencakup terkait peningkatan kapasitas petani dan pelaku usaha pangan lokal, pengelolaan yang efisien terhadap sumber daya alam, serta peningkatan infrastruktur yang mendukung distribusi pangan secara merata.

Adanya regulasi yang mengatur terkait larangan alih fungsi lahan pertanian pangan, peraturan daerah terkait kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) juga diharapkan nantinya dapat memberi dukungan yang signifikan dalam meningkatkan produksi tanaman



pangan. Adapun program-program unggulan yang direncanakan untuk mewujudkan misi ini yaitu melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pembangunan jalan usaha tani, jaringan irigasi usaha tani, peningkatan SDM Pertanian, mitigasi bencana pertanian, pembangunan lumbung pangan/lantai jemur, serta peningkatan sarana prasarana perikanan.

5. Mewujudkan Pembangunan Sosial Budaya dalam Bingkai Keberagaman

Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki komitmen untuk mewujudkan pembangunan sosial budaya yang inklusif dan berkelanjutan pada periode pembangunan 2025-2029. Misi tersebut berlandaskan pada semangat dalam memperkuat identitas sosial dan budaya di tengah dinamika perubahan yang semakin kompleks. Misi Mewujudkan pembangunan sosial budaya dalam bingkai keberagaman menjadi landasan utama dalam merancang kebijakan dan program yang mampu mempererat kohesi sosial, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, serta melestarikan warisan budaya lokal. Keberagaman merupakan potensi besar yang dapat memperkaya kehidupan sosial dan mendorong pembangunan daerah yang harmonis.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara akan mengedepankan prinsip inklusivitas, gotong royong, dan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya lokal. Sinergi antara masyarakat dengan berbagai elemen sosial lainnya diperkuat untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan sejahtera. Pembangunan sosial budaya di Kabupaten Penajam Paser Utara akan diarahkan pada peningkatan akses pendidikan dan kebudayaan, penguatan kearifan lokal dalam tata kelola pemerintahan, serta pemberdayaan komunitas dalam menjaga dan mengembangkan tradisi. Misi mewujudkan pembangunan sosail budaya dalam bingkai keberagaman diharapkan mampu mengelola perbedaan sebagai sebagai kekuatan untuk membangun Penajam Paser Utara yang lebih baik.

6. Mewujudkan pemerataan pembangunan wilayah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

Misi ini berfokus pada perwujudan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata, serta mewujudkan ketahanan ekologi di Kabupaten Penajam Paser Utara. Infrastruktur yang berkualitas dan merata mencakup infrastruktur pelayanan dasar dan infrastruktur penunjang perekonomian. Pembangunan infrastruktur yang merata di diharapkan dapat menciptakan kemudahan interaksi antar daerah dan selanjutnya mendorong Kabupaten Penajam Paser Utara dapat memiliki peran strategis di Kalimantan Timur. Terlebih dengan hadirnya IKN yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Penajam



Paser Utara, menjadikan posisi tersebut berpotensi untuk dioptimalkan. Pemerataan pembangunan infrastruktur mencakup peningkatan kuantitas dan kualitas jaringan jalan kabupaten, jaringan air minum, jaringan irigasi, penataan kawasan kumuh, serta pengembangan fasilitas pengolahan sampah. Pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi berkorelasi dengan meratanya pembangunan infrastruktur akan berdampak bagi akselerasi ekonomi daerah secara signifikan.

Ketahanan ekologi berfokus pada lingkungan hidup yang berkelanjutan, kondisi yang diharapkan dapat terus terjaga. Artinya, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perlu dilakukan secara bijak dan berorientasi pada prinsip kelestarian lingkungan hidup. Dengan demikian, dalam melaksanakan agenda pembangunan penting untuk melakukan integrasi dengan skenario-skenario pembangunan dari hasil kajian lingkungan hidup.

2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025 -2029 terdapat 3 tujuan dan 12 sasaran pembangunan. Tabel di bawah ini menyajikan keterkaitan antara tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara. Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan ini diharapkan dapat menjawab isu strategis pembangunan daerah.

**Tabel 2.1 Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025 -2029**

Misi/ Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Berdaya Saing			
Tujuan 1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing			
	S1.1 Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan	1. Perbaikan dan Peningkatan Bangunan Sekolah; 2. Pemberian Beasiswa Pendidikan; 3. Pemberian Seragam dan kelengkapan Sekolah; 4. Pemberian Insentif Tenaga Pendidik; 5. Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendidik; 6. Pengembangan sistem dan model pembelajaran berbasis teknologi inovatif.	1. Memperluas cakupan partisipasi sekolah wajib belajar 13 tahun; 2. Menyediakan beasiswa dan bantuan pendidikan bagi peserta didik; 3. Meningkatkan Kualitas Pendidik dan transformasi Pembelajaran Digital.

Misi/ Tujuan	Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
	S1.2	Derajat Kesehatan Masyarakat Semakin Meningkat	1. Peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan; 2. Penguatan sistem rujukan berjenjang; 3. Peningkatan Kapasitas dan pemerataan tenaga kesehatan; 4. Perluasan perlindungan jaminan kesehatan; 5. Penguatan penanganan penyakit menular dan tidak menular penting; 6. Peningkatan gizi masyarakat dan pencegahan stunting; 7. Penguatan layanan kesehatan ibu dan anak.	1. Meningkatkan sarana prasarana kesehatan dasar dan rujukan yang memadai; 2. Menyediakan jaminan sosial kesehatan bagi masyarakat; 3. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan kesehatan setiap kelompok usia siklus hidup, penanganan stunting, kesehatan ibu dan anak, serta penyakit menular dan tidak menular.
	S1.3	Meningkatnya Kesetaraan Gender	1. Penguatan prinsip inklusivitas gender dan disabilitas dalam perencanaan dan disain sarana prasarana layanan publik; 2. Penyediaan layanan publik pemerintah yang dapat diakses seluruh kelompok; 3. Pelibatan kelompok rentan dalam perencanaan pembangunan; 4. Penyediaan pusat pelayanan perlindungan perempuan dan kelompok rentan yang optimal.	1. Meningkatkan penyediaan sarana prasarana layanan publik ramah gender dan disabilitas; 2. Memperkuat proses perencanaan dan penganggaran yang responsif gender; 3. Meningkatkan perlindungan bagi perempuan dan kelompok rentan.
Misi 2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dalam kerangka inovasi dan digitalisasi pelayanan publik				
Tujuan 3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas				
	S3.1	Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Kolaboratif	1. Penyesuaian struktur organisasi berdasarkan evaluasi kelembagaan secara berkala dan berbasis kinerja; 2. Penguatan reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi; 3. Perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja; 4. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan akuntabilitas kinerja.	1. Penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah; 2. Penguatan regulasi standar pelayanan pemerintahan dan implementasinya; 3. Penguatan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis data.



Misi/ Tujuan	Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
	S3.2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital	1. Pembangunan dan pengembangan layanan publik berbasis digital; 2. Peningkatan jaringan internet pada fasilitas layanan publik.	1. Pengembangan sistem layanan publik digital yang responsif dan terintegrasi; 2. Peningkatan infrastruktur TIK pendukung layanan pemerintahan.
Misi 3. Mewujudkan pembangunan ekonomi daerah yang menyejahterakan, berkeadilan dan inklusif				
Tujuan 2. Ekonomi Daerah yang Menyejahterakan, Berkeadilan, dan Berkelanjutan				
	S2.1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah	1. Pengembangan produktifitas komoditi unggulan 2. Pengembangan kawasan pusat ekonomi terpadu 3. Optimalisasi peran sentra industri Kabupaten 4. Mendorong peningkatan investasi melalui kemudahan perizinan 5. Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif dan UMKM 6. Penguatan kelembagaan koperasi 7. Penguatan peran Kawasan Peruntukan Industri Buluminung bagi peningkatan PAD 8. Peningkatan daya saing BUMD melalui inovasi model bisnis dan ekspansi sektor prioritas 9. Peningkatan manfaat pengelolaan aset daerah melalui sumber pendanaan alternatif 10. Perluasan akses layanan keuangan formal secara inklusif 11. Pengembangan dan pembangunan destinasi wisata unggulan 12. Pengendalian inflasi dengan menjamin ketersediaan stok dan keterjangkauan harga komoditas pokok 13. Peningkatan ekspor barang dan jasa melalui penguatan pasar lokal	1. Mengoptimalkan nilai tambah KPI Buluminung 2. Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Lokal 3. Pengembangan pusat bisnis, pemasaran dan logistik bagi produk unggulan Penajam Paser Utara 4. Penguatan infrastruktur pendukung kawasan industri dan pertanian berbasis potensi lokal melalui pengembangan transportasi, energi, irigasi, telekomunikasi, dan logistik untuk mendorong konektivitas, hilirisasi, dan pertumbuhan ekonomi wilayah yang berkelanjutan 5. Mendorong penguatan koperasi dan BUMD, hilirisasi komoditas unggulan, penguatan kelembagaan UMKM, optimalisasi aset daerah, pengembangan kerja sama strategis, diversifikasi usaha, serta peningkatan kapasitas pengelola UMKM sesuai kewenangan daerah 6. Meningkatkan inklusi keuangan yang merata dan berkelanjutan melalui perluasan akses layanan keuangan formal, penguatan peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah, serta pemberdayaan UMKM dan masyarakat rentan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.



Misi/ Tujuan	Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
	S2.2	Menurunnya Kemiskinan	1. Peningkatan cakupan dan kualitas perlindungan sosial; 2. Peningkatan akses dan kualitas layanan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); 3. Mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dan rentan melalui Usaha Ekonomi Produktif; 4. Peningkatan akses pelayanan dasar bagi masyarakat miskin; 5. Pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.	1. Penyediaan tenaga kerja sesuai kualifikasi pasar kerja dilaksanakan melalui pelatihan reskilling, upskilling dan newskilling serta transisi school-to-work 2. Pengentasan kemiskinan secara kolaboratif melalui perlindungan sosial adaptif yang didukung data akurat penerima manfaat menjangkau seluruh penduduk rentan terutama kelompok marginal 3. Pemenuhan perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi bagi seluruh masyarakat dilaksanakan secara terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif dengan memanfaatkan data sosial-ekonomi masyarakat berbasis individu yang diperbaharui secara berkala 4. Pemberian program bantuan sosial tepat sasaran dan responsif terhadap kondisi kedaruratan 5. Meningkatkan graduasi penduduk miskin melalui pemberdayaan dan program usaha ekonomi produktif bagi keluarga miskin 6. Meningkatkan kualitas layanan kesejahteraan sosial dasar bagi PPKS dan kelompok rentan
	S2.3	Menurunnya Pengangguran	1. Peningkatan keterampilan melalui pelatihan, sertifikasi angkatan kerja dan pendidikan vokasi 2. Perluasan kemitraan dengan dunia usaha dan industri dalam penempatan kerja penduduk lokal 3. Peningkatan akses informasi pasar kerja 4. Perlindungan tenaga kerja	1. Meningkatkan kapasitas angkatan kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi menyesuaikan kebutuhan Dunia Usaha Dunia Industri dan peluang kebutuhan tenaga kerja IKN 2. Kerjasama dan kemitraan dengan dunia usaha dalam perluasan kesempatan kerja penduduk lokal 3. Pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan



Misi/ Tujuan	Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
Misi 4. Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah				
Tujuan 2. Ekonomi daerah yang menyejahterakan, berkeadilan dan berkelanjutan				
	S2.4	Meningkatnya Ketahanan Pangan	1. Peningkatan produksi pangan lokal 2. Peningkatan konsumsi pangan lokal bergizi 3. Optimalisasi ketersediaan dan distribusi cadangan pangan untuk menjamin keamanan pangan	1. Penguatan kapasitas produksi pangan melalui perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, pengembangan areal baru, optimalisasi lahan kering, serta penyediaan infrastruktur pendukung pertanian dan perikanan 2. Pengembangan kawasan sentra produksi terpadu dan modern, serta penyediaan fasilitas pengolahan dan penyimpanan hasil pertanian-perikanan seperti lumbung pangan dan cold storage di pusat-pusat produksi 3. Meningkatkan konsumsi pangan lokal bergizi melalui edukasi masyarakat, promosi pangan lokal, dan diversifikasi produk olahan guna memperkuat ketahanan gizi dan ekonomi petani.
Misi 5. Mewujudkan Pembangunan Sosial Budaya dalam Bingkai Keberagaman				
Tujuan 1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing				
	S1.4	Meningkatnya Harmoni Sosial Budaya Masyarakat	1. Penguatan peran lembaga adat dan komunitas masyarakat dalam menjaga kerukunan dan toleransi 2. Penguatan pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat 3. Peningkatan kapasitas deteksi dini dan penyelesaian konflik sosial 4. Pelestarian budaya lokal melalui pengembangan pusat budaya, pendidikan karakter, dan penyediaan ruang publik bagi aktivitas sosial dan kebudayaan 5. Menetapkan dan melindungi situs-situs bersejarah serta objek budaya sebagai cagar budaya daerah untuk mendukung pelestarian warisan budaya	1. Fasilitasi kegiatan pelestarian adat istiadat dan kebudayaan 2. Peningkatan kapasitas komunitas dan lembaga kemasyarakatan Desa/ Kelurahan 3. Penguatan perlindungan masyarakat lokal dan budaya melalui pengembangan pusat budaya, pelestarian bahasa daerah, pendidikan karakter berbasis kearifan lokal, serta penyediaan ruang publik untuk aktivitas sosial dan kebudayaan



Misi/ Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 6. Mewujudkan pemerataan pembangunan wilayah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan			
Tujuan 2. Ekonomi daerah yang menyejahterakan, berkeadilan dan berkelanjutan			
	S2.5 Meningkatnya Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas	1. Peningkatan sistem transportasi yang aman, terjangkau dan terintegrasi antar wilayah 2. Peningkatan konektivitas antar wilayah melalui pembangunan jalan, jembatan 3. Peningkatan dan pemerataan infrastruktur dasar 4. Peningkatan kualitas serta penataan lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang merata 5. Pembangunan gedung perkantoran pemerintahan untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik 6. Peningkatan penataan ruang berbasis daya dukung lingkungan dan pemanfaat ruang yang berkelanjutan 7. Peningkatan kualitas konstruksi melalui pembinaan dan sertifikasi tenaga kerja	1. Mengembangkan sistem transportasi yang terintegrasi untuk menghubungkan pusat-pusat kegiatan ekonomi dengan wilayah pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata guna meningkatkan kemudahan mobilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah 2. Peningkatan akses terhadap rumah layak huni dan terjangkau sesuai karakteristik wilayah melalui kolaborasi antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan 3. Pemerataan kualitas keselamatan Jalan dan jembatan yang menghubungkan kawasan strategis wilayah 4. Pemenuhan akses air minum dan sanitasi yang aman, berkelanjutan, dan inklusif melalui jaringan perpipaan, peningkatan layanan sanitasi, penguatan kelembagaan SPAM, pengawasan kualitas air, dan pemanfaatan IPTEK 5. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan melalui rehabilitasi ekosistem kritis, konservasi keanekaragaman hayati, penguatan peran masyarakat berbasis kearifan lokal, dan perencanaan tata ruang yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup 6. Pengembangan pembiayaan inovatif dilaksanakan melalui Kerja Sama Pembiayaan Badan Usaha (KPBU), CSR, blended finance 7. Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan secara bertahap guna mendukung pemenuhan kebutuhan layanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif, serta pemerataan fasilitas pelayanan di seluruh wilayah.



Misi/ Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		1. Peningkatan program penanaman pohon dan reboisasi; 2. Mendorong perlindungan Ekosistem dan Keanekaragaman Hayati melalui edukasi dan kolaborasi berbasis masyarakat; 3. Penguatan kapasitas kelembagaan dan peran masyarakat melalui kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan; 4. Optimalisasi perencanaan tata ruang yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan 5. Pemantauan kualitas air, tanah, dan udara secara berkala, dengan melibatkan masyarakat 6. Penguatan perizinan dan pengawasan terhadap Izin Lingkungan 7. Optimalisasi pengelolaan sampah terintegrasi melalui edukasi, pemilahan dari sumber, penerapan 3R dan pembangunan TPST; 8. Penguatan kapasitas mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana 9. Penguatan respon cepat terhadap bencana 10. Penguatan peran stakeholder dalam penanggulangan bencana 11. Penyediaan rumah layak huni dan relokasi korban bencana.	1. Meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana 2. Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi melalui edukasi masyarakat, penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse dan Recycle), dan penguatan pemilahan sejak dari sumber 3. Perlindungan dan rehabilitasi hutan dan lahan gambut dilaksanakan melalui penghambatan laju deforestasi, peningkatan restorasi hutan dan lahan gambut, penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan; 4. Perlindungan keanekaragaman hayati dilaksanakan melalui konservasi sumber daya alam dan lingkungan 5. Penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal dilaksanakan melalui pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan yang didukung inisiatif lokal dengan memanfaatkan pengetahuan tradisional untuk melestarikan ekosistem 6. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup.



Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025 masih mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2025 dikarenakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 baru ditetapkan pada Agustus tahun 2025. Namun, laporan kinerja instansi pemerintah ini juga menyajikan tujuan, sasaran, indikator beserta target dan realisasinya di tahun 2025.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2025, ditetapkan 5 Tujuan dengan 8 indikator, dan 14 Sasaran dengan 18 indikator kinerja. Perjanjian Kinerja ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja. Adapun Perjanjian Kinerja yang akan dicapai di tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Tujuan 1. Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Pemerataan Kesejahteraan			
Indikator Kinerja		Satuan	Target
1.1	Persentase Kemiskinan	Persen	5,50
1.2	Rasio Gini	Rasio	0,275
Sasaran Strategis 1.1 Peningkatan Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial kepada Masyarakat Miskin dan Rentan			
1.1.1	Persentase Masyarakat Miskin Mendapat Bantuan/ Jaminan Sosial	Persen	47,80
Sasaran Strategis 1.2 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat			
1.2.1	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,8255
Sasaran Strategis 1.3 Perluasan kesempatan kerja serta peningkatan kapasitas dan perlindungan tenaga kerja			
1.3.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2,00
Tujuan 2. Meningkatkan Kualitas Hidup SDM			
2.1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	75
Sasaran Strategis 2.4 Peningkatan kualitas Pendidikan			
2.4.1	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,45
2.4.2	Rata - Rata Lama Sekolah	Tahun	9,35
Sasaran Strategis 2.5 Peningkatan Kualitas Kesehatan			
2.5.1	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,50
2.5.2	Prevalensi Stunting	Tahun	10,92

Sasaran Strategis 2.6 Peningkatan kualitas kehidupan keluarga sejahtera dan responsif gender			
2.6.1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	87,55
Sasaran Strategis 2.7 Peningkatan kualitas pembangunan kebudayaan dan penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan yang berwawasan kebangsaan			
2.7.1	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kepemudaan, Kebudayaan, dan Kemasyarakatan	Persen	45
Tujuan 3. Meningkatkan standar tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			
3.1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	63,70
3.2	Indeks SPBE	Indeks	3
Sasaran Strategis 3.8 Penguatan birokrasi yang efektif dan efisien			
3.8.1	Rata - Rata Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Kategori	B
3.8.2	Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Persen	8,50
Sasaran Strategis 3.9 Peningkatan pelayanan prima kepada publik			
3.9.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85,88
Tujuan 4. Peningkatan Transformasi Ekonomi yang Berdaya Saing			
4.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	10,00
Sasaran Strategis 4.10 Peningkatan kontribusi PDRB Sektor Non Pertambangan dan Penggalian			
4.10.1	LPE Non Pertambangan dan Penggalian	Persen	4,82
Sasaran Strategis 4.11 Optimalisasi Capaian Investasi/ Penanaman Modal di Daerah			
4.11.1	Nilai Realisasi PMDN & PMA	Rupiah	1.053.366.000.000
Tujuan 5. Peningkatan Pelayanan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan			
5.1	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	67
5.2	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	24,40
Sasaran Strategis 5.12 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup			
5.12.1	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	71,85
Sasaran Strategis 5.13 Peningkatan Ketahanan Kebencanaan			
5.13.1	Indeks Resiko Bencana	Indeks	120,66
Sasaran Strategis 5.14 Peningkatan pelayanan infrastruktur			
5.14.1	Persentase pemenuhan rumah layak huni	Persen	65
5.14.2	Persentase jalan Mantap	Persen	30,00



Tabel 2.3 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target pada RPJMD Tahun 2025-2029

Tujuan 1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing			
Indikator Kinerja		Satuan	Target
1.1	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	75,49
Sasaran Strategis 1.1 Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan			
1.1.1	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,61
1.1.2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,94
1.1.3	Rapor Pendidikan	Angka	75
Sasaran Strategis 1.2 Derajat Kesehatan Masyarakat Semakin Meningkat			
1.2.1	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,98
Sasaran Strategis 1.3 Meningkatnya Kesenjangan Gender			
1.3.1	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,454
Sasaran Strategis 1.4 Meningkatnya Harmoni Sosial Budaya Masyarakat			
1.4.1	Indeks Harmoni Indonesia	Indeks	7,20
Tujuan 2. Ekonomi Daerah yang Menyejahterakan, Berkeadilan, dan Berkelanjutan			
2.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	7,6
2.2	Indeks Gini	Indeks	0,251
Sasaran Strategis 2.5 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah			
2.5.1	Kontribusi Pertanian Terhadap PDRB (Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan)	Persen	16,69
2.5.2	Nilai Investasi	Rupiah	1.100.000.000.000
Sasaran Strategis 2.6 Menurunnya Kemiskinan			
2.6.1	Tingkat Kemiskinan	Persen	5,86 - 6,18
Sasaran Strategis 2.7 Menurunnya Pengangguran			
2.7.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	1,90 - 2,00
Sasaran Strategis 2.8 Meningkatnya Ketahanan Pangan			
2.8.1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	89,11
Sasaran Strategis 2.9 Meningkatnya Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas			
2.9.1	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks	7,70
Sasaran Strategis 2.10 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Bencana			
2.10.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	76,48
2.10.2	Indeks Risiko Bencana	Indeks	115,81
Tujuan 3. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas			
3.1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	69,98



Sasaran Strategis 3.11 Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Kolaboratif			
3.11.1	Nilai AKIP Pemerintah Daerah	Angka	65,50
3.11.2	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	56
3.11.3	Survei Penilaian Integritas KPK	Angka	63
Sasaran Strategis 3.12 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital			
3.12.1	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,77
3.12.1	Indeks Pemerintah Digital	Indeks	1,49



Sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerja pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan, maka Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara selaku pengemban tugas dan amanah masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025.

Pada Bab ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, analisis akuntabilitas kinerja, dan analisis efisiensi penggunaan sumber daya, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta beberapa langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
> 90 – 100	Sangat Memuaskan
> 80 – 90	Memuaskan
> 70 – 80	Sangat Baik
> 60 – 70	Baik
> 50 – 60	Cukup
> 30 – 50	Kurang
> 0 – 30	Sangat Kurang

A

Hasil dan Tindak Lanjut Evaluasi AKIP 2025



Berdasarkan Hasil Evaluasi AKIP tahun 2025 oleh Kementerian PAN dan RB terdapat rekomendasi, dimana sebagian besar telah ditindaklanjuti dan sebagiannya masih dalam

proses pelaksanaan. Adapun rekomendasi dan tindak lanjut atas Hasil Evaluasi AKIP tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 3.2 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Atas Hasil Evaluasi AKIP Tahun

 Rekomendasi	 Tindak Lanjut
Perencanaan Kinerja 1. Melakukan reviu dan perbaikan penjenjangan kinerja dari level jabatan tertinggi hingga level operasional dengan memperhatikan logical framework dan Critical Success Factor dalam mencapai tujuan dan sasaran pemerintah daerah; 2. Meningkatkan kualitas pohon kinerja di sebagian perangkat daerah sehingga dapat menjabarkan dan mengidentifikasi faktor-faktor lain yang mendukung kinerja dan menerjemahkannya ke dalam program/ kegiatan sehingga pelaksanaan program dan kegiatan yang benar-benar mendukung kinerja tidak hanya business as usual; 3. Memastikan kualitas penentuan indikator kinerja utama dalam perangkat daerah sehingga lebih berorientasi pada hasil, memenuhi kriteria SMART sehingga lebih tepat untuk menggambarkan kondisi yang ingin dituju; 4. Agar Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah dijadikan 1 file dokumen untuk 1 perangkat daerah agar tidak terpisah-pisah.	1. Melakukan perbaikan terhadap penjenjangan kinerja dengan menyelaraskan tujuan/sasaran strategis, indikator, dan target kinerja dari tingkat tertinggi hingga level operasional yang memperhatikan logical framework dan critical success factor; 2. Melakukan identifikasi perangkat daerah yang pohon kinerjanya kurang berkualitas dan melakukan perbaikan pohon kinerja dengan memperhatikan prinsip-prinsip dalam membangun pohon kinerja, terutama pada faktor-faktor lain yang mendukung kinerja; 3. Melakukan reviu dan perbaikan terhadap Indikator Kinerja Utama perangkat daerah dan seluruh dokumen perencanaan perangkat daerah agar menyajikan indikator yang berorientasi hasil dan memenuhi kriteria SMART; 4. Melakukan monitoring dan perbaikan terhadap dokumen AKIP yang diupload perangkat daerah di esr Kemenpan RB, agar sesuai dengan ketentuan yang ada di esr Kempan RB;
Pengukuran Kinerja 5. Agar seluruh perangkat daerah memastikan pengukuran kinerja dilakukan secara triwulan, dan melakukan identifikasi masalah/kendala serta menetapkan solusi terhadap hasil pengukuran kinerja tersebut; 6. Agar setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit di bawahnya secara berjenjang;	5. Memastikan seluruh perangkat daerah melakukan pengukuran kinerja per triwulan, dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap dokumen pengukuran kinerja perangkat daerah dan memastikan memuat identifikasi masalah/ kendala serta solusi ke depannya; 6. Memastikan seluruh perangkat daerah melakukan pemantauan atas pengukuran kinerja pada setiap jenjang melalui evaluasi internal di perangkat daerah;



Rekomendasi

7. Agar pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (decision maker) dalam pemanfaatan hasil pengukuran kinerja.

Pelaporan Kinerja

8. Beberapa perangkat daerah analisis efisiensi atas kinerja anggaran agar lebih detail dan dijelaskan dengan rumusan dasar perhitungan efisiensi;

9. Memuat analisis keberhasilan dan kegagalan pada laporan kinerja yang lebih berkualitas dan disertai data cukup mengapa target kinerja tercapai atau tidak tercapai sehingga dapat menjadi masukan untuk perencanaan di periode berikutnya.

Evaluasi Internal

10. Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja agar lebih menggambarkan tingkat akuntabilitas unit yang dievaluasi, serta memastikan rekomendasi hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan.



Tindak Lanjut

7. Menghimbau seluruh perangkat daerah agar pimpinan perangkat daerah selalu terlibat di dalam monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja yang minimal dilakukan per triwulan, serta memperhatikan masalah/ kendala serta alternatif solusi yang ada untuk perbaikan hasil.

8. Memastikan laporan kinerja perangkat daerah memuat analisis efisiensi atas kinerja anggaran yang lebih detail dan menyajikan rumusan dasar perhitungan efisiensi;

9. Memastikan laporan kinerja perangkat daerah memuat analisis yang berkualitas tentang penyebab keberhasilan/ kegagalan kinerja dengan disertai data yang cukup, sehingga menjadi bahan masukan kebijakan di periode berikutnya.

10. Meningkatkan kualitas SDM Evaluator AKIP dan melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut atas hasil rekomendasi evaluasi AKIP.

B

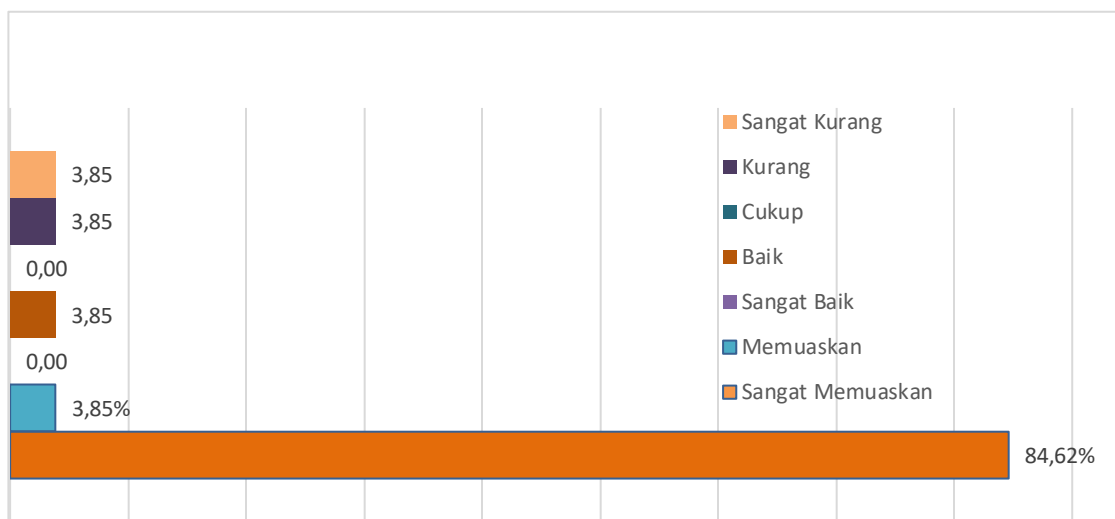
Capaian Kinerja Organisasi



Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara terus berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara selaku pengemban amanah masyarakat, secara umum telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan yang merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat dan kewajiban sebagai penyelenggara pelayanan publik.



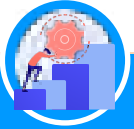
**Grafik 3.1 Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2025
Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2025**



Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai di dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025 terdapat 5 tujuan dengan 8 indikator dan 14 sasaran dengan 18 indikator kinerja. Dari 26 indikator kinerja, sebanyak 22 indikator atau 84,62 % dalam kriteria **Sangat Memuaskan**, 1 indikator kinerja atau 3,85 % dalam kriteria **Memuaskan**, 1 indikator kinerja atau 3,85 % dalam kriteria **Baik**, 1 indikator kinerja atau 3,85 % dalam kriteria **Cukup**, dan 1 indikator kinerja atau 3,85 % dalam kriteria **Sangat Kurang**. Selengkapnya capaian indikator kinerja Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun 2025

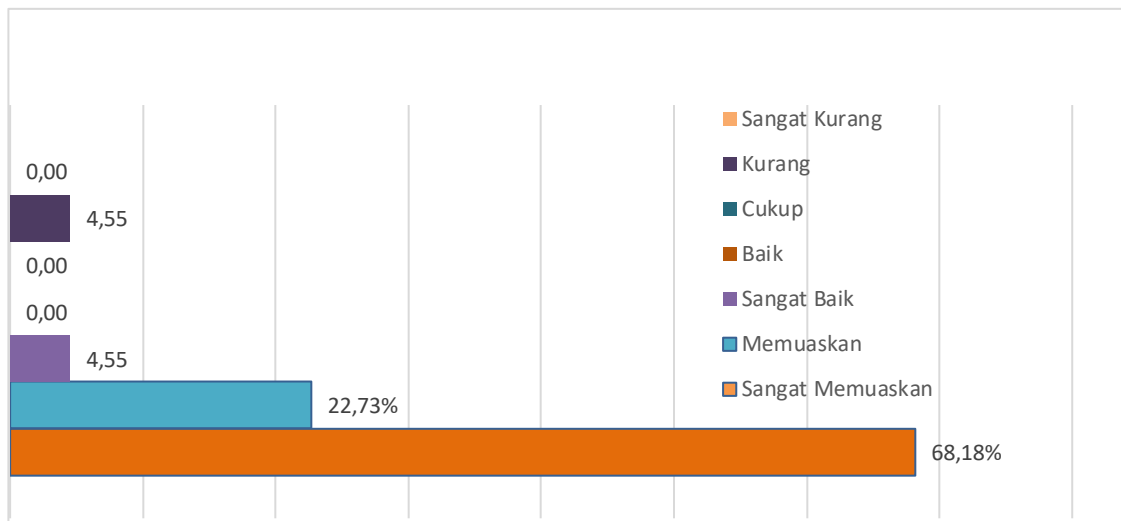
 Indikator Kinerja		 Target	 Realisasi	 % Realisasi
1	Persentase Kemiskinan	5,50%	5,78	95,16
2	Rasio Gini	0,275	0,319	86,21
3	Persentase Masyarakat Miskin Mendapat Bantuan/Jaminan Sosial	47,80 %	99,06	207,24
4	Indeks Desa Membangun	0,8255 (Mandiri) Mandiri : 22 Desa Maju : 8 Desa Berkembang : 0 Desa	- Mandiri : 22 Desa Maju : 8 Desa Berkembang : 0 Desa	100
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,00 %	4,26	46,95
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75	75,82	101,09
7	Harapan Lama Sekolah	13,45 Tahun	13,00	96,65

 Indikator Kinerja		 Target	 Realisasi	 % Realisasi
8	Rata - Rata Lama Sekolah	9,35 Tahun	8,72	93,26
9	Usia Harapan Hidup	74,50 Tahun	74,60	100,13
10	Prevalensi Stunting	10,92 %	12,04	90,70
11	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	87,55 %	87,23	99,63
12	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kepemudaan, Kebudayaan dan Kemasyarakatan	45 %	71	157,78
13	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	63,70 (Baik)	70,36	110,46
14	Indeks SPBE	3 (Baik)	3,28	109,33
15	Rata - Rata Capaian SAKIP Perangkat Daerah	B	BB (70,31)	123,18
16	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	8,50 %	9,46	111,29
17	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,88	85,70	99,79
18	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	10,00 %	6,52	65,20
19	LPE Non Pertambangan dan Penggalian	4,82 %	6,95	144,19
20	Nilai Realisasi PMDN & PMA	Rp 1.053.366.000.000	1.659.150.735.922	157,51
21	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	67 (Cukup)	89,39 (Sangat Baik)	133,42
22	Persentase Penurunan Emisi GRK	24,40 %	-186,36	-763,77
23	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,85	77,76	108,23
24	Indeks Resiko Bencana	120,66	88,54	136,28
25	Persentase Pemenuhan Rumah Layak Huni	65,00 %	65,59	100,91
26	Persentase Jalan Mantap	30,00 %	41,04	139,80
Rata - Rata				78,87

Sementara itu capaian kinerja terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, dimana terdapat 3 tujuan dengan 4 indikator dan 12 sasaran dengan 19 indikator kinerja. Dari 23 indikator kinerja, sebanyak 22 indikator atau 68,18 % dalam kriteria **Sangat Memuaskan**, 5 indikator kinerja atau 22,73 % masuk dalam kriteria **Memuaskan**, 1 indikator kinerja atau 4,55 % masuk dalam kriteria **Sangat Baik**, 1 indikator kinerja atau 4,55 % masuk dalam kriteria **Kurang**, dan 1 indikator kinerja tidak dapat ditampilkan hasil capaiannya. Rata-rata capaian kinerja tahun 2025 terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 diperoleh sebesar 101,00 % atau dalam kaegori **Sangat Memuaskan**.



**Grafik 3.2 Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2025
Terhadap Target Tahun 2025 Pada RPJMD Tahun 2025 - 2029**



**Tujuan
1**

**Penanggulangan Kemiskinan dan
Peningkatan Pemerataan Kesejahteraan**

Indikator Kinerja	Capaian Th. 2024	2025			Target Akhir RPD (2026)	Capaian 2025 Terhadap Target Akhir RPD (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
1.1 Persentase Kemiskinan	6,69 %	5,50	5,78	95,16	6,62	114,53
1.2 Rasio Gini	0,258	0,275	0,319	86,21	0,255	79,94
Rata-rata Capaian Kinerja				90,69		97,24

1.1. Persentase Kemiskinan

Penanganan kemiskinan merupakan salah satu prioritas utama Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara karena kemiskinan dapat berdampak buruk pada kehidupan masyarakat, mulai dari berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup, standar kesehatan, dan standar pendidikan. Selain itu, kemiskinan juga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Angka kemiskinan suatu daerah dapat dilihat dari garis kemiskinannya. Garis kemiskinan merupakan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari selama sebulan. Garis kemiskinan penduduk Penajam Paser Utara tahun 2025 meningkat sebesar Rp 15.508,- dibandingkan tahun 2024 menjadi Rp 633.181,-. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2025 sebesar 9.340 (5,78 persen), sedangkan pada tahun 2024 sebesar 10.780 (6,69 persen). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat penurunan sebanyak 1.440 jiwa atau 0,91 persen penduduk miskin di Kabupaten Penajam Paser Utara dibanding tahun 2024. Target Persentase Penduduk Miskin tahun 2025 sebesar 5,50 % dapat terealisasi 5,78 % sehingga capaian kinerja sebesar 95,16 % dengan kategori capaian kinerja Sangat Memuaskan. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD tahun 2026 Persentase Kemiskinan tahun 2025 sudah mencapai melebihi dengan yang ditargetkan dengan capaian kinerja sebesar 114,53 %.

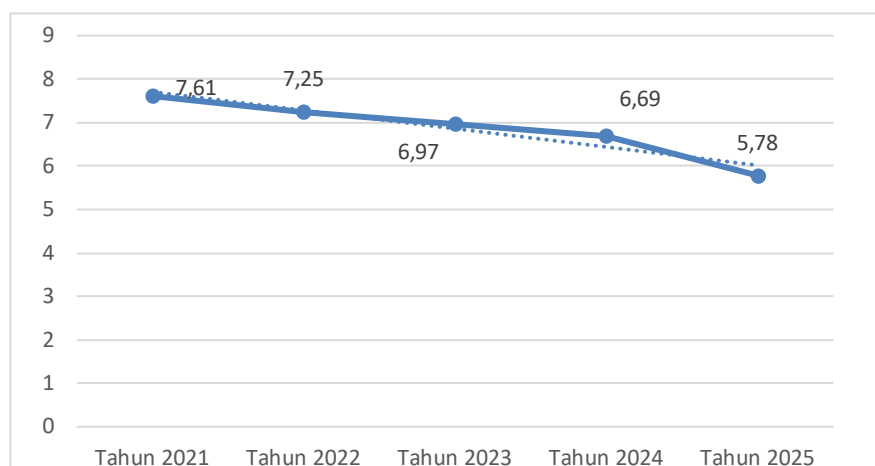


**Tabel 3.4 Persentase Kemiskinan Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2021 - 2025**

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp)	Penduduk Miskin	
		Jumlah	Persentase
2021	513.666	12.130	7,61
2022	538.022	11.590	7,25
2023	583.239	11.190	6,97
2024	617.673	10.780	6,69
2025	633.181	9.340	5,78

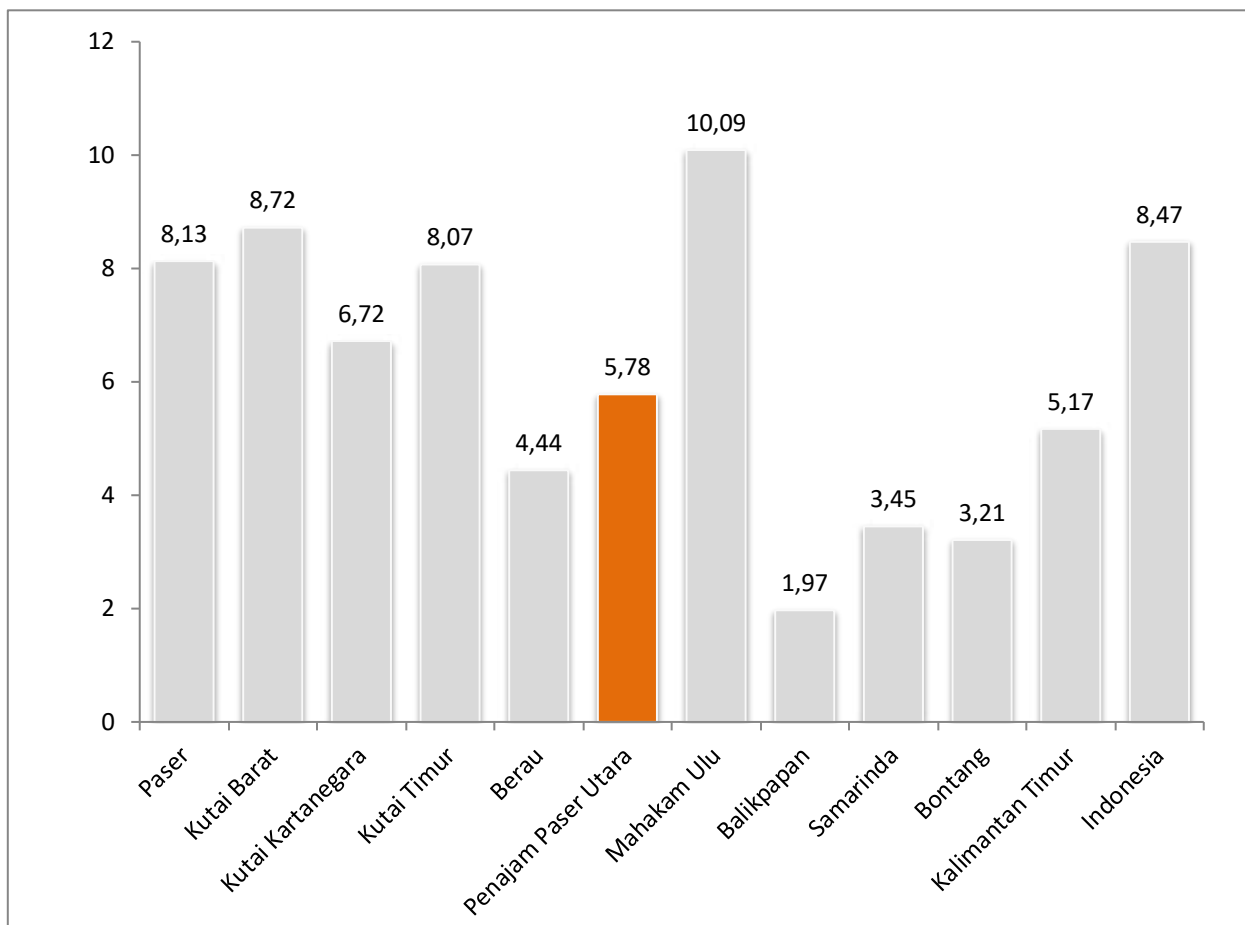
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara, 2026

**Grafik 3.3 Persentase Kemiskinan Penajam Paser Utara
Tahun 2021 - 2025**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara, 2026

**Grafik 3.4 Persentase Kemiskinan Kabupaten/ Kota
Se Kalimantan Timur, Prov. Kalimantan Timur, Nasional Tahun 2025**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur, 2026

Jika dibandingkan dengan Kabupaten/ Kota di tingkat Provinsi Kalimantan Timur, Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Penajam Paser Utara berada pada urutan ke-5 dengan Persentase Kemiskinan terendah dibanding dengan 10 Kabupaten/ Kota di Kalimantan Timur, dan Persentase Kemiskinnannya masih di atas Persentase Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur, serta berada di bawah Persentase Kemiskinan Indonesia.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi persentase kemiskinan, antara lain yaitu:

- Penciptaan wirausaha baru dan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk meningkatkan lapangan pekerjaan;
- Pemberian bantuan pemerintah melalui program perlindungan dan jaminan sosial sosial;
- Menstabilisasi harga;
- Pemberdayaan ekonomi pedesaan melalui peningkatkan program desa mandiri.



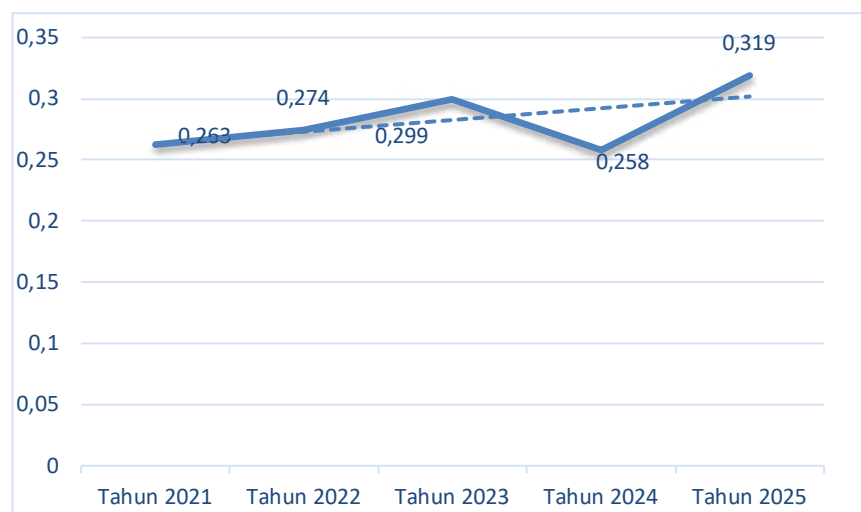
1.2. Rasio Gini

Rasio Gini merupakan salah satu alat untuk mengukur distribusi pendapatan atau kekayaan yang menggambarkan tingkat ketimpangan atau kesenjangan antar wilayah. Semakin tinggi nilai Rasio Gini, maka semakin tinggi pula tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan antar kelompok penduduk.

Rasio Gini Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2025 sebesar 0,319, bertambah 0,044 dari Rasio Gini tahun 2024. Target Rasio Gini 0,275 terealisasi 0,319 dengan capaian kinerja sebesar 86,21 % atau dengan kategori capaian kinerja Memuaskan. Bertambahnya Angka Rasio Gini ini menunjukkan semakin meningkatnya ketimpangan distribusi pendapatan atau kesenjangan ekonomi di Kabupaten Penajam Paser Utara. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD tahun 2026, Rasio Gini tahun 2025 tercapai sebesar 79,94 %.



Grafik 3.5 Rasio Gini Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 - 2025

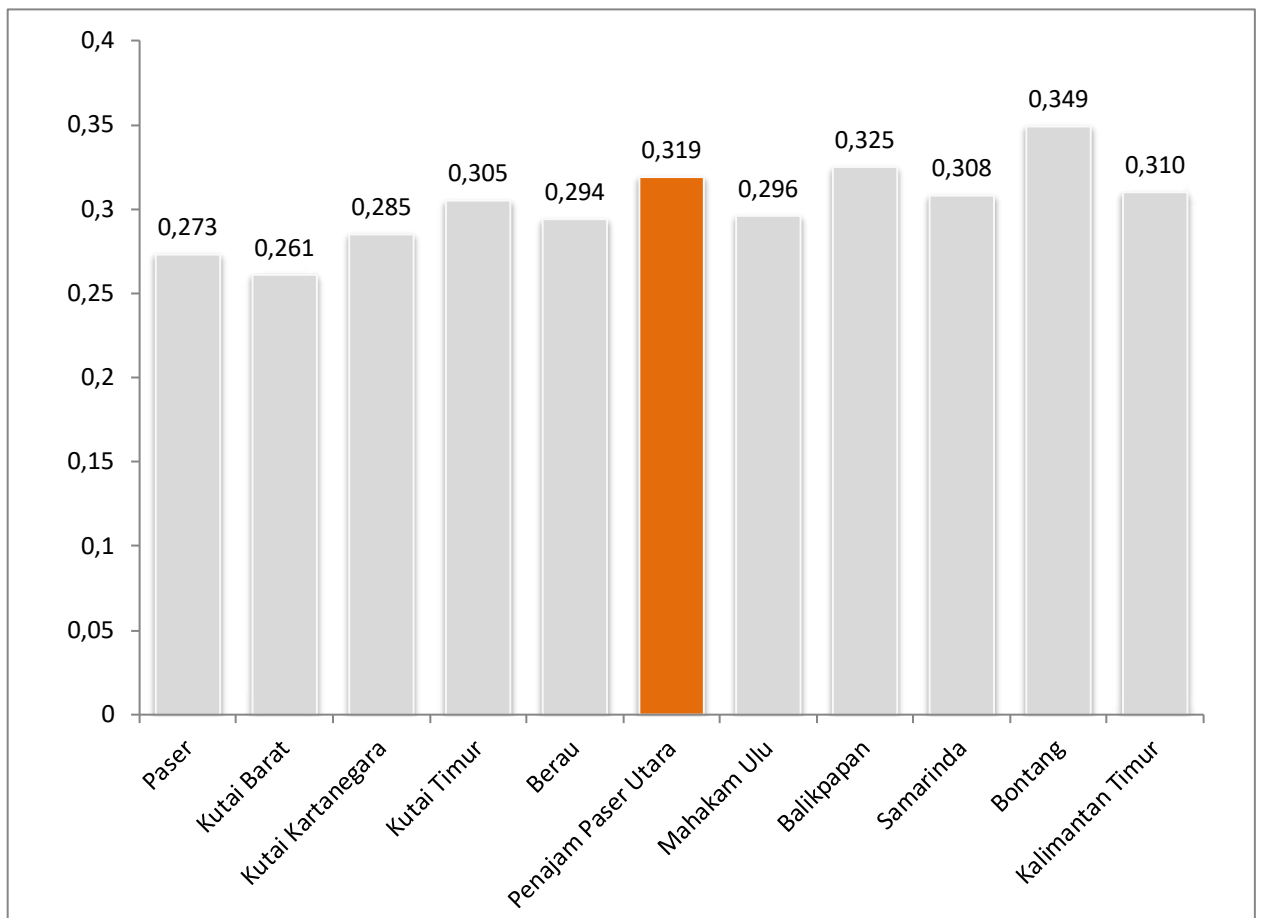


Sumber : Badan Pusat Statistik Penjam Paser Utara, 2026

Rasio Gini Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami nilai yang fluktuatif. Dari beberapa tahun terakhir, Rasio Gini tahun 2025 berada pada angka tertinggi.



**Grafik 3.6 Rasio Gini Kabupaten/ Kota
Se Kalimantan Timur, Prov. Kalimantan Timur Tahun 2025**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur, 2026

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam menurunkan Rasio Gini, antara lain:

1. Mengurangi jumlah penduduk yang hidup dalam garis kemiskinan melalui pemberian program bantuan sosial;
2. Meningkatkan lapangan pekerjaan melalui penciptaan wirausaha baru dan pengembangan UMKM;
3. Meningkatkan keterampilan kerja melalui pelatihan kerja;
4. Pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dan kelurahan.

Adapun strategi ke depan yang dapat dilakukan untuk menurunkan Rasio Gini, antara lain:

1. Peningkatan lapangan kerja;
Mendorong terciptanya wirausaha baru melalui pengembangan dan pemberdayaan UMKM.
2. Peningkatan Sumber Daya Manusia;



Meningkatkan kualitas SDM melalui pemberian akses pendidikan berkualitas dan melakukan pelatihan-pelatihan kerja terutama kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

3. Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;

Mendorong partisipasi masyarakat desa/kelurahan melalui peningkatan desa mandiri yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di desa/ kelurahan.

4. Pemberian Bantuan Sosial kepada masyarakat miskin.

Pemberian bantuan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.

SASARAN 1

Peningkatan Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial Kepada Masyarakat Miskin dan Rentan

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2024	2025			Target Akhir RPD (2026)	Capaian 2024 Terhadap Target Akhir RPD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.1.1	Persentase Masyarakat Miskin Mendapat Bantuan/ Jaminan Sosial	70,19 %	47,80	99,06	207,24	100	99,06
Rata-rata Capaian Kinerja					207,24		99,06

1.1.1. Persentase Masyarakat Miskin Mendapat Bantuan/ Jaminan Sosial

Persentase masyarakat miskin yang mendapat bantuan atau jaminan sosial merupakan salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas kebijakan perlindungan sosial di suatu daerah. Angka ini menunjukkan sejauh mana program-program bantuan pemerintah mampu menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan, serta mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengurangi ketimpangan sosial dan kemiskinan. Bantuan atau jaminan sosial umumnya disalurkan melalui berbagai program, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), jaminan kesehatan, bantuan pendidikan hingga Bantuan Permodalan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program-program tersebut menjadi contoh nyata upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Semakin tinggi persentase masyarakat miskin yang menerima bantuan, semakin

besar pula cakupan perlindungan sosial yang diberikan. Namun demikian, tingginya persentase penerima bantuan belum tentu sepenuhnya mencerminkan ketepatan sasaran. Tantangan seperti validitas data, keterlambatan penyaluran, serta potensi exclusion error (masyarakat miskin yang belum terdata) dan inclusion error (masyarakat yang tidak miskin namun menerima bantuan) masih menjadi pekerjaan rumah. Oleh karena itu, pembaruan data terpadu kesejahteraan sosial dan peningkatan koordinasi antar instansi menjadi langkah penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Selain itu, efektivitas bantuan sosial juga perlu dilihat dari dampaknya terhadap penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup penerima. Bantuan yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan program pemberdayaan ekonomi akan memberikan hasil yang lebih optimal dibandingkan bantuan yang bersifat sementara. Dengan demikian, peningkatan persentase masyarakat miskin yang memperoleh jaminan sosial tidak hanya menjadi angka statistik, tetapi juga menjadi cerminan keberhasilan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan sosial.

Berdasarkan hasil verifikasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan penyaluran bantuan sosial terdata 5.971 KK di dalam Program Keluarga Harapan, seluruhnya telah mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan. Program Bantuan Langsung Tunai diberikan kepada 515 KK yang tergolong dalam keluarga miskin, dimana tidak terdapat penduduk miskin ekstrim di Kabupaten Penajam Paser Utara. Sementara itu sebanyak 9.200 Orang yang mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai. Di samping pemberian BLT, BPNT, dan PKH, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara juga memberikan bantuan usaha untuk keluarga miskin melalui kegiatan pemberian bantuan Usaha Ekonomi Kreatif dan Kelompok Usaha Bersama, upaya rehabilitasi dasar kepada anak yang berhadapan dengan hukum dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan pembinaan mental, yang selanjutnya dilakukan upaya rujukan atau reunifikasi kepada keluarga dengan harapan anak tersebut dapat menjalankan fungsi sosialnya secara normal.

Jika dibandingkan dengan capaian realisasi tahun 2024, realisasi di tahun 2025 mengalami peningkatan. Peningkatan realisasi tersebut selain dikarenakan oleh dukungan anggaran Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, juga dikarenakan adanya perubahan acuan penyaluran bantuan sosial yang semula menggunakan data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), di tahun 2025 sudah menggunakan data dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Dari target yang ditetapkan, Persentase Masyarakat Miskin Mendapat Bantuan/ Jaminan Sosial 47,80% dapat terealisasi 99,06% sehingga capaiannya sebesar 207,24%, dalam kategori kinerja Sangat Baik. Jika dibandingkan dengan



target akhir RPD tahun 2026 capaian kinerja tahun 2025 telah mencapai 99,06%, masih kurang 0,94%.

Upaya yang telah dilakukan dalam peningkatan Persentase Masyarakat Miskin Mendapat Bantuan/ Jaminan Sosial, antara lain:

1. Pemberian bantuan secara rutin berupa Program Keluarga Harapan, Bantuan Langsung Tunai, dan Bantuan Pangan Non Tunai;
2. Perluasan pemberian bantuan seperti bantuan permodalan usaha untuk masyarakat miskin melalui kegiatan Usaha Ekonomi Produktif dan Kelompok Usaha Bersama;
3. Pemberian bantuan upaya rehabilitasi kepada anak yang berhadapan dengan hukum untuk memenuhi kebutuhan dasar dan pembinaan mental selanjutnya dilakukan reunifikasi kepada keluarga sehingga anak dapat menjalankan fungsi social secara normal;
4. Pemberian jaminan sosial kepada masyarakat miskin absolut, kepada penyandang disabilitas atau orang yang secara fisik sudah tidak berdaya.



Pelatihan Digitalisasi UMKM Dengan Tema "Ngelive Yuk"!

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis Peningkatan Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial Kepada Masyarakat Miskin dan Rentan dengan pagu anggaran Rp 28.281.668.445,00, terealisasi Rp 25.190.393.220,00 sehingga capaian realisasi anggaran 89,07%. Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis ini sebesar 207,24%, maka efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar 57,02%. Jika rasio efisien -20 % sampai 20 %, maka penggunaan anggaran sasaran strategis ini berada dalam kategori tidak efisien sehingga dibutuhkan evaluasi dalam menentukan target di dalam perencanaan.



**Tabel 3.5 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis
Peningkatan Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial Kepada
Masyarakat Miskin dan Rentan**

Sasaran Strategis/ Indikator/ Program		Pagu	Realisasi	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	% Efisiensi
Peningkatan Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial Kepada Masyarakat Miskin dan Rentan		28.281.668.445,00	25.190.393.220,00	89,07	207,24	57,02
Persentase Masyarakat Miskin Mendapat Bantuan/ Jaminan Sosial						
1	Program Rehabilitasi Sosial	1.442.587.369,00	902.949.907,00			
2	Program Pemberdayaan Sosial	676.289.422,00	666.564.760,00			
3	Program perlindungan dan jaminan sosial	2.481.732.532,00	2.422.867.170,00			
4	Program Penanganan Bencana	303.024.320,00	82.243.699,00			
5	Program Penanganan Kerawanan Pangan	561.919.582,00	484.824.428,00			
6	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	22.816.115.220,00	20.630.943.256,00			

SASARAN 2

Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2024	2025			Target Akhir RPD (2026)	Capaian 2025 Terhadap Target Akhir RPD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.2.1	Indeks Desa Membangun	0,8205 (Mandiri) Mandiri = 21 Maju = 9	0,8255 (Mandiri) Mandiri = 22 Maju = 8	- Mandiri = 22 Maju = 8	100	0,8205 (Mandiri) Mandiri = 25 Maju = 5	-
Rata-rata Capaian Kinerja					100		-

1.2.1. Indeks Desa Membangun

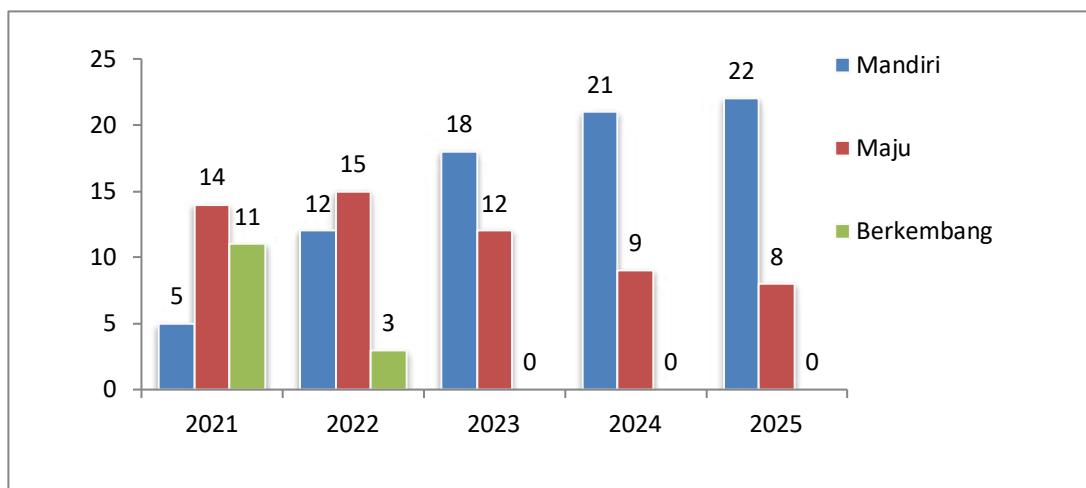
Indeks Desa Membangun (IDM) telah bertransformasi menjadi Indeks Desa (ID) untuk meningkatkan akurasi, inklusivitas, dan kesesuaian data dalam mengukur kemajuan desa. Transformasi ini mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa, dimana perubahan ini memperluas dimensi dari tiga menjadi enam (layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan desa) untuk pengukuran yang lebih komprehensif dan operasional.

Dalam perkembangan pemerintahan desa di Kabupaten Penajam Paser Utara setiap tahunnya menunjukkan perkembangan yang positif. Dari 30 desa dari jumlah seluruh desa yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara, hingga Tahun 2025 terdapat 22 Desa Mandiri dan 8 Desa Maju. Terjadi peningkatan status 1 desa berkembang menjadi desa mandiri di tahun 2025. Sejak tahun 2023 desa berkembang sudah tidak ada, mengalami peningkatan status menjadi desa maju. Nilai Indeks Desa 81,38% dengan klasifikasi status 'Mandiri' yang berarti desa telah mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah sangat baik. Pencapaian ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara agar lebih mandiri dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran desa.



**Grafik 3.7 Status Desa Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2021 - 2025**



Capaian kinerja IDM tidak dapat diukur karena IDM sudah bertransformasi menjadi Indeks Desa sebagaimana diuraikan di atas, namun jika melihat target 22 desa mandiri sudah tercapai 100 % sesuai yang ditargetkan. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD sampai dengan tahun 2025 belum tercapai seperti yang ditargetkan 25 desa, masih perlu peningkatan status desa dari Desa Maju ke Desa Mandiri.



Keberhasilan indikator kinerja ini didukung oleh beberapa hal, yaitu:

- a. Kolaborasi yang baik antara pemerintah desa sebagai pelaksana dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) sebagai pembina;
- b. Peningkatan layanan tenaga kesehatan di Desa;
- c. Pemberdayaan Lembaga Ekonomi UMKM;
- d. Tersedianya pengolahan sampah di desa;
- e. Peningkatan kesiapsiagaan mitigasi bencana;
- f. Pembinaan secara terus menerus yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta pendampingan P3MD.

Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat, yaitu:

1. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat;
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
3. Program Peningkatan Kerja Sama Desa;
4. Program Administrasi Pemerintahan Desa;
5. Program Penataan Desa;
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.



Lomba Desa Sebagai Ajang
Pembuktian Kemajuan Desa

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dengan pagu anggaran Rp 3.600.809.891,20, terealisasi Rp 3.070.435.386,00 sehingga capaian realisasi anggaran 85,27%. Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis ini sebesar 100%, maka efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar 14,73 %. Jika rasio efisien -20 % sampai 20 %, maka penggunaan anggaran sasaran strategis ini berada dalam kategori efisien.



**Tabel 3.6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat**

Sasaran Strategis/ Indikator/ Program		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	% Efisiensi
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat		3.600.809.891,20	3.070.435.386,00	85,27	100	14,73
Indeks Desa Membangun						
1	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1.788.430.191,20	1.554.551.173,00			
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	53.440.190,00	60.727.425,00			
3	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	116.380.000,00	113.180.000,00			
4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	1.299.651.050,00	1.240.098.549,00			
5	Program Penataan Desa	271.990.245,00	36.658.356,00			
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	70.918.215,00	65.219.883,00			

SASARAN 3

Perluasan Kesempatan Kerja serta Peningkatan Kapasitas dan Perlindungan Tenaga Kerja

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2024	2025			Target Akhir RPD (2026)	Capaian 2025 Terhadap Target Akhir RPD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.3.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,05 %	2,00	4,26	46,95	1,95	45,77
Rata-rata Capaian Kinerja					46,95		45,77

1.3.1. Tingkat Pengangguran Terbuka

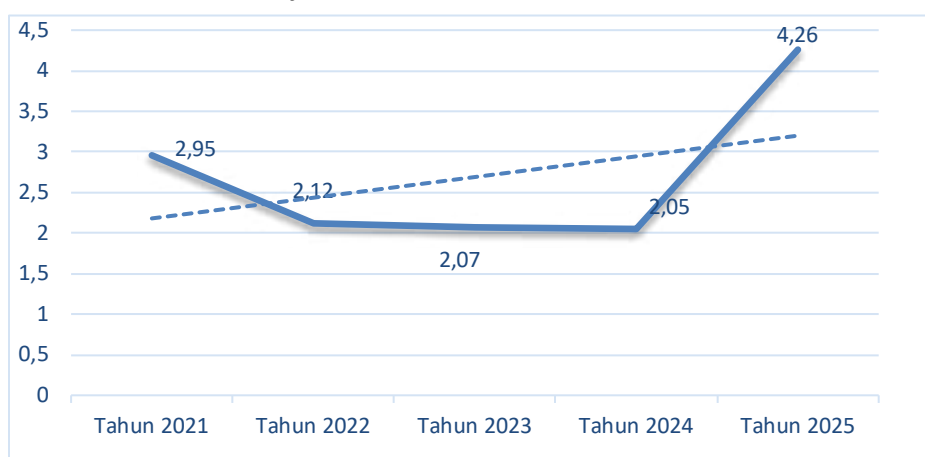
Pengangguran dapat disebabkan oleh minimnya kualitas, baik dari sisi pendidikan maupun keterampilan kelompok angkatan kerja, serta masalah ketenagakerjaan yang dapat memicu pengangguran. Pengangguran sering kali menjadi masalah dalam perekonomian, karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja, yang mengindikasikan persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Dari jumlah tersebut diperoleh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tahun 2025 sebesar 72,2 persen, berkurang 0,90 poin dibanding tahun 2024.

Jumlah Angkatan kerja di Penajam Paser Utara pada Tahun 2025 sebanyak 119.152, yang bekerja sebanyak 114.079 orang, dan sebanyak 5.073 orang pengangguran. Terjadi penurunan jumlah angkatan kerja sebanyak 41.253 orang jika dibandingkan Tahun 2024. Jumlah penduduk bekerja mengalami penurunan sebanyak 43.033 orang dan jumlah pengangguran bertambah sebanyak 1.780 orang.

**Grafik 3.8 Tingkat Pengangguran Terbuka
Penajam Paser Utara Tahun 2021 - 2025**

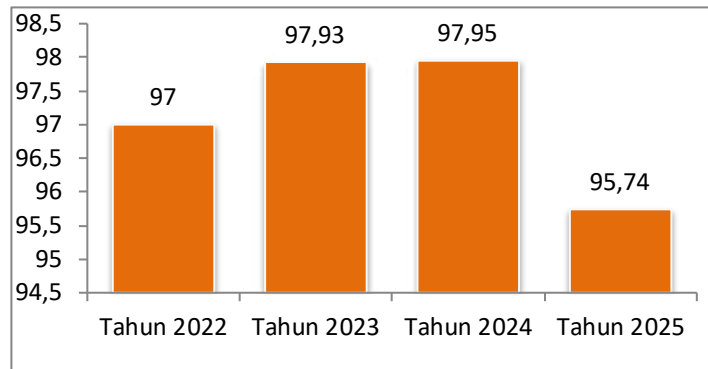


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara, 2026

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2025 ditargetkan 2,00 % terealisasi 4,26 %, tercapai 46,95 % dengan kategori capaian kinerja Kurang. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, Tingkat Pengangguran Terbuka di Penajam Paser Utara meningkat sebesar 2,21, artinya terjadi penurunan kinerja dalam hal program penanganan ketenagakerjaan atau menggambarkan bahwa tingkat kesempatan kerja mengalami penurunan. Tahun 2025 jika dibandingkan dengan target akhir RPD masih kurang sebesar 2,31 poin, dimana tercapai 45,77 %.



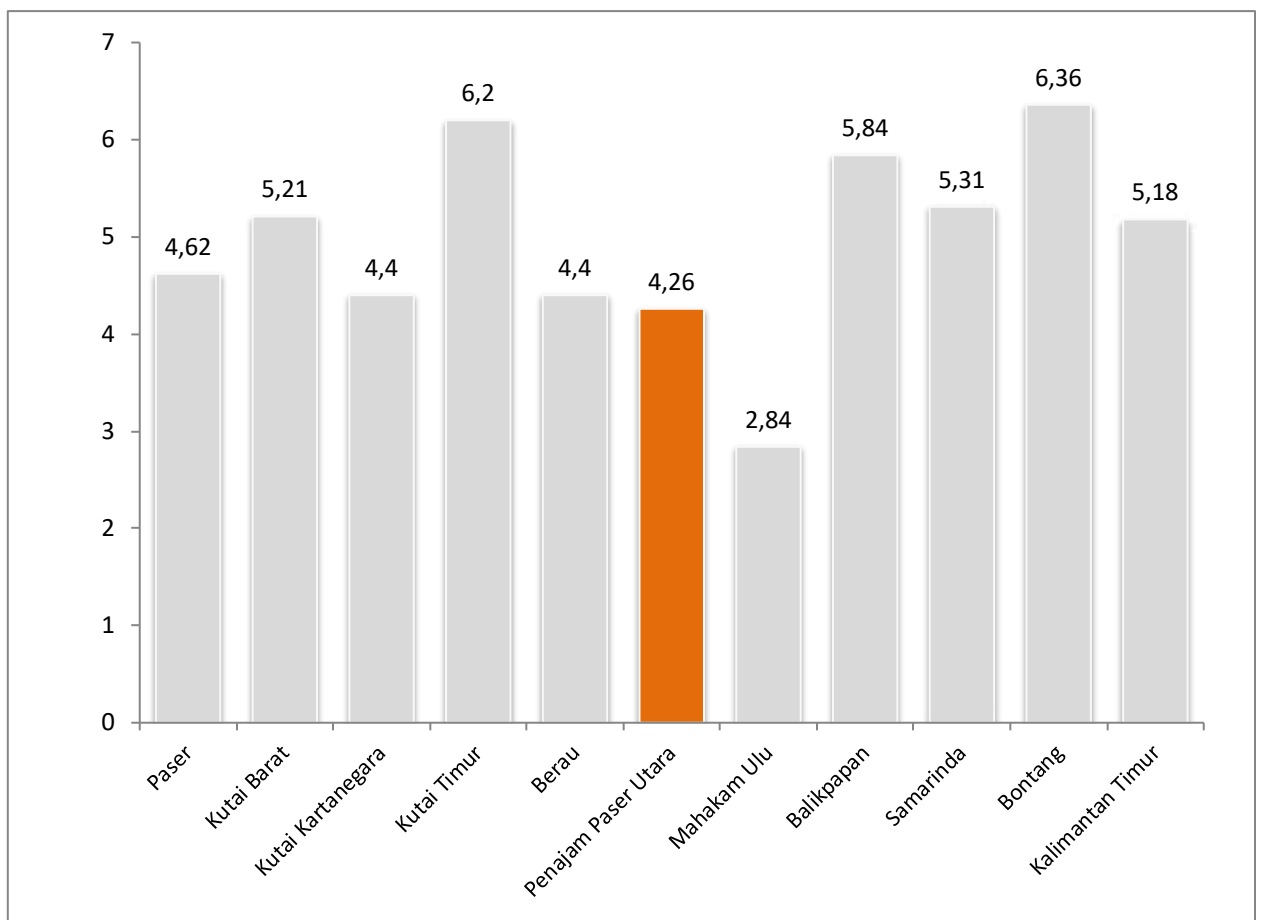
**Grafik 3.9 Tingkat Kesempatan Kerja
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022 - 2025**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara, 2026

Tingkat Pengangguran Terbuka salah satunya dipengaruhi oleh besaran Tingkat Kesempatan Kerja. Tingkat Kesempatan Kerja Kabupaten Penajam Paser Utara di tahun 2025 mengalami penurunan, sehingga menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran terbuka. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Penajam Paser Utara pada Tahun 2025 sebesar 4,26 persen, terendah kedua setelah Kabupaten Mahakam Ulu jika dibandingkan dengan kabupaten/kota se-Kalimantan Timur.

**Grafik 3.10 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/ Kota
Se Kalimantan Timur, Prov. Kalimantan Timur Tahun 2025**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur, 2026

Dalam rangka penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah melakukan beberapa upaya, antara lain sebagai berikut:

a. Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Digital

Pengembangan ekonomi kreatif dan digital melalui pelatihan digital untuk mempermudah dan memperluas pemasaran produk, serta mendukung startup dan memacu pertumbuhan industri kreatif.

b. Peningkatan Investasi

Investasi juga menunjukkan peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Investasi dapat membuka lapangan kerja baru sehingga mampu menyerap tenaga kerja.

c. Pemberdayaan dan Pengembangan Industri

Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) dapat menciptakan kesempatan kerja baru dan menyerap tenaga kerja.

d. Peningkatan Keahlian dan Keterampilan

Pelaksanaan program pelatihan dan produktivitas tenaga kerja untuk menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan siap kerja dapat menekan Tingkat pengangguran. Jenis pelatihan yang diberikan menyesuaikan dengan tuntutan pasar tenaga kerja.

e. Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online;

Informasi pasar kerja online dapat mempermudah para pencari kerja untuk mencari informasi lowongan kerja secara cepat dan beragam.

f. Job fair/ bursa kerja;

Melalui kegiatan Job fair/ bursa kerja, pencari kerja dapat secara langsung bertemu dengan Perusahaan, sehingga mempermudah pencari kerja mendapatkan pekerjaan.

g. Memperkuat program hubungan industrial dan program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan;

Dengan melakukan pengesahan kebijakan terkait perusahaan dan melakukan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan mogok kerja melalui mediasi.

h. Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur melalui peningkatan konektivitas, infrastruktur dasar dan infrastruktur digitalisasi.



Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis Pengurangan Angka Pengangguran, yaitu :

1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
2. Program Penempatan Tenaga Kerja;
3. Program Hubungan Industrial;
4. Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM);
6. Program Pengembangan UMKM.



Pelatihan dan Sertifikasi K3 Konstruksi dan Bangunan

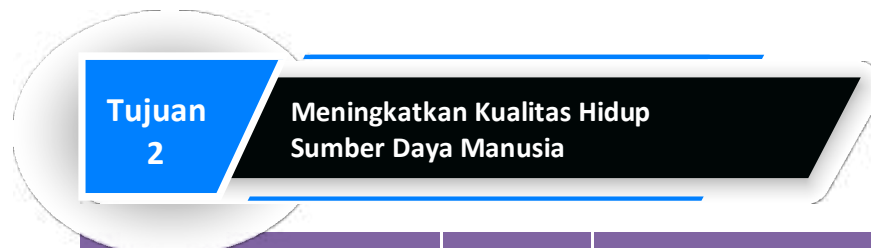
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis Perluasan Kesempatan Kerja serta Peningkatan Kapasitas dan Perlindungan Tenaga Kerja dengan pagu anggaran Rp 8.689.088.789,00, terealisasi Rp 8.325.208.888,00 sehingga capaian realisasi anggaran 95,81%. Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis ini sebesar 46,95 %, maka efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar -104,7 %. Jika rasio efisien -20 % sampai 20 %, maka penggunaan anggaran sasaran strategis ini berada dalam kategori tidak efisien sehingga dibutuhkan evaluasi dalam penggunaan anggaran agar berbasis kinerja.



**Tabel 3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis Perluasan
Kesempatan Kerja serta Peningkatan Kapasitas dan Perlindungan Tenaga Kerja**

Sasaran Strategis/ Indikator/ Program		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	% Efisiensi
Perluasan Kesempatan Kerja serta Peningkatan Kapasitas dan Perlindungan Tenaga Kerja		8.689.088.789,00	8.325.208.888,00	95,81	46,95	-104,7
Tingkat Penganguran Terbuka						
1	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	3.070.744.494,00	2.941.680.510,00			
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	306.326.572,00	302.853.874,00			
3	Program Hubungan Industrial	3.748.042.859,00	3.598.176.135,00			
4	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	649.869.272,00	607.458.383,00			
5	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	622.913.844,00	611.566.004,00			
6	Program Pengembangan UMKM	291.191.748,00	263.473.982,00			



No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2024	2025			Target Akhir RPD (2026)	Capaian 2025 Terhadap Target Akhir RPD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
2.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,94	75	75,82	101,09	75	101,09
Rata-rata Capaian Kinerja					101,09		101,09

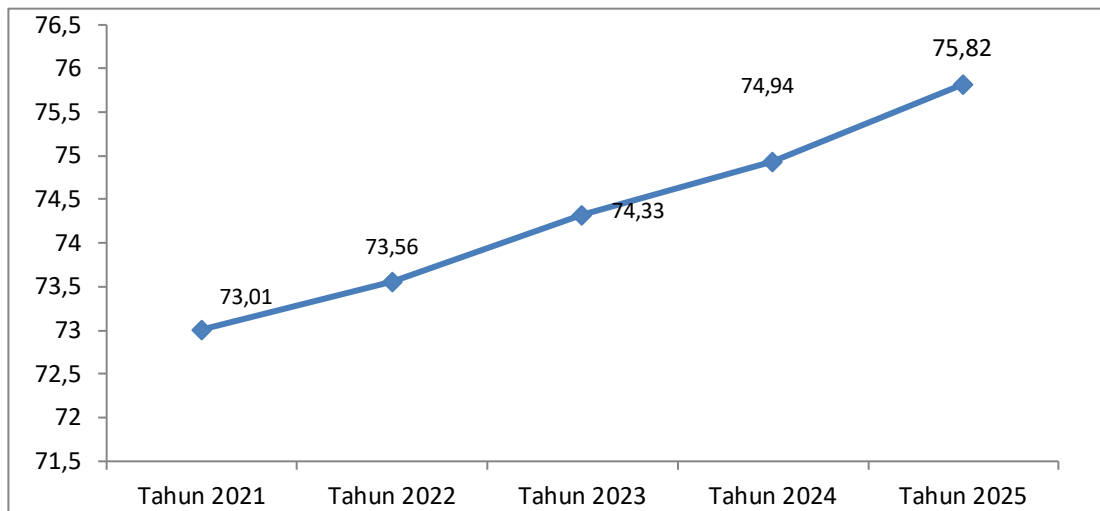
2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia di suatu daerah. Pembangunan manusia bertujuan untuk menghasilkan manusia yang cerdas, sehat, dan produktif, yang dapat dilihat melalui kondisi pendidikan, kesehatan, perekonomian. Perkembangan kondisi ini dapat dilihat melalui indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menjadi indikator penting untuk



mengukur kualitas hidup dengan memperhitungkan tiga dimensi dasar, yaitu: kesehatan, pendidikan, dan daya beli.

**Grafik 3.11 Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 - 2025**



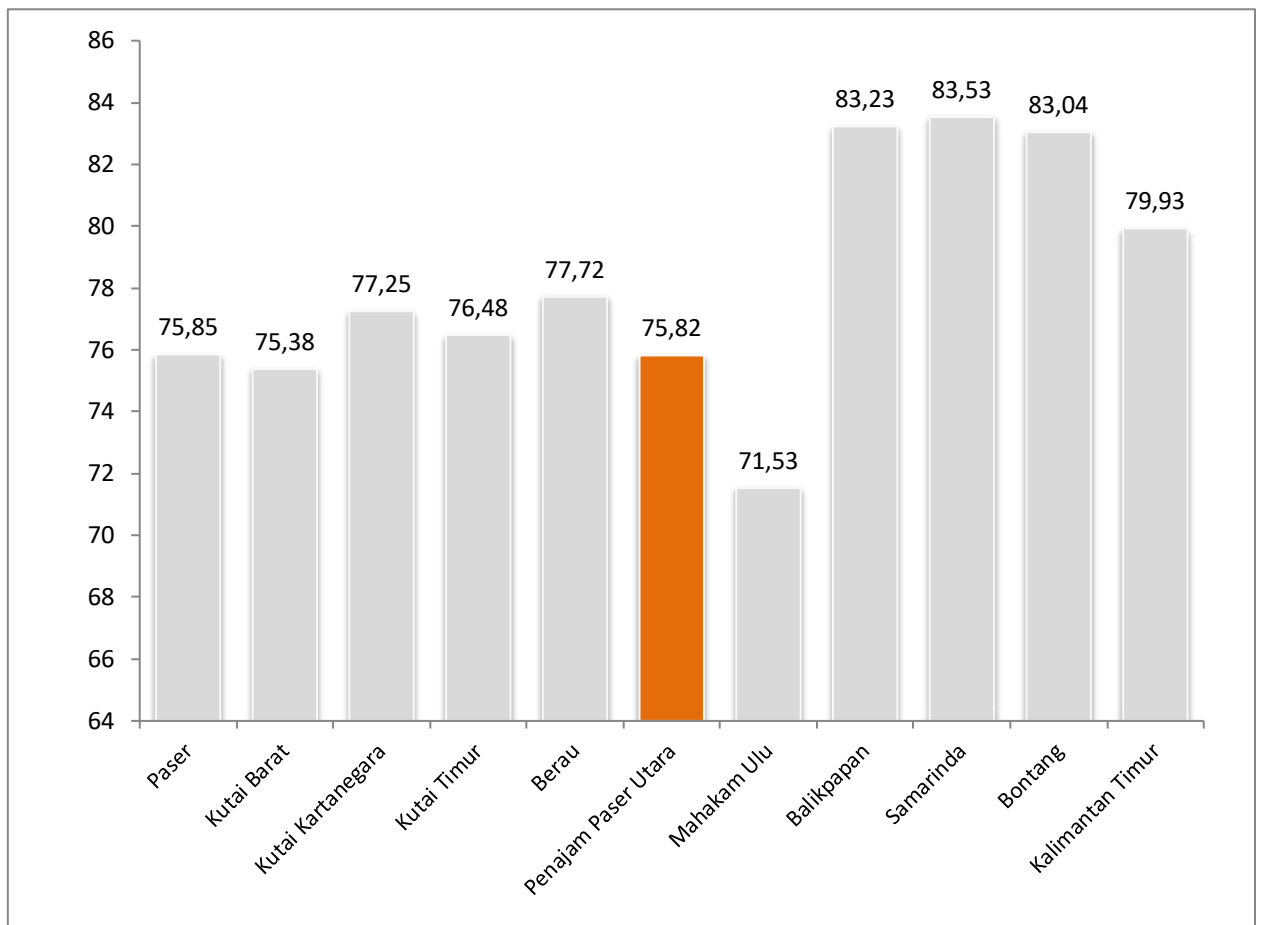
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara, 2026

IPM Kabupaten Penajam Paser Utara mencapai melebihi dari yang ditargetkan di tahun 2025, dengan capaian kinerja 101,09 dengan kategori capaian Sangat Memuaskan. Di tahun 2025 Capaian IPM ini meningkat sebesar 0,88 poin dari tahun 2024, meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD tahun 2026 IPM tahun 2025 sudah melebihi dari yang ditargetkan dengan capaian kinerja 101,09 %.



IPM tahun 2025 sebesar 75,82 mengindikasikan bahwa pembangunan manusia di Kabupaten Penajam Paser Utara tergolong baik, atau kualitas hidup penduduk berada dalam kategori tinggi. Angka ini menandakan keberhasilan pembangunan manusia yang cukup baik, ditopang oleh peningkatan taraf kesehatan, tingkat pendidikan, dan standar hidup layak. Namun demikian, capaian tersebut masih berada di bawah capaian IPM Nasional maupun Provinsi Kalimantan Timur, dan berada pada urutan terendah ketiga dari 10 Kabupaten/ Kota di Kalimantan Timur.

Grafik 3.12 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/ Kota se Kalimantan Timur, Prov. Kalimantan Timur Tahun 2025



Sumber : Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur, 2026

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) didukung oleh empat sasaran strategis, yaitu Sasaran Strategis Peningkatan Kualitas Pendidikan, Sasaran Strategis Peningkatan Kualitas Kesehatan, Sasaran Strategis Peningkatan Kualitas Kehidupan Keluarga Sejahtera dan Responsif Gender, dan Sasaran Strategis Peningkatan Kualitas Pembangunan Kebudayaan dan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Kepemudaan yang Berwawasan Kebangsaan.



SASARAN 4

Peningkatan Kualitas Pendidikan

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2024	2025			Target Akhir RPD (2026)	Capaian 2025 Terhadap Target Akhir RPD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
2.4.1	Harapan Lama Sekolah	12,87 Tahun	13,45	13,00	96,65	13,85	93,86
2.4.2	Rata – rata Lama Sekolah	8,57 Tahun	9,35	8,72	93,26	9,85	88,53
Rata-rata Capaian Kinerja					94,96		91,20

Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan daerah karena peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan bagian penting dari proses pembangunan berkelanjutan yang bermanfaat bagi kemajuan suatu daerah. Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam dimensi pendidikan suatu daerah.

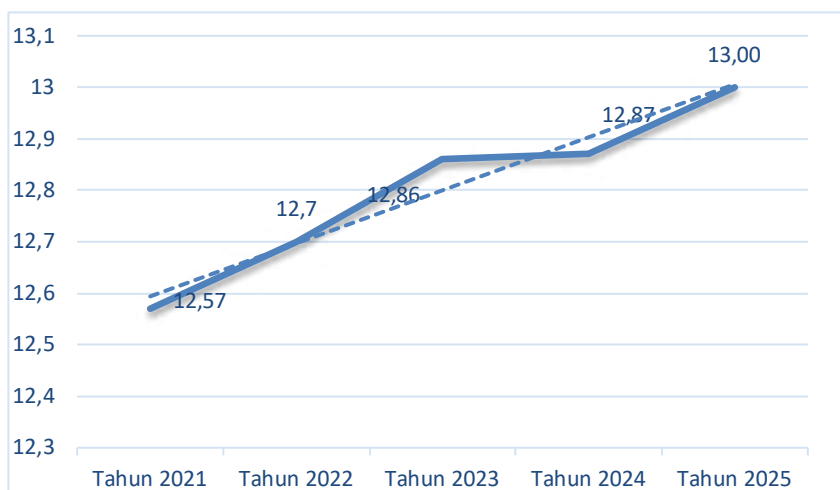
2.4.1. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka Harapan Lama Sekolah didapatkan dengan menghitung rata-rata jumlah penduduk yang bersekolah pada rentang umur tertentu dibagi dengan jumlah penduduk pada rentang umur tertentu.

Pada tahun 2025, Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Penajam Paser Utara mencapai 13,00 tahun dari target yang ditetapkan 13,45 tahun dengan capaian kinerja Tahun 2025 sebesar 96,65 persen. Angka Harapan Lama Sekolah 13,00 artinya secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2025 memiliki kesempatan untuk bersekolah selama 13,00 tahun atau setidaknya hingga Diploma I. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Penajam Paser Utara terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Di tahun 2025 terjadi peningkatan 0,13 tahun dibandingkan dengan tahun 2024. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD tahun 2026 Harapan Lama Sekolah tahun 2025 masih kurang 0,85 tahun dengan capaian 93,86 %.



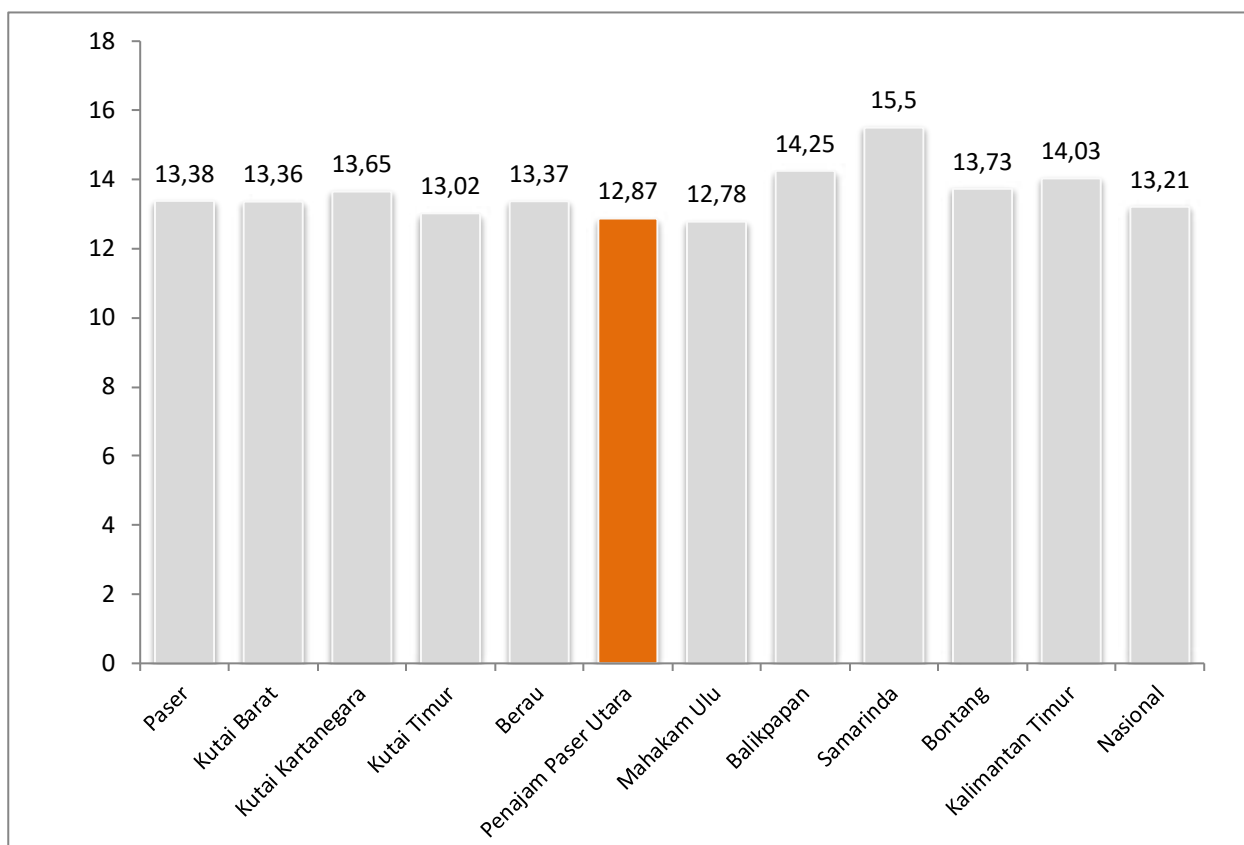
**Grafik 3.13 Harapan Lama Sekolah
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 - 2025**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara, 2026

Angka Harapan Lama Sekolah tahun 2025 di Kabupaten Penajam Paser Utara masih lebih rendah dibandingkan dengan Angka Harapan Lama Sekolah pada Provinsi Kalimantan Timur dan Angka Harapan Lama Sekolah Indonesia, serta masih berada pada urutan kedua terendah dari 10 kabupaten/ kota se Kalimantan Timur. Angka Harapan Lama Sekolah Indonesia tahun 2025 sebesar 13,30 tahun dan Provinsi Kalimantan Timur sebesar 14,04 tahun.

Grafik 3.14 Harapan Lama Sekolah Kabupaten/ Kota se Kalimantan Timur, Prov. Kalimantan Timur, Nasional Tahun 2025



Sumber : Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur, 2026

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara terus berupaya meningkatkan Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Penajam Paser Utara melalui sosialisasi pendidikan dari tingkat PAUD, memberikan bantuan peralatan pendukung sekolah bagi siswa, bea siswa bagi siswa berprestasi, meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana jenjang SD dan SMP, meningkatkan kualitas pengajar.

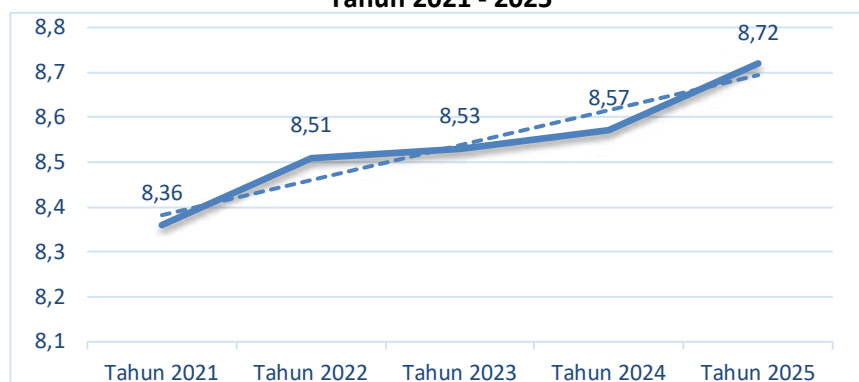
2.4.2. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal, dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Dalam perhitungan rata-rata lama sekolah, penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.

Rata-rata lama sekolah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2025, Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Penajam Paser Utara mencapai 8,72 tahun masih kurang dari target yang diperjanjikan 9,35 tahun, dengan capaian kinerja Tahun 2025 sebesar 93,26 %. Jika dibandingkan dengan Rata-rata Lama Sekolah tahun 2024, pada tahun 2025 mengalami peningkatan 0,15 tahun. Rata-rata Lama Sekolah 8,72 artinya pada tahun 2025 rata-rata penduduk Penajam Paser Utara yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh Pendidikan selama 8,72 tahun atau hampir menamatkan kelas IX (kelas 3 SMP). Peningkatan ini tidak terlepas dari adanya program-program penunjang pendidikan yang diberikan oleh pemerintah, seperti Program Beasiswa Seribu Sarjana, Reguler Berprestasi untuk pelajar dan mahasiswa, Tahfiz Qur'an. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD tahun 2026 Rata-rata Lama Sekolah tahun 2025 masih kurang 1,13 tahun dan telah tercapai 88,53 %.



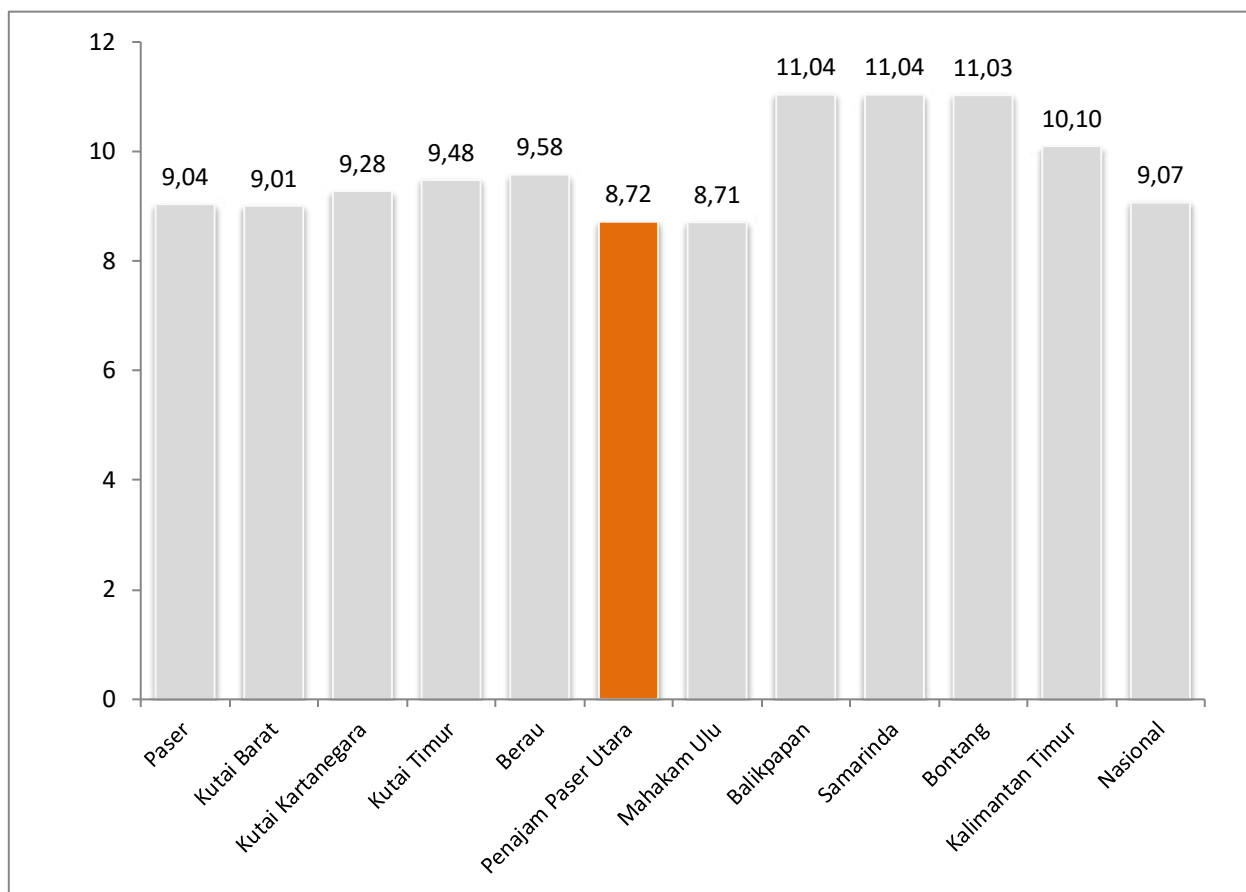
**Grafik 3.15 Rata-rata Lama Sekolah Penajam Paser Utara
Tahun 2021 - 2025**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara, 2026

Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Penajam Paser Utara masih lebih rendah dibandingkan dengan Rata-Rata Lama Sekolah di Indonesia (9,07 tahun) dan Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Timur (10,10 tahun), serta berada pada urutan kedua terendah dari 10 kabupaten/ kota se Kalimantan Timur.

Grafik 3.16 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/ Kota se Kalimantan Timur, Prov. Kalimantan Timur, Nasional Tahun 2025



Sumber : Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur, 2026

Adapun kendala yang ada dalam peningkatan rata-rata lama sekolah, antara lain masih kurangnya aksesibilitas pendidikan.

Strategi ke depan yang dapat dilakukan dalam peningkatan Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah, antara lain:

1. Peningkatan kualitas pendidik

Peningkatan pada kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan bimbingan teknis bagi tenaga pengajar salah satunya melalui *In House Training* yang diselenggarakan di setiap sekolah.

2. Peningkatan kualitas pembelajaran



Memanfaatkan dengan maksimal penggunaan Platform Merdeka Mengajar (PMM) yang merupakan platform edukasi. Peningkatan kemampuan literasi dan numerasi siswa juga tidak kalah penting mengingat ini merupakan pondasi utama dalam hal pemahaman pembelajaran.

3. Peningkatan aksesibilitas Pendidikan

Peningkatan sarana dan prasarana seperti ketersediaan ruang kelas, ruang praktikum, serta peralatan pembelajaran. Memberikan kemudahan akses kepada masyarakat untuk mengikuti Pendidikan sehingga tidak ada lagi anak yang tidak bersekolah.

Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis Peningkatan Kualitas Pendidikan, yaitu :

1. Program Pengelolaan Pendidikan;
2. Program Pengembangan Kurikulum;
3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan.



Penyaluran Kartu Penajam Cerdas

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis Peningkatan Kualitas Pendidikan dengan pagu anggaran Rp 73.740.179.721,64, terealisasi Rp 69.990.928.120,57 sehingga capaian realisasi anggaran 94,92 %. Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis ini sebesar 94,96 %, maka efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar 0,05 %. Jika rasio efisien -20 % sampai 20 %, maka penggunaan anggaran sasaran strategis ini berada dalam kategori efisien.



**Tabel 3.8 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis
Peningkatan Kualitas Pendidikan**

Sasaran Strategis/ Indikator/ Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	% Efisiensi
Peningkatan Kualitas Pendidikan	73.740.179.721,64	69.990.928.120,57	94,92	94,96	0,05
Harapan Lama Sekolah					
Rata-rata Lama Sekolah					
1 Program Pengelolaan Pendidikan	73.573.842.481,64	69.989.058.120,57			
2 Program Pengembangan Kurikulum	145.152.000,00	-			
3 Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	21.185.240,00	1.870.000,00			

SASARAN 5

Peningkatan Kualitas Kesehatan

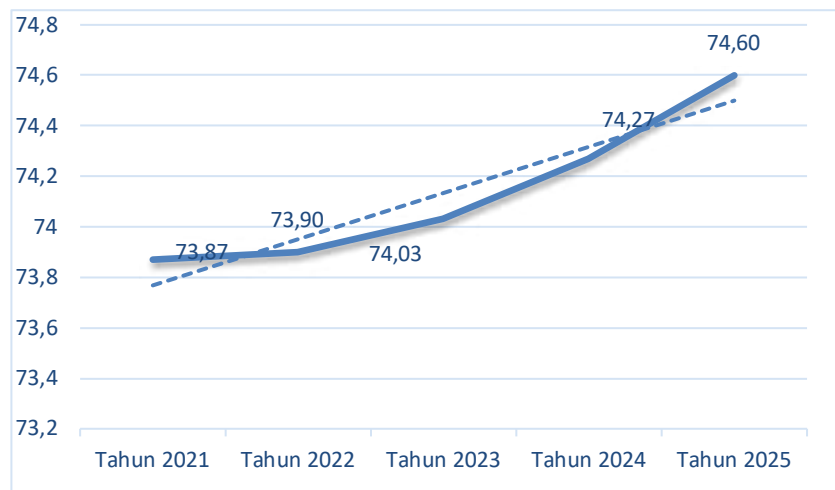
No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2024	2025			Target Akhir RPD (2026)	Capaian 2025 Terhadap Target Akhir RPD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
2.5.1	Usia Harapan Hidup	74,27 Tahun	74,50	74,60	100,13	74,50	100,13
2.5.2	Prevalensi Stunting	11,55	10,92	12,04	90,70	10,05	83,47
Rata-rata Capaian Kinerja					95,42		91,80

Salah satu komponen pembentuk IPM lainnya selain sektor pendidikan yaitu sektor Kesehatan. Indeks Kesehatan diukur dari Usia Harapan Hidup (UHH). Indeks Kesehatan juga dapat diukur dari indikator Prevalensi Stunting.

2.5.1. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang. UHH menjadi suatu indikator derajat kesehatan yang digunakan sebagai acuan dalam perencanaan program-program kesehatan. Faktor yang mempengaruhi Angka Harapan Hidup yaitu : faktor sosial, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.

**Grafik 3.17 Angka Harapan Hidup
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 - 2025**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara, 2026

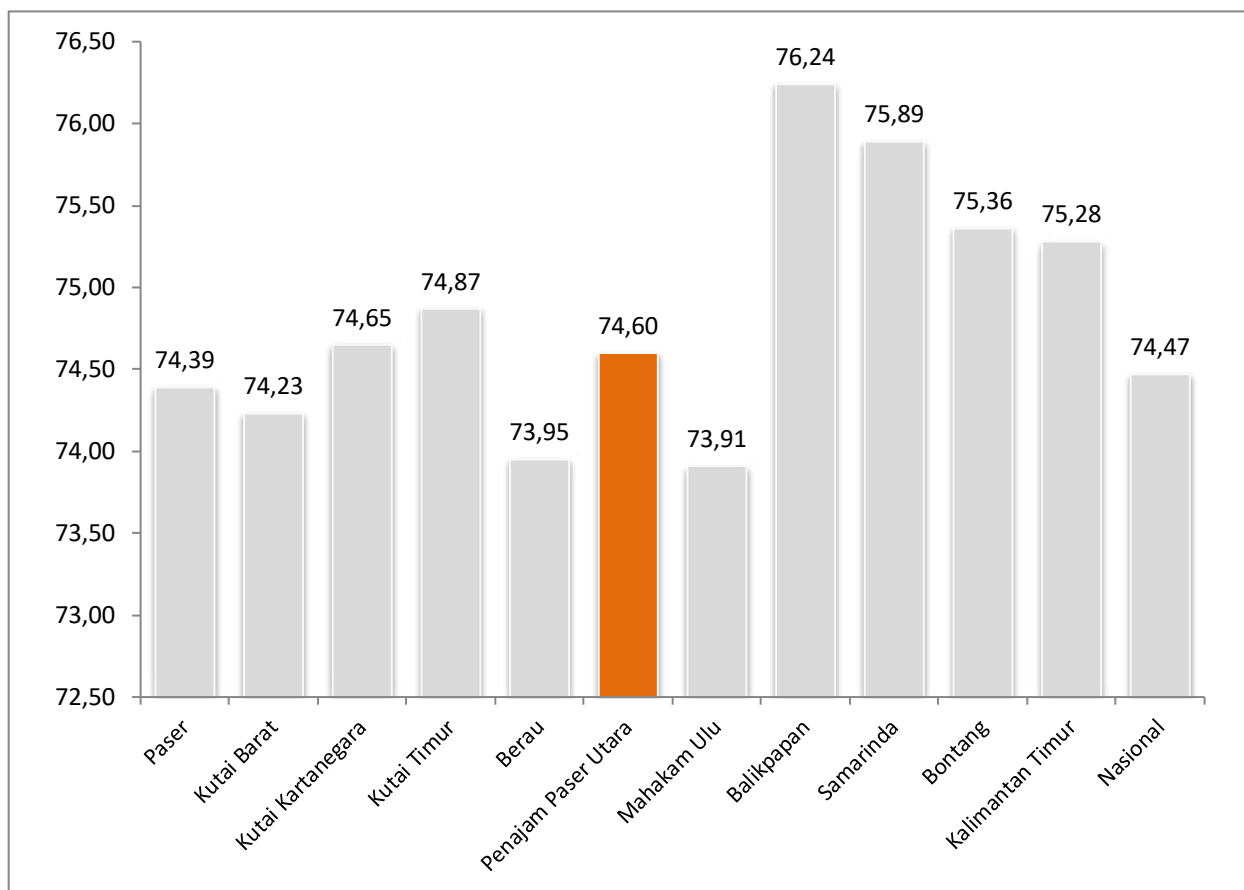
Usia Harapan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2025 sebesar 74,60 tahun, mengalami kenaikan 0,33 tahun dari tahun 2024. Interpretasinya dari angka harapan hidup ini adalah seorang bayi yang dilahirkan di Kabupaten Penajam Paser Utara pada Tahun 2025 mempunyai harapan untuk hidup selama 74,60 tahun ke depan atau rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh seseorang akan mencapai umur 74,60 tahun pada tahun ke depan. Usia Harapan Hidup di Kabupaten Penajam Paser Utara selalu meningkat dari tahun ke tahun. Dari target yang ditetapkan sebesar 74,50 tahun, Angka Harapan Hidup pada tahun 2025 sebesar 74,60 tahun sehingga capaian kinerja sebesar 100,13 %. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD tahun 2026 Usia Harapan Hidup tahun 2024 melebihi 0,10 tahun dari yang ditargetkan 74,50 tahun dan telah tercapai 100,13 %.



Usia Harapan Hidup ini masih berada di bawah capaian Usia Harapan Hidup Provinsi Kalimantan Timur 75,28 tahun dan berada di atas Usia Harapan Hidup Indonesia 74,47 tahun, serta berada pada urutan keenam dengan Usia Harapan Hidup tertinggi dari 10 kabupaten/ Kota se Kalimantan Timur.



Grafik 3.18 Angka Harapan Hidup Kabupaten/ Kota se Kalimantan Timur, Prov. Kalimantan Timur, Nasional Tahun 2025



Sumber : Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur, 2026

Tujuan usaha Kesehatan Masyarakat ialah agar setiap warga masyarakat dapat mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya baik jasmani, rohani, maupun sosialnya diharapkan berumur panjang, dan tidak mudah sakit-sakitan. Adapun jumlah 10 Besar Penyakit di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.9 Sepuluh Besar Penyakit di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025

	Nama Penyakit	Jumlah
1	Essential (primary) hypertension	18.836
2	Acute nasopharyngitis (common cold)	13.915
3	Dispepsia	10.385
4	Acute upper respiratory infection, unspecified	9.126
5	Fever, unspecified	7.258
6	Non-insulin-dependent diabetes mellitus	5.504
7	Acute upper respiratory infections of multiple and unspecified sites	5.019
8	Cough	4.384
9	Myalgia	4.012
10	Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin	3.930
	Jumlah	82.369

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara, 2026

**Tabel 3.10 Faktor yang Mempengaruhi Usia Harapan Hidup
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025**

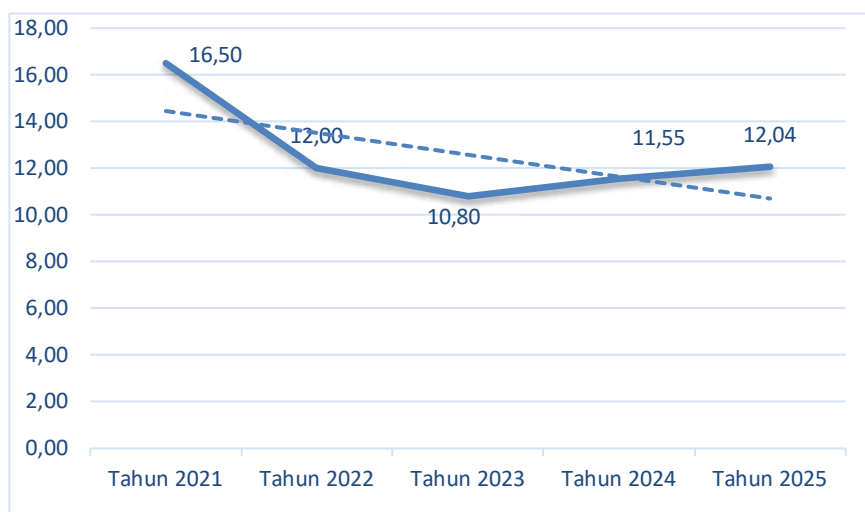
	Nama Penyakit	Jumlah
1	Prevalensi Balita Stunting	12,04
2	Angka Kematian Ibu Melahirkan	2
3	Angka Kematian Bayi per 1000 KH	15
4	Persentase Standar Pelayanan Minimal	74
5	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	90

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara, 2026

2.5.2. Prevalensi Stunting

Prevalensi Stunting adalah persentase balita yang mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan. Balita stunting termasuk masalah gizi kronik yang disebabkan oleh banyak faktor, seperti kondisi sosial ekonomi, kurangnya asupan gizi pada bayi, kondisi kesehatan dan gizi ibu sebelum, saat kehamilan serta setelah persalinan.

**Grafik 3.19 Prevalensi Stunting
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 - 2025**



Sumber : Kementerian Kesehatan RI, 2026

Prevalensi Stunting Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2025 sebesar 12,04 %, mengalami kenaikan 0,49 % dari tahun 2024. Prevalensi Stunting 12,04 % memiliki interpretasi bahwa dari 100 anak di bawah 5 tahun, secara rata-rata 12 anak di antaranya stunting. Peningkatan kasus stunting ini disebabkan oleh



kurangnya sinergi dalam melaksanakan intervensi penanganan masalah gizi lintas perangkat daerah yang terlibat; kurangnya peran aktif masyarakat untuk membawa anak ke posyandu; kurangnya komitmen para pemangku kepentingan dan masyarakat dalam percepatan penurunan stunting; serta masih kurangnya evaluasi dan intervensi atas kegiatan kegiatan yang dilakukan. Pada tahun 2025 jika dihitung persentase antara jumlah target penerima layanan dengan jumlah penerima layanan, diperoleh persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sebesar 88,89 persen, pelayanan kesehatan ibu bersalin 87,73 persen, pelayanan kesehatan bayi baru lahir sebesar 88,24 persen, dan pelayanan kesehatan balita sebesar 83,15 persen.

Jika dibandingkan dengan target akhir RPD tahun 2026 Prevalensi Stunting tahun 2025 masih kurang 1,99 %, dimana telah tercapai 83,47 %.

Strategi ke depan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Penajam Paser Utara, antara lain:

1. Pelayanan kesehatan remaja dan calon pengantin.

Pelayanan kesehatan remaja dapat dilakukan melalui kegiatan pelayanan kesehatan peduli remaja di sekolah dan puskesmas, sedangkan pelayanan kesehatan calon pengantin dapat dilakukan melalui skrining pranikah di puskesmas atau fasilitas kesehatan;

2. Pemeriksaan Antenatal care (ANC) sesuai standar pelayanan minimal.

Meningkatkan pemeriksaan kehamilan untuk mengoptimalkan kesehatan ibu dan janin;

3. Stimulasi deteksi tumbuh kembang untuk anak bayi dan balita dilakukan secara bersama-sama oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan secara berkala;

4. Pendampingan pelaksanaan ASI Eksklusif pada seluruh ibu menyusui;

5. Peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap;

6. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) lokal bagi balita dan ibu hamil bermasalah gizi;

7. Pelatihan tenaga kesehatan terkait dengan pelayanan kesehatan ibu dan anak serta penanganan gizi masyarakat;

8. Pemenuhan sarana dan prasarana di posyandu (antropometri);

9. Meningkatkan peran aktif dalam pelaksanaan rembuk stunting tingkat desa/ kelurahan dan kecamatan;

10. Mengupayakan pemenuhan obat-obatan dan vitamin dalam mendukung pelayanan kesehatan ibu dan anak serta gizi masyarakat.



Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis Peningkatan Kualitas Kesehatan, yaitu :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman;
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
5. Program Pengawasan Keamanan Pangan;
6. program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat.



Gerakan Aktifkan Posyandu

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis Peningkatan Kualitas Kesehatan dengan pagu anggaran Rp 53.417.227.997,83, terealisasi Rp 48.865.591.701,00 sehingga capaian realisasi anggaran 91,48 %. Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis ini sebesar 95,42 %, maka efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar 4,13 %. Jika rasio efisien -20 % sampai 20 %, maka penggunaan anggaran sasaran strategis ini berada dalam kategori efisien.

Tabel 3.11 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis Peningkatan Kualitas Kesehatan

Sasaran Strategis/ Indikator/ Program		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	% Efisiensi
Peningkatan Kualitas Kesehatan		53.417.227.997,83	48.865.591.701,00	91,48	95,42	4,13
Usia Harapan Hidup						
Prevalensi Stunting						
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	49.250.420.044,00	45.495.588.666,00			
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.693.361.541,00	1.266.288.536,00			



3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	735.201.000,00	549.361.614,00			
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	198.995.480,83	170.055.790,00			
5	Program Pengawasan Keamanan Pangan	99.216.097,00	91.170.127,00			
6	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.440.033.835,00	1.293.126.968,00			

SASARAN 6

Peningkatan Kualitas Kehidupan Keluarga Sejahtera dan Responsif Gender

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2024	2025			Target Akhir RPD (2026)	Capaian 2024 Terhadap Target Akhir RPD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
2.6.1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	86,93	87,55	87,23	99,63	87,85	99,29
Rata-rata Capaian Kinerja					99,63		99,29

2.6.1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

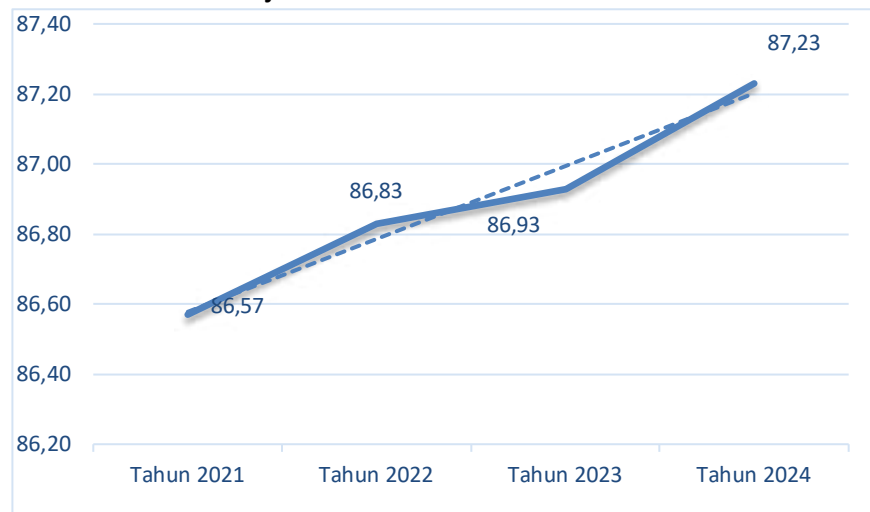
Indeks Pembangunan Gender adalah salah satu ukuran tingkat keberhasilan capaian pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender berdasarkan beberapa dimensi kunci, seperti kesehatan, pendidikan, dan partisipasi ekonomi. IPG digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan nilai IPG.

Nilai IPG Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2024 sebesar 87,23, IPG tahun 2025 diperkirakan akan rilis oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara pada pertengahan tahun 2026. IPG Kabupaten Penajam Paser Utara dari tahun 2021 sampai dengan 2024 mengalami peningkatan. Pada tahun 2024 IPG Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami peningkatan sebesar 0,30 poin dibandingkan tahun 2023. Peningkatan capaian IPG ini menandakan bahwa adanya



kemajuan dalam upaya mengurangi kesenjangan pembangunan laki-laki dan perempuan. Realisasi nilai IPG tahun 2024 jika dibandingkan dengan target akhir RPD tahun 2026 sudah mencapai 99,29 %.

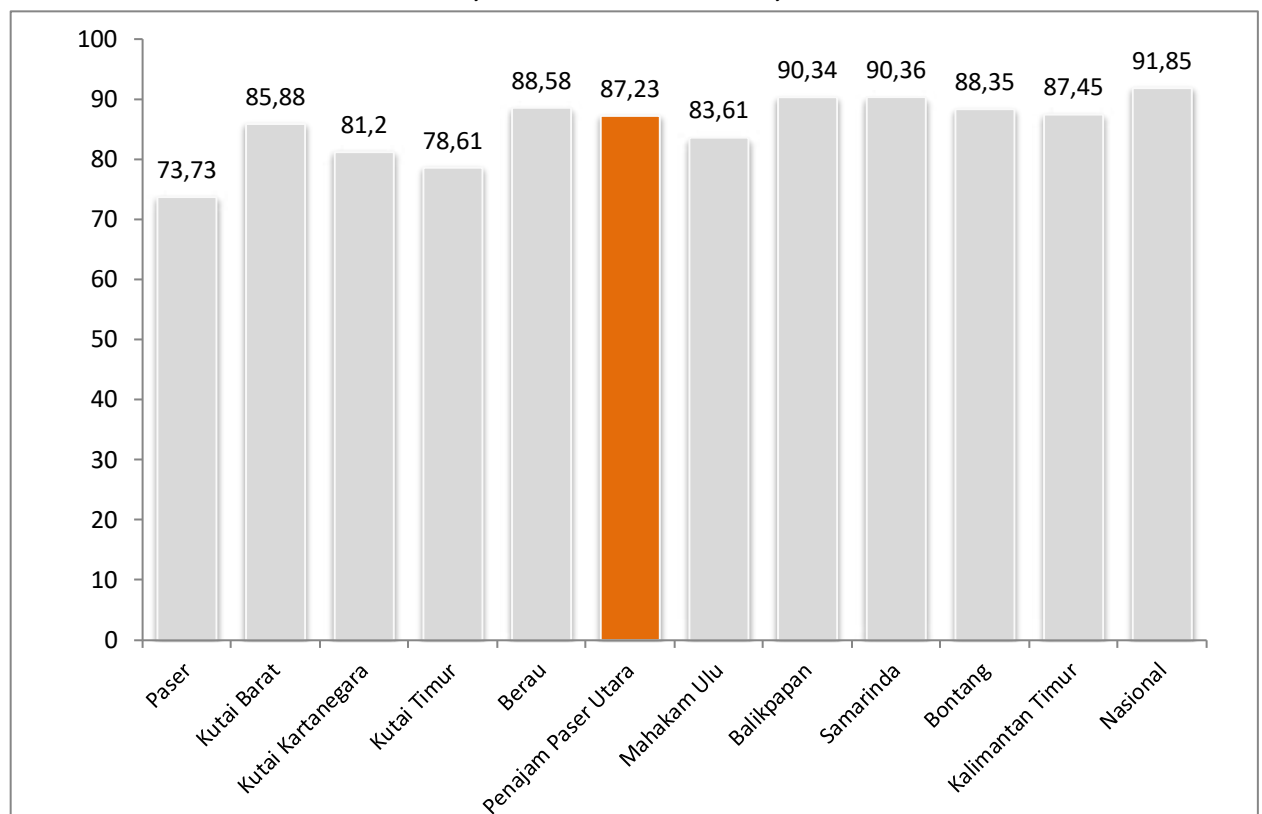
Grafik 3.20 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 - 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara, 2026

Nilai IPG Kabupaten Penajam Paser Utara berada pada urutan kelima tertinggi dari 10 Kabupaten/ Kota di Kalimantan Timur, dan masih berada di bawah nilai IPG Provinsi Kalimantan Timur, serta di bawah IPG Nasional.

Grafik 3.21 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/ Kota se Kalimantan Timur, Prov. Kalimantan Timur, Nasional Tahun 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur, 2026

Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara wajib hadir dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada anak dan perempuan, dengan mendorong pembangunan manusia berbasis gender, di antaranya :

1. Menciptakan ruang publik yang ramah dan layak anak;
2. Memberikan pendampingan terhadap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga;
3. Menjamin persamaan perlakuan dalam pembangunan antara laki-laki dan perempuan;
4. Meningkatkan akses perempuan terhadap pembangunan, terutama dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan;
5. Meningkatkan kemampuan perempuan sehingga mampu bersaing dengan laki-laki;
6. Memperhatikan kebutuhan dasar kodrat bagi perempuan;
7. Memberdayakan peran perempuan dalam memperkuat pondasi ekonomi kerakyatan dengan menggerakkan ekonomi skala mikro dan kecil;
8. Memberikan kesempatan kepada perempuan untuk menduduki posisi strategis dalam pemerintahan.

Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu :

1. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
2. Program Perlindungan Perempuan;
3. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
4. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);
5. Program Perlindungan Khusus Anak;
6. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera;
7. Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
8. Program Pengendalian Penduduk;
9. Program Pembinaan Keluarga Berencana.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis Peningkatan Kualitas Kehidupan Keluarga Sejahtera dan Responsif Gender dengan pagu anggaran Rp 3.701.978.589,88, terealisasi Rp 3.278.691.525,00 sehingga capaian realisasi anggaran 88,57 %. Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis ini sebesar 99,63 %, maka efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar 11,111 %. Jika



rasio efisien -20 % sampai 20 %, maka penggunaan anggaran sasaran strategis ini berada dalam kategori efisien.

**Tabel 3.12 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis
Peningkatan Kualitas Kehidupan Keluarga Sejahtera dan Responsif Gender**

Sasaran Strategis/ Indikator/ Program		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	% Efisiensi
Peningkatan Kualitas Kehidupan Keluarga Sejahtera dan Responsif Gender		3.701.978.589,88	3.278.691.525,00	88,57	99,63	11,11
Indeks Pembangunan Gender						
1	Program Pengendalian Penduduk	165.780.367,18	99.893.330,00			
2	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.423.953.757,00	1.345.397.377,00			
3	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	628.987.628,00	586.726.741,00			
4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	5.432.391,00	5.418.000,00			
5	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	11.198.820,00	10.848.000,00			
6	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	45.861.800,00	32.538.895,00			
7	Program Perlindungan Khusus Anak	93.071.861,50	88.360.387,00			
8	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1.186.474.299,20	976.557.432,00			
9	Program Perlindungan Perempuan	141.217.666,00	132.951.363,00			

SASARAN 7

Peningkatan Kualitas Pembangunan Kebudayaan dan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Kepemudaan yang Berwawasan Kebangsaan

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2024	2025			Target Akhir RPD (2026)	Capaian 2025 Terhadap Target Akhir RPD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
2.7.1	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kepemudaan, Kebudayaan, dan Kemasyarakatan	95 %	45	71	157,78	55	129,09
Rata-rata Capaian Kinerja					157,78		129,09

2.7.1. Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kepemudaan, Kebudayaan, dan Kemasyarakatan

Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kepemudaan, Kebudayaan, Dan Kemasyarakatan merupakan salah satu indikator dan upaya terencana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat identitas budaya, serta membangun kehidupan sosial masyarakat yang harmonis. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, maupun komunitas lokal, yang dilakukan melalui :

1. Pembinaan Kepemudaan bertujuan untuk mengembangkan potensi generasi muda agar menjadi individu yang berkarakter, berdaya saing, dan memiliki kepedulian sosial.
 - a. Pelatihan kepemimpinan dan organisasi untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan kepemimpinan pemuda.
 - b. Kegiatan kewirausahaan pemuda seperti pelatihan bisnis, UMKM, dan ekonomi kreatif.
 - c. Pengembangan bakat dan minat melalui kegiatan olahraga, seni, teknologi, dan kreativitas.
 - d. Kegiatan sosial dan pengabdian masyarakat seperti kerja bakti, bakti sosial, dan program relawan.
 - e. Penyuluhan dan pendidikan karakter untuk membentuk sikap disiplin, tanggung jawab, dan nasionalisme.
2. Pembinaan Kebudayaan bertujuan untuk melestarikan nilai-nilai budaya lokal sekaligus mengembangkan budaya agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.
 - a. Pelestarian seni dan tradisi daerah, seperti tari tradisional, musik daerah, dan upacara adat.
 - b. Festival budaya dan pameran seni untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas.
 - c. Pelatihan seni budaya bagi generasi muda.
 - d. Dokumentasi dan pengarsipan budaya lokal agar tidak hilang.
 - e. Pengembangan kreativitas budaya melalui inovasi seni modern berbasis tradisi.
3. Pembinaan Kemasyarakatan bertujuan untuk memperkuat hubungan sosial, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta menciptakan lingkungan yang harmonis dan sejahtera.
 - a. Kegiatan gotong royong dan kerja bakti dalam menjaga kebersihan lingkungan.
 - b. Penyuluhan sosial seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan keluarga.



- c. Forum musyawarah masyarakat untuk menyelesaikan masalah bersama.
- d. Penguatan organisasi kemasyarakatan seperti karang taruna, PKK, dan lembaga masyarakat desa.
- e. Program pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan keterampilan dan ekonomi keluarga.

Tahun 2025 dari target yang ditetapkan 45 % dapat terealisasi 71 % sehingga capaian kinerjanya sebesar 157,78 %. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD tahun 2026, indikator ini telah melampaui target, dengan capaian 129,09 %.

Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis Peningkatan Kualitas Pembangunan Kebudayaan dan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Kepemudaan yang Berwawasan Kebangsaan, yaitu :

1. Program Pengembangan Kebudayaan;
2. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan;
4. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan;
5. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
6. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
7. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
8. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial;
9. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Budaya Politik;
10. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.



Turnamen Bola Voli



Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis Peningkatan Kualitas Kesehatan dengan pagu anggaran Rp 26.010.241.646,00, terealisasi Rp 24.879.791.169,00 sehingga capaian realisasi anggaran 95,65%. Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis ini sebesar 157,78 %, maka efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar 39,38 %. Jika rasio efisien -20 % sampai 20 %, maka penggunaan anggaran sasaran strategis ini berada dalam kategori tidak efisien sehingga dibutuhkan evaluasi dalam menentukan target di dalam perencanaan.

Tabel 3.13 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis Peningkatan Kualitas Pembangunan Kebudayaan dan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Kepemudaan yang Berwawasan Kebangsaan

Sasaran Strategis/ Indikator/ Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	% Efisiensi
Peningkatan Kualitas Pembangunan Kebudayaan dan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Kepemudaan yang Berwawasan Kebangsaan	26.010.241.646,00	24.879.791.169,00	95,65	157,78	39,38
Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kepemudaan, Kebudayaan dan Kemasyarakatan					
1 Program Pengembangan Kebudayaan	790.617.366,00	783.883.268,00			
2 Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	126.975.062,00	102.792.750,00			
3 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	15.100.526.497,00	14.374.010.593,00			
4 Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00			
5 Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	3.140.019.890,00	2.937.689.102,00			
6 Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	436.493.123,00	422.956.610,00			
7 Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	256.808.120,00	234.606.097,00			
8 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	3.182.637.244,00	3.079.525.293,00			
9 Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	1.288.699.600,00	1.268.196.456,00			
10 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	537.464.744,00	526.131.000,00			



Tujuan 3

Meningkatkan Standar Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2024	2025			Target Akhir RPD (2026)	Capaian 2025 Terhadap Target Akhir RPD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
3.1	Indeks Reformasi Birokrasi	68,5	63,70 (Baik)	70,36	110,46	65,50	107,42
3.2	Indeks SPBE	2,87	3 (Baik)	3,28	109,33	3	109,33
Rata-rata Capaian Kinerja					109,89		108,38

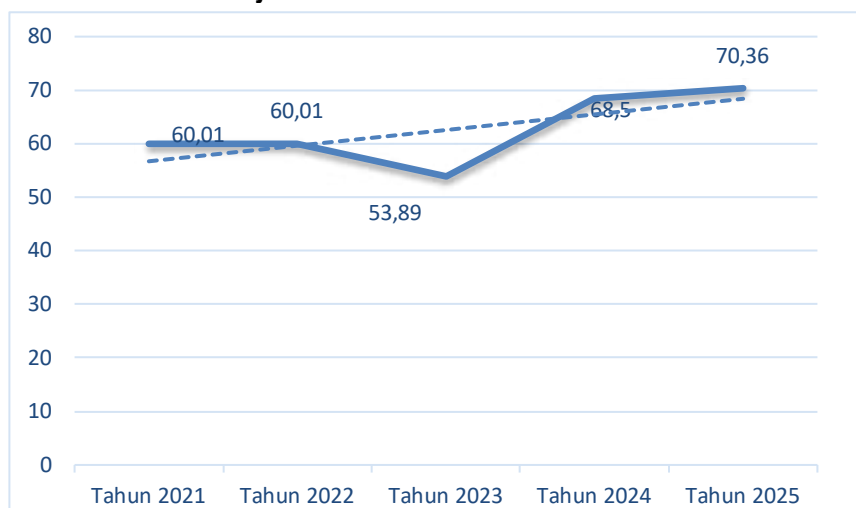
3.1. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) adalah suatu indeks yang digunakan untuk mengukur keberhasilan reformasi birokrasi pada suatu instansi pemerintah. Indeks ini menggambarkan sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Tahun 2025 Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami peningkatan menjadi 70,36 dari indeks 68,5 pada tahun 2024. IRB Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dari beberapa tahun terakhir mengalami nilai yang fluktuatif. Peningkatan IRB pada tahun 2024 menjadi bukti bahwa Pemerintah Penajam Paser Utara terus berupaya dan terus berkolaborasi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan mempercepat agenda pembangunan melalui pencapaian yang berdampak.



Grafik 3.22 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 - 2025

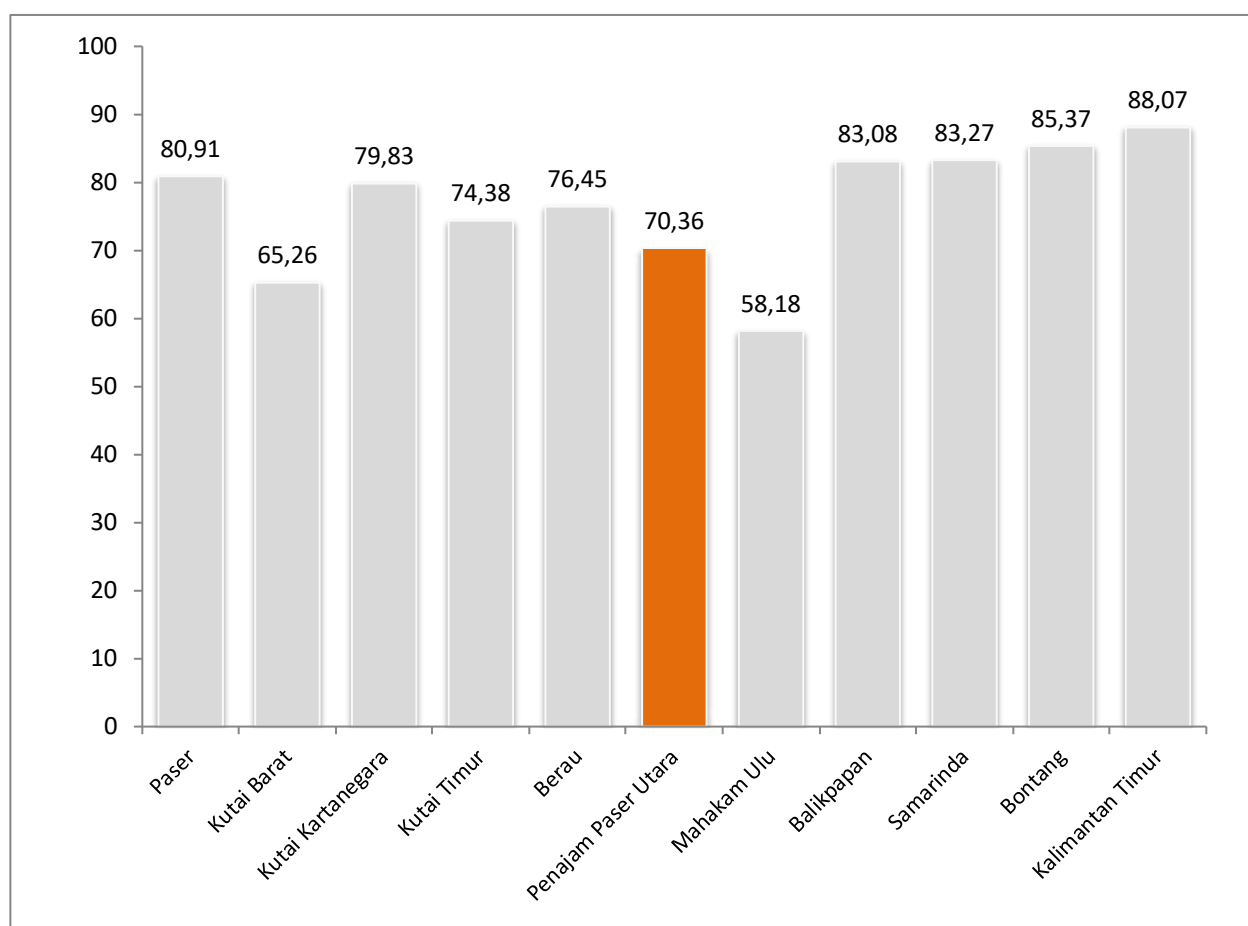


Sumber : Kementerian PAN RB RI, 2026

Nilai IRB 70,36 dengan interpretasi BB pada tahun 2025 dengan RB General 60,68 dan RB Tematik 9,68. Kategori BB atau predikat Sangat Baik menginterpretasikan bahwa telah memenuhi sebagian kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan. Dari target 63,70 yang ditetapkan, terealisasi 70,36 sehingga capaian kinerja 110,46 % atau kategori Sangat Memuaskan. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD tahun 2026 nilai Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2025 sudah mencapai target akhir dengan capaian 107,42 %.

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Penajam Paser Utara berada pada urutan ketiga terendah dari 10 Kabupaten/ Kota di Kalimantan Timur, dan berada di bawah nilai Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Kalimantan Timur.

Grafik 3.23 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten/ Kota se Kalimantan Timur, Prov. Kalimantan Timur Tahun 2025



Sumber : Kementerian PAN RB RI, 2026



Melihat catatan dan rekomendasi atas hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, berikut ini upaya yang akan dilakukan dalam peningkatan IRB di tahun yang akan datang, antara lain:

1. Menyusun Rencana Aksi yang memuat kegiatan utama dengan target yang logis, realistis, dan berorientasi peningkatan kinerja untuk memenuhi kebutuhan pencapaian sasaran, serta menentukan indikator output memenuhi kriteria SMART;
2. Melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan komitmen dan kapasitas dalam pelaksanaan SPIP Terintegrasi pada perangkat daerah;
3. Melakukan pemetaan risiko kemitraan dan risiko fraud strategis dan operasional serta mengidentifikasi, menganalisa serta mengelola seluruh risiko secara memadai;
4. Meningkatkan sosialisasi dan kampanye kanal SP4n LAPOR;
5. Meningkatkan kualitas kebijakan pada dimensi perencanaan, implementasi, evaluasi, dan transparansi serta partisipasi publik;
6. Mengevaluasi dan menetapkan sasaran yang menjawab permasalahan utama pada tema yang ada dan memperbaiki indikator kinerja agar ber kriteria SMART serta cukup dalam mengukur keberhasilan pencapaian sasaran.

3.2. Indeks SPBE

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bertransformasi menjadi Indeks Pemerintah Digital berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029, yang didorong oleh kebutuhan integrasi layanan, fokus pada *citizen-centric* (pengguna) dan efisiensi. Perubahan ini bertujuan mengubah fokus dari kepatuhan administratif (SPBE) ke dampak layanan digital yang dirasakan langsung oleh masyarakat (Pemerintah Digital). Namun sampai dengan saat laporan ini disusun, kebijakan yang mengatur tentang pemantauan dan evaluasi Indeks Pemerintah Digital belum ada sehingga nilai Indeks Pemerintah Digital disamakan dengan Indeks SPBE.

Indeks SPBE (yang disamakan dengan Indeks Pemerintah Digital) Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2025 sebesar 3,28 dengan predikat "Baik". Jika mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB RI Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantuan dan Evaluasi SPBE, indeks 3,28 berinterpretasi bahwa penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terintegrasi, fungsional, dan



memberikan layanan publik digital secara memadai. Ini menunjukkan kematangan tata kelola, manajemen, dan layanan berbasis TIK yang stabil, efisien, dan terus berinovasi, melampaui standar dasar pemerintahan, meskipun masih ada ruang peningkatan ke "Sangat Baik". Target Indeks SPBE 3 pada tahun 2025 terealisasi 3,27 dengan capaian 109,33 % atau dengan kategori Sangat Memuaskan. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD tahun 2026, Indeks SPBE tahun 2025 sudah mencapai target dengan capaian kinerja 109,33 %.

SASARAN 8

Penguatan Birokrasi yang Efektif dan Efisien

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2024	2025			Target Akhir RPD (2026)	Capaian 2025 Terhadap Target Akhir RPD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
3.8.1	Rata-rata Capaian SAKIP Perangkat Daerah	B	B	BB (70,39)	123,18	B	123,18
3.8.2	Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah	6,12 %	8,50	9,46	111,29	9,50	99,58
Rata-rata Capaian Kinerja					117,24		111,38

3.8.1. Rata-rata Capaian SAKIP Perangkat Daerah

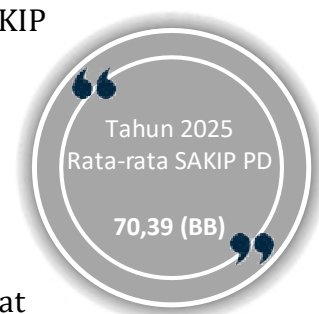
Rata-rata Capaian SAKIP Perangkat Daerah diperoleh dari hasil evaluasi oleh tim evaluator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) terhadap seluruh perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (35 perangkat daerah). Evaluasi ini bertujuan untuk menilai berfungsinya implementasi dan pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam seluruh perangkat daerah dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil evaluasi AKIP seluruh perangkat daerah pada tahun 2025 terhadap AKIP tahun anggaran 2024 menunjukkan bahwa Rata-rata Capaian AKIP Perangkat Daerah sebesar 70,31 (BB) dengan interpretasi Sangat Baik, dengan rincian rata-rata tiap komponen sebagai berikut :

**Tabel 3.14 Hasil Evaluasi AKIP Seluruh Perangkat Daerah
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara T.A 2023 dan 2024**

No.	Komponen	Bobot (%)	Tahun	
			2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30	22,34	23,43
2	Pengukuran Kinerja	30	19,44	20,50
3	Pelaporan Kinerja	15	11,16	10,81
4	Evaluasi Internal	25	14,13	15,64
Total		100	67,08	70,39

Dari hasil evaluasi AKIP tahun 2024 oleh tim evaluator AKIP pemerintah daerah tersebut di atas, komponen penilaian Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja sudah mencapai dengan hasil yang Sangat Baik, namun terjadi penurunan pada komponen Pelaporan Kinerja. Penurunan komponen Pelaporan Kinerja ini umumnya disebabkan oleh laporan kinerja beberapa perangkat daerah yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan di dalam dokumen perjanjian kinerja dan kurangnya informasi yang disajikan tentang penurunan atau pencapaian kinerja serta alternatif solusi ke depan yang dapat dilakukan.



Dari target B pada Rata-rata Capaian SAKIP Perangkat Daerah, terealisasi BB dengan skor rata-rata 70,39 sehingga capaian kinerja sebesar 123,18 %. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD tahun 2026, Rata-rata Capaian SAKIP Perangkat daerah tahun 2024 sudah melebihi target dengan capaian kinerja 123,18 %.

Sementara itu, Nilai AKIP Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2025 mengalami penurunan, dari yang sebelumnya 62,19 pada tahun 2024 turun menjadi 61,14, lebih jelasnya akan disajikan pada uraian Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029.

Strategi ke depan yang dapat dilakukan dalam meningkatkan Rata-rata Capaian SAKIP Perangkat Daerah yang selaras dengan peningkatan Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, antara lain:

1. Monitoring dan evaluasi, serta memastikan seluruh perangkat daerah menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi oleh evaluator pemerintah pusat maupun evaluator daerah;

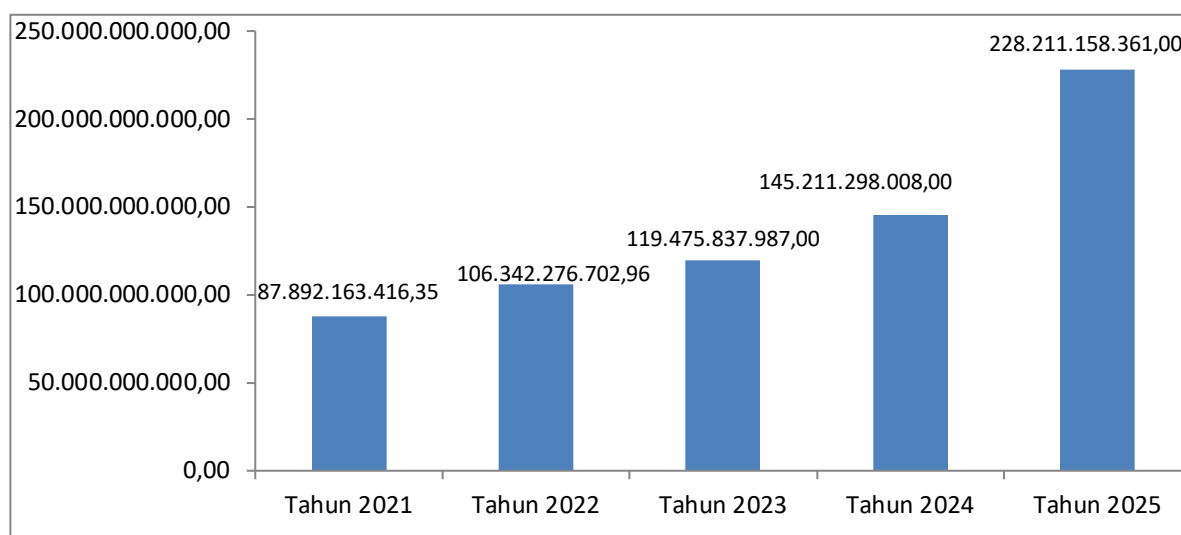


2. Meningkatkan pendampingan kepada seluruh perangkat daerah untuk memperdalam pemahaman tentang AKIP untuk perbaikan dokumen AKIP perangkat daerah;
3. Meningkatkan komitmen dan sinergitas seluruh perangkat daerah;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia tim AKIP dan tim evaluator AKIP Kabupaten Penajam Paser Utara;
5. Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan AKIP.

3.8.2. Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Grafik 3.24 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2021 - 2025**



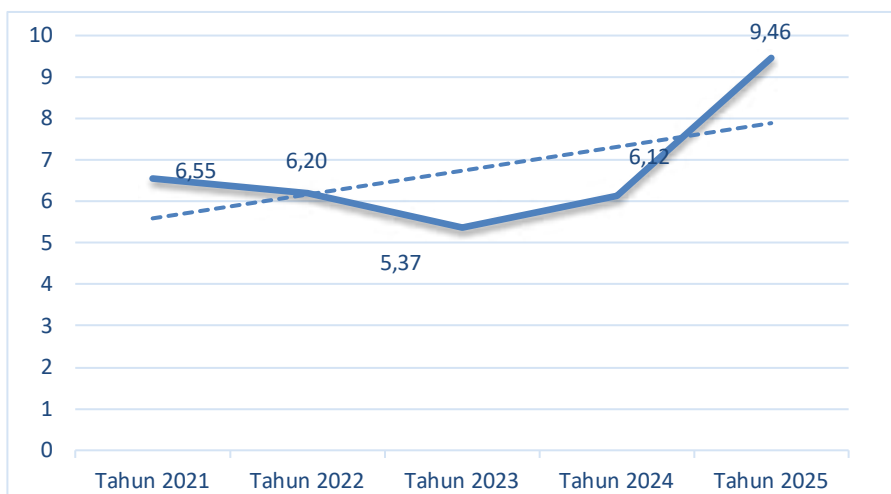
Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab. Penajam Paser Utara, 2026

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2025 adalah Rp 288.211.158.361,00. Jumlah ini meningkat sebesar 57,16 % dibanding PAD tahun 2024 dengan PAD sebesar Rp 145.211.298.008,00. Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah tahun 2025 mencapai 9,46 % dari target 8,50 % sehingga capaian kinerjanya sebesar 111,29 %. Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari penerimaan Hasil Pajak Daerah sebesar Rp 92.078.050.000,00, Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp 33.086.806.484,00, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan



sebesar Rp 2.671.835.000,00 dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp 100.374.466.877,00. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD tahun 2026 Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah tahun 2025 sudah mendekati yang ditargetkan dengan capaian kinerja 99,58 %.

**Grafik 3.25 Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 - 2025**



Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab. Penajam Paser Utara, 2026

Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah mengalami nilai peningkatan pada tiga tahun terakhir. Ini merupakan salah satu wujud nyata kemandirian daerah dalam mengelola keuangan, sekaligus mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menggali potensi lokal secara optimal. Oleh karena itu pengelolaan pendapatan asli daerah harus terus ditingkatkan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan melalui peningkatan peran BUMD, peningkatan potensi lokal dengan hilirisasi industri ,serta menciptakan inovasi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah.

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara lain yaitu:

1. Optimalisasi Pajak Daerah dengan memperbaiki sistem pemungutan pajak melalui digitalisasi data objek dan subjek pajak lintas agar lebih efektif dan transparan;
2. Peningkatan Retribusi Daerah melalui peningkatan kualitas pelayanan publik sehingga masyarakat bersedia membayar retribusi, dan mengoptimalkan layanan perizinan;
3. Pengelolaan Aset Daerah Secara Produktif dengan menginventarisasi dan memanfaatkan aset daerah aset daerah yang belum termanfaatkan;
4. Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), meningkatkan kinerja pengelolaan BUMD dengan mengembangkan usaha baru yang potensial di daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;



5. Pengembangan Sektor Ekonomi Daerah dengan mendorong investasi di daerah melalui kemudahan perizinan, mengembangkan sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, atau industri lokal, dan memberdayakan UMKM.

Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis Penguatan Birokrasi yang Efektif dan Efisien, yaitu :

1. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;
3. Program penyelenggaraan penataan ruang;
4. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik;
7. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
8. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
9. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi;
10. Program Kepegawaian Daerah;
11. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis Penguatan Birokrasi yang Efektif dan Efisien dengan pagu anggaran Rp 24.643.086.260,46 terealisasi Rp 21.273.453.209,00 sehingga capaian realisasi anggaran 86,33%. Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis ini sebesar 91,92 %, maka efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar 26,37 %. Jika rasio efisien -20 % sampai 20 %, maka penggunaan anggaran sasaran strategis ini berada dalam kategori tidak efisien sehingga dibutuhkan evaluasi dalam menentukan target yang realistis di dalam perencanaan.

Tabel 3.15 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis Penguatan Birokrasi yang Efektif dan Efisien

Sasaran Strategis/ Indikator/ Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	% Efisiensi
Penguatan Birokrasi yang Efektif dan Efisien	24.643.086.260,46	21.273.453.209,00	86,33	117,24	26,37
Rata-rata Capaian SAKIP Perangkat Daerah					
Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah					



1	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	512.424.838,83	405.519.563,00			
2	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	716.923.000,00	643.375.049,00			
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.616.876.801,05	752.488.130,00			
4	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	697.812.884,00	641.423.429,00			
5	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	9.383.621.242,00	8.720.810.314,00			
6	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	1.288.699.600,00	1.268.196.456,00			
7	Program Penyelenggaraan Pengawasan	3.812.321.650,00	3.029.460.024,00			
8	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.394.527.123,62	2.283.899.030,00			
9	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1.044.719.650,00	478.595.940,00			
10	Program Kepegawaian Daerah	1.659.219.018,96	1.557.413.375,00			
11	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.515.940.452,00	1.492.271.899,00			

SASARAN 9

Peningkatan Pelayanan Prima Kepada Publik

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2024	2025			Target Akhir RPD (2026)	Capaian 2025 Terhadap Target Akhir RPD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
3.9.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,57	85,88	85,70	99,79	90,07	95,15
Rata-rata Capaian Kinerja					99,79		95,15

3.9.1. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam hal memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan

publik. Pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja, dimana tujuan yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berdasarkan kebutuhan masyarakat. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan secara berkala digunakan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang salah satunya dapat dilakukan melalui pengembangan inovasi terhadap pelayanan publik.

Berdasarkan hasil rekapitulasi Laporan SKM tahun 2025 dari 54 perangkat daerah dan unit kerja terhadap 9 unsur yang disurvei diperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 85,70, dari target yang ditetapkan 85,88, capaian kinerjanya 99,79 % atau kategori kinerja Sangat Memuaskan. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD tahun 2026 Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2025 sudah mencapai 95,15 %.



Tabel 3.16 Indeks Kepuasan Masyarakat Per Unsur Pelayanan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 - 2025

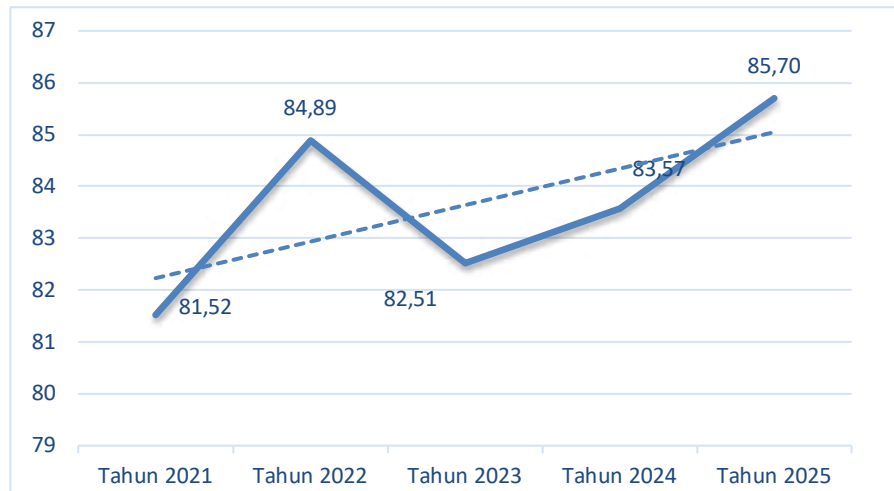
No.	Unsur Pelayanan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
		Nilai	Kinerja	Nilai	Kinerja	Nilai	Kinerja
1	Persyaratan Pelayanan	3,24	Baik	3,33	Baik	3,36	Baik
2	Sistem Mekanisme Prosedur Pelayanan	3,14	Baik	3,30	Baik	3,35	Baik
3	Waktu Pelayanan	3,10	Baik	3,23	Baik	3,31	Baik
4	Biaya/ Tarif	3,56	Sangat Baik	3,69	Sangat Baik	3,76	Sangat Baik
5	Produk Sesifikasi Jenis Pelayanan	3,17	Baik	3,32	Baik	3,36	Baik
6	Kompetensi Pelaksana	3,22	Baik	3,34	Baik	3,40	Baik
7	Perilaku Pelaksana	3,28	Baik	3,39	Baik	3,40	Baik
8	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	3,10	Baik	3,22	Baik	3,57	Sangat Baik
9	Sarana dan Prasarana	3,33	Baik	3,45	Baik	3,42	Baik

Pada sembilan unsur yang disurvei terhadap pelayanan penyelenggaraan pelayanan publik pada tahun 2025 menunjukkan nilai atau kinerja yang beragam, namun keseluruhannya sudah mencapai kinerja yang Baik. Dari sembilan unsur pelayanan tersebut, jika dibandingkan dengan tahun 2024, semua unsur mengalami peningkatan nilai, kecuali



unsur Sarana dan Prasarana mengalami penurunan. Hal ini menjadi perhatian karena standar Sarana dan Prasarana merupakan salah satu aspek penting untuk menunjang pelayanan yang maksimal dan berkualitas.

Grafik 3.26 Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 - 2025



Sumber : Sekretariat Daerah Kab. Penajam Paser Utara, 2026

Indeks Kepuasan Masyarakat mengalami fluktuasi berdasarkan hasil survei penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2021 sampai dengan 2025, namun kecenderungan (*trend*) meningkat. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Melihat nilai dari setiap unsur pelayanan terhadap 54 perangkat daerah dan unit kerja pada laporan hasil survei kepuasan masyarakat tahun 2025 yang ada, disimpulkan strategi ke depan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat, antara lain:

1. Mengevaluasi secara berkala penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh unit pelayanan publik;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pelayanan publik;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan publik;
4. Mengembangkan layanan berbasis online;
5. Menyediakan sarana pengaduan dan evaluasi.

Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis Peningkatan Pelayanan Prima Kepada Publik, yaitu :

1. Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
2. Program penyelenggaraan statistik sektoral;



3. Program pengelolaan aplikasi informatika;
4. Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
5. Program penyelesaian sengketa tanah garapan;
6. Program pencatatan sipil;
7. Program pendaftaran penduduk;
8. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
9. Program pengelolaan profil kependudukan;
10. Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis Peningkatan Pelayanan Prima Kepada Publik dengan pagu anggaran Rp 338.102.519.906,96 terealisasi Rp 330.245.815.904,00 sehingga capaian realisasi anggaran 97,68%. Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis ini sebesar 100,02 %, maka efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar 2,12 %. Jika rasio efisien -20 % sampai 20 %, maka penggunaan anggaran sasaran strategis ini berada dalam kategori efisien.

Tabel 3.17 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis Peningkatan Pelayanan Prima Kepada Publik

Sasaran Strategis/ Indikator/ Program		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	% Efisiensi
Peningkatan Pelayanan Prima Kepada Publik		338.102.519.906,96	330.245.815.904,00	97,68	99,79	2,12
Indeks Kepuasan Masyarakat						
1	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	352.419.826,00	256.527.718,00			
2	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	200.968.878,00	176.845.461,00			
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	3.624.418.177,00	3.289.701.149,00			
4	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	38.172.308.753,23	37.151.870.391,00			
5	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	587.596.850,00	482.330.652,00			
6	Program Pencatatan Sipil	178.653.545,00	160.123.507,00			
7	Program Pendaftaran Penduduk	705.868.369,00	628.571.468,00			



	Sasaran Strategis/ Indikator/ Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	% Efisiensi
8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	293.990.545.399,73	287.836.911.115,00			
9	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	25.920.000,00	18.599.999,00			
10	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	263.820.109,00	244.334.444,00			

Tujuan 4

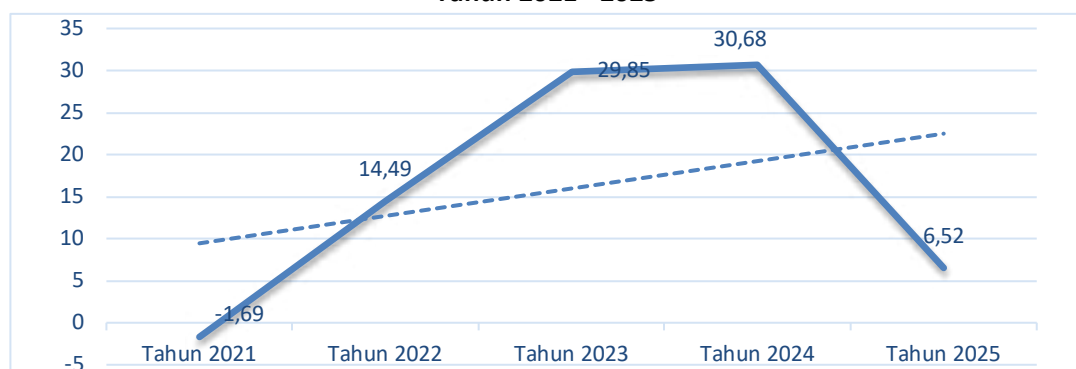
Peningkatan Transformasi Ekonomi yang Berdaya Saing

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2024	2025			Target Akhir RPD (2026)	Capaian 2025 Terhadap Target Akhir RPD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
4.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	30,68	10,00	6,52	65,20	10	65,20
Rata-rata Capaian Kinerja					65,20		65,20

5.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

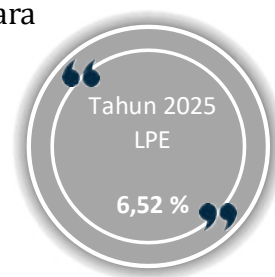
Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu, dalam jangka waktu yang cukup panjang, dan di dalamnya terdapat kemungkinan terjadi penurunan atau kenaikan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dicerminkan dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

**Grafik 3.27 Laju Pertumbuhan Ekonomi Penajam Paser Utara
Tahun 2021 - 2025**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara, 2026

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2024, namun masih mengalami kecenderungan (*trend*) grafik yang positif. Perekonomian Penajam Paser Utara menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2025 mengalami penurunan 24,16 persen dari tahun 2024. Jika dijabarkan menurut lapangan usaha, maka kondisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami penurunan paling besar pada sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor konstruksi. Penurunan pada sektor konstruksi ini disebabkan oleh penyesuaian proyek infrastruktur strategis di Ibukota Negara.



Laju Pertumbuhan Ekonomi tahun 2025 ditargetkan 10,00 % terealisasi 6,52 sehingga capaian kinerjanya sebesar 65,20 % dengan kategori kinerja Baik. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD tahun 2026 Laju Pertumbuhan Ekonomi tahun 2025 belum mencapai target, dengan capaian 65,20 %.

**Tabel 3.18 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 - 2025**

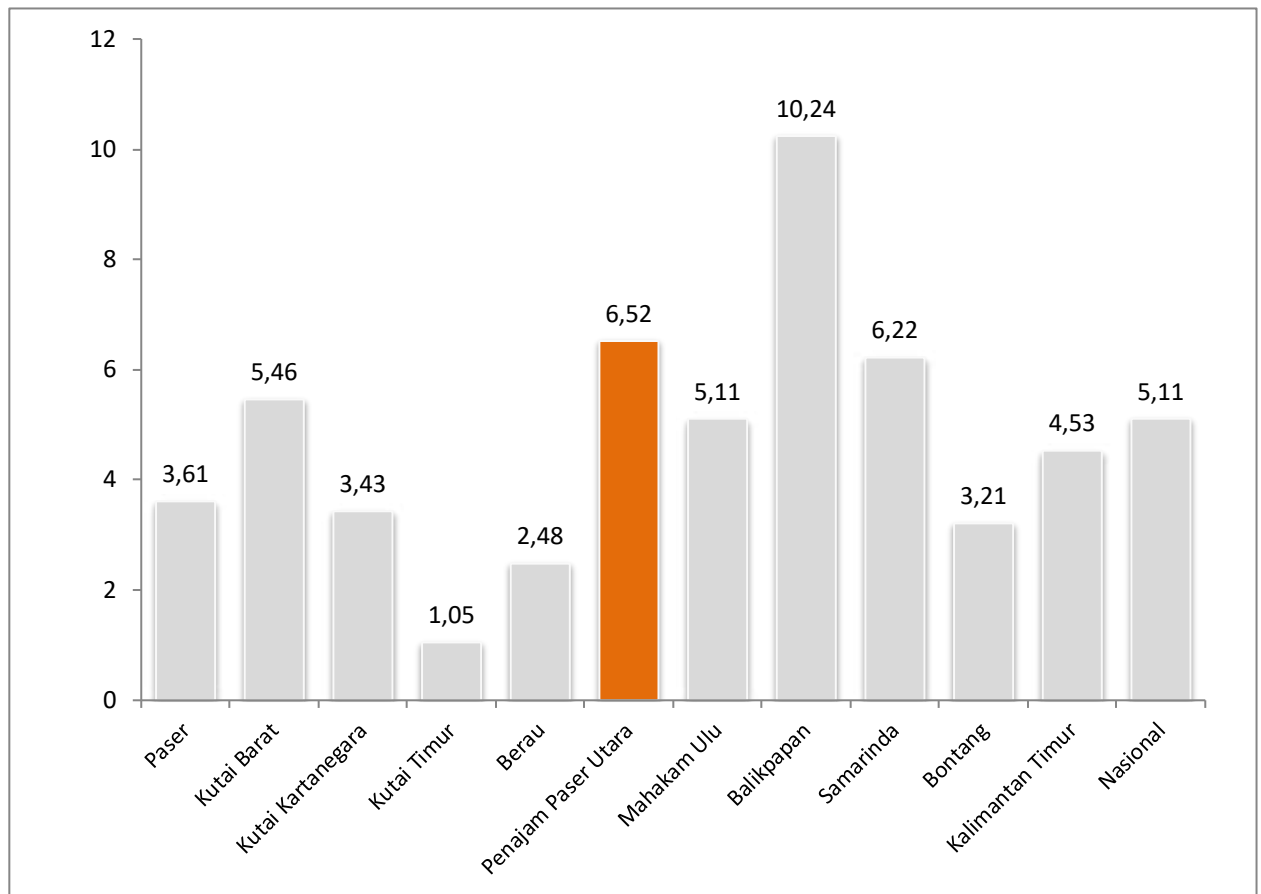
Lapangan Usaha		2021	2022	2023	2024	2025
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,07	-0,11	0,62	1,46	5,76
B	Pertambangan dan Penggalian	-14,93	3,29	11,74	4,65	-7,52
C	Industri Pengolahan	-2,31	0,26	0,17	1,56	13,82
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,07	4,48	15,97	24,40	33,42
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,39	7,35	12,33	11,19	14,16
F	Konstruksi	25,20	89,82	110,97	73,83	7,93
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,97	5,82	6,23	9,64	14,20
H	Transportasi dan Pergudangan	2,74	7,76	9,68	9,57	12,11
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,57	8,02	9,14	18,31	17,09
J	Informasi dan Komunikasi	7,72	6,13	4,47	13,78	19,02
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,66	5,79	13,27	14,01	6,79
L	Real Estat	-0,93	1,52	1,97	17,28	21,58
M,N	Jasa Perusahaan	1,32	4,63	6,56	11,61	28,90
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-3,56	7,11	6,75	20,09	12,73
P	Jasa Pendidikan	2,96	3,28	3,66	4,91	7,26
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	18,56	4,30	6,65	13,41	30,62
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,25	6,64	5,68	14,85	24,92
Produk Domestik Regional Bruto		-1,69	14,49	29,40	30,68	6,52
Produk Domestik Regional Bruto Non Migas		1,59	15,74	32,23	33,16	6,95

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara, 2025



Laju Pertumbuhan Ekonomi penajam Paser Utara masih berada pada posisi tertinggi kedua dibandingkan dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota di Kalimantan Timur dan berada di atas Provinsi Kalimantan Timur serta Nasional. Adapun lima lapangan usaha yang mendominasi perekonomian Penajam Paser Utara yaitu Pengadaan Listrik dan Gas 33,42; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 30,62; Jasa Perusahaan 28,90; Jasa Lainnya 24,92; dan Real Estat 21,58.

Grafik 3.28 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota se Kalimantan Timur, Prov. Kalimantan Timur, Nasional Tahun 2025



Sumber : Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur, 2026

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) didukung oleh dua sasaran strategis, yaitu Sasaran Strategis Peningkatan Kontribusi PDRB Sektor Non Pertambangan dan Penggalian, dan Sasaran Strategis Optimalisasi Capaian Investasi/ Penanaman Modal Investor di Daerah.



SASARAN 10

Peningkatan Kontribusi PDRB Sektor Non Pertambangan dan Penggalian

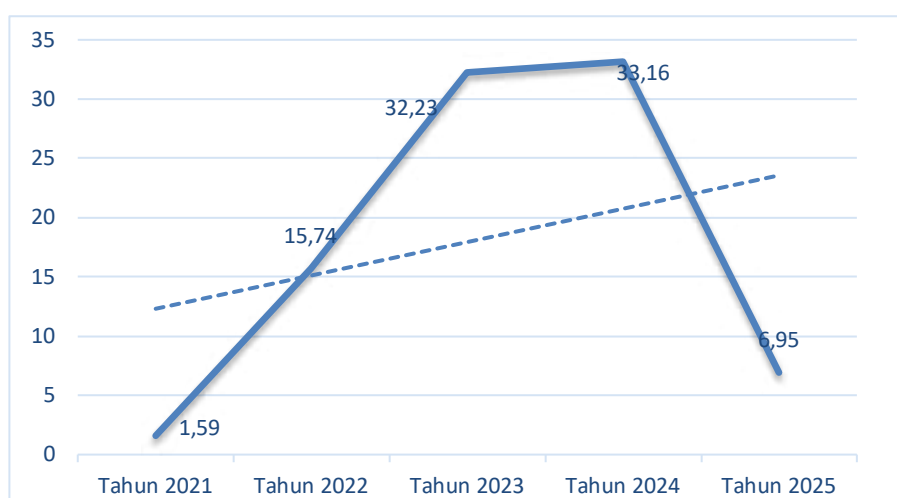
No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2024	2025			Target Akhir RPD (2026)	Capaian 2025 Terhadap Target Akhir RPD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
4.10.1	LPE Non Pertambangan dan Penggalian	33,16	4,82	6,95	144,19	4,83	143,89
Rata-rata Capaian Kinerja					144,19		143,89

4.10.1. LPE Non Pertambangan dan Penggalian

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sektor Non Pertambangan dan Penggalian merupakan salah satu sektor perekonomian yang turut menyumbang pendapatan atau nilai tambah dalam PDRB. Sektor Non Pertambangan dan Penggalian menyumbang sebesar 6,95 % PDRB di tahun 2025. LPE Non Pertambangan dan Penggalian mengalami penurunan 26,21 % jika dibandingkan dengan tahun 2024. Dari target 4,82 % tahun 2025 terealisasi 6,95 % sehingga capaian kinerjanya sebesar 144,19 % atau kategori kinerja Sangat Memuaskan. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD tahun 2026 LPE Non Migas tahun 2025 telah melampaui dari yang ditargetkan dengan capaian kinerja 143,89 %.



Grafik 3.29 LPE Non Pertambangan dan Penggalian Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 - 2025



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara, 2026

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Non Pertambangan dan Penggalian, antara lain yaitu:

- a. Mengembangkan sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri pengolahan hasil agar memiliki nilai tambah;
- b. Mendorong pertumbuhan industri pengolahan dengan mengembangkan Industri Kecil Menengah (IKM) untuk mengolah bahan mentah menjadi produk jadi.
- c. Memperkuat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk menghasilkan produk unggulan daerah melalui pemberian akses permodalan, pelatihan manajemen usaha, pemasaran, dan digitalisasi bisnis;
- d. Meningkatkan daya saing produk lokal selain komoditas migas.

Pengembangan UMKM



Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis Peningkatan Kontribusi PDRB Sektor Non Pertambangan dan Penggalian, yaitu :

1. Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
2. Program perizinan usaha pertanian;
3. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian;
4. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian;
5. Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
6. Program penyuluhan pertanian;
7. Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
8. Program standardisasi dan perlindungan konsumen;
9. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan;
10. Program pengendalian izin usaha industri;
11. Program pengelolaan sistem informasi industri nasional;
12. Program perencanaan dan pembangunan industri;



13. Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
14. Program pengelolaan perikanan tangkap;
15. Program pengelolaan perikanan budidaya;
16. Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
17. Program Pemasaran Pariwisata;
18. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata;
19. Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual;
20. Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
21. Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan;
22. Program perekonomian dan pembangunan;
23. Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
24. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis Peningkatan Kontribusi PDRB Sektor Non Pertambangan dan Penggalian dengan pagu anggaran Rp 32.607.717.008,88, terealisasi Rp 23.161.137.480,00 sehingga capaian realisasi anggaran 71,03%. Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis ini sebesar 144,19 %, maka efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar 50,74 %. Jika rasio efisien -20 % sampai 20 %, maka penggunaan anggaran sasaran strategis ini berada dalam kategori tidak efisien sehingga dibutuhkan evaluasi dalam menentukan target yang realistis di dalam perencanaan.

Tabel 3.19 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis Peningkatan Kontribusi PDRB Sektor Non Pertambangan dan Penggalian

Sasaran Strategis/ Indikator/ Program		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	% Efisiensi
Peningkatan Kontribusi PDRB Sektor Non Pertambangan dan Penggalian		32.607.717.008,88	23.161.137.480,00	71,03	144,19	50,74
LPE Non Pertambangan dan Penggalian						
1	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	361.936.482,00	214.586.500,00			



Sasaran Strategis/ Indikator/ Program		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	% Efisiensi
2	Program Perizinan Usaha Pertanian	32.168.020,00	31.737.220,00			
3	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	12.314.587.768,00	8.179.379.430,00			
4	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.633.093.478,00	1.222.968.339,00			
5	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	174.298.422,00	158.767.323,00			
6	Program Penyuluhan Pertanian	797.422.235,00	752.233.494,00			
7	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	186.416.006,00	135.954.700,00			
8	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	19.734.170,00	17.900.000,00			
9	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.554.629.386,00	1.083.132.727,00			
10	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	5.100.000,00	5.020.000,00			
11	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	2.821.000,00	2.660.000,00			
12	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	2.173.723.805,88	848.918.637,00			
13	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	78.161.002,00	64.868.555,00			
14	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	2.289.539.135,00	1.864.298.673,00			
15	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	6.723.833.848,00	4.520.651.689,00			
16	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	417.546.580,00	404.793.801,00			
17	Program Pemasaran Pariwisata	2.019.838.195,00	1.996.766.164,00			
18	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	408.980.124,00	350.784.688,00			
19	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	9.583.600,00	8.670.000,00			



Sasaran Strategis/ Indikator/ Program		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	% Efisiensi
20	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	302.611.400,00	269.345.900,00			
21	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	189.332.950,00	187.828.073,00			
22	Program Perekonomian dan Pembangunan	688.242.633,00	626.265.557,00			
23	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	13.738.250,00	13.610.000,00			
24	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	210.378.519,00	199.996.010,00			

SASARAN 11

Optimalisasi Capaian Investasi/ Penanaman Modal di Daerah

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2024	2025			Target Akhir RPD (2026)	Capaian 2025 Terhadap Target Akhir RPD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
4.11.1	Nilai Realisasi PMDN dan PMA	Rp 3.705.197.869.077	1.053.366.000.000	1.659.150.735.922	157,51	1.068.366.000.000	155,30
Rata-rata Capaian Kinerja					157,51		155,30

4.11.1. Nilai Realisasi PMDN dan PMA

Tabel 3.20 Nilai Investasi Tahun 2021 - 2025

Tahun	Nilai Investasi		Jumlah Investasi (Rp)
	PMA (Rp)	PMDN (Rp)	
Tahun 2021	23.400.880.000	404.886.000.000	428.286.880.000
Tahun 2022	141.577.097.948	1.253.095.900.000	1.394.672.997.948
Tahun 2023	54.037.760.000	852.128.300.000	906.166.060.000
Tahun 2024	811.634.357.488	2.893.563.511.589	3.705.197.869.077
Tahun 2025	260.311.477.537	1.398.839.258.385	1.659.150.735.922

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu Kab. Pnjam Paser Utara, 2026

Investasi di Kabupaten Penajam Paser Utara masih didominasi oleh investasi dalam negeri (PMDN) dan didominasi oleh sektor infrastruktur dan jasa. Nilai investasi PMA sebesar Rp 260.311.477.537,00 dan PMDN sebesar Rp 1.398.839.258.385,00 dengan total investasi sebesar Rp 1.659.150.735.922,00, nilai ini mengalami penurunan investasi sebesar Rp 2.046.047.133.155,00 atau 55,22 % jika dibandingkan tahun 2024 dengan investasi sebesar Rp 3.705.197.869.077,00-. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya aktivitas investasi di wilayah Ibukota Negara (IKN).

Nilai Realisasi PMDN dan PMA tahun 2025 telah melebihi target yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 157,51 %. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD tahun 2026, Nilai Realisasi PMDN dan PMA tahun 2025 telah melampaui target, dimana capaian kinerjanya mencapai 155,30 %.



Strategi ke depan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Nilai Realisasi PMDN dan PMA, antara lain:

- a. Mengoptimalkan sumber investasi;
- b. Meningkatkan infrastruktur
- c. Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk berinvestasi;
- d. Meningkatkan promosi penanaman modal;
- e. Meningkatkan pemberdayaan UMKM.

Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis Optimalisasi Capaian Investasi/ Penanaman Modal Investor di Daerah, yaitu:

1. Program pengembangan iklim penanaman modal;
2. Program promosi penanaman modal;
3. Program pelayanan penanaman modal;
4. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
5. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis Optimalisasi Capaian Investasi/ Penanaman Modal Investor di Daerah dengan pagu anggaran Rp 407.946.972,00 terealisasi Rp 370.206.950,00 sehingga capaian realisasi anggaran 90,75 %. Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis ini sebesar 157,51 %, maka efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar 42,39 %. Jika rasio



efisien -20 % sampai 20 %, maka penggunaan anggaran sasaran strategis ini berada dalam kategori tidak efisien sehingga dibutuhkan evaluasi dalam menentukan target yang lebih realistis di dalam perencanaan.

**Tabel 3.21 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis
Optimalisasi Capaian Investasi/ Penanaman Modal Investor di Daerah**

Sasaran Strategis/ Indikator/ Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	% Efisiensi
Optimalisasi Capaian Investasi/ Penanaman Modal Investor di Daerah	407.946.972,00	370.206.950,00	90,75	157,51	42,39
Nilai Realisasi PMDN dan PMA					
1 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	37.926.981,00	33.830.646,00			
2 Program Promosi Penanaman Modal	8.424.000,00	8.412.578,00			
3 Program Pelayanan Penanaman Modal	129.671.076,00	116.924.386,00			
4 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	199.750.671,00	181.854.940,00			
5 Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	32.174.244,00	29.184.400,00			

Tujuan 5

Peningkatan Pelayanan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2024	2025			Target Akhir RPD (2026)	Capaian 2025 Terhadap Target Akhir RPD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
5.1	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	71,1	67 (Cukup)	89,39 (Sangat Baik)	133,42	70 (Cukup)	127,70
5.2	Persentase Penurunan Emisi GRK	38	24,40	-186,36	-763,77	25,50	-730,82
Rata-rata Capaian Kinerja					-315,18		-301,56

5.1. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas Pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah

Kabupaten Penajam Paser Utara. Infrastruktur dasar pada umumnya terdiri dari infrastruktur Listrik, telekomunikasi, jalan, sanitasi, air bersih, dan drainase. Ketersediaan infrastruktur dasar yang optimal dapat mendukung dan meningkatkan akses masyarakat dalam menjangkau sumber daya yang dapat meningkatkan produktivitas kegiatan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.

Infrastruktur air bersih di Kabupaten Penajam Paser Utara sebagian besar dilayani oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dimana cakupan pelayanannya belum menjangkau seluruh wilayah khususnya wilayah pedesaan yang terpencil.

Infrastruktur jalan di Kabupaten Penajam Paser Utara juga belum memadai, dimana persentase jalan dalam kondisi baik sampai dengan tahun 2025 hanya sebesar 37,33 %, sisanya merupakan jalan kondisi sedang, rusak ringan, dan rusak berat.

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur ini merupakan indikator yang diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat atas seluruh layanan yang diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dari target Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur 67 dapat terealisasi 89,39 sehingga capaian kinerjanya 133,42 % dengan kategori Sangat Memuaskan. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD tahun 2026, Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur di tahun 2025 sudah mencapai 127,70 %.

5.2. Persentase Penurunan Emisi GRK

Emisi GRK adalah pelepasan gas-gas yang mempunyai potensi untuk menyebabkan peningkatan efek rumah kaca di atmosfer bumi. Gas Rumah Kaca (GRK) menyebabkan peningkatan suhu rata-rata di bumi.

Data Emisi GRK yang disajikan di dalam laporan ini adalah data Emisi GRK tahun 2024 karena data Emisi GRK tahun 2025 belum dapat dirilis. Jumlah emisi GRK di tahun 2024 sebanyak 3.314,08 Gg mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebanyak 1.157,32 Gg, sehingga persentasenya sebesar -763,77 %. Kenaikan emisi GRK di tahun 2024 ini disebabkan oleh minimnya pelaksanaan penginputan data pada aplikasi Signmart terutama pada sektor kehutanan yaitu data tutupan lahan.

Upaya yang dapat dilakukan untuk menurunkan EMisi GRK, antara lain:

1. Pengelolaan lahan yang berkelanjutan, dengan cara konservasi tanah dan air melalui terasering serta vegetasi penutup untuk menjaga kelembapan tanah dan mencegah erosi; pembatasan konversi lahan gambut;
2. Pengelolaan sampah yang tepat;



3. Memberi kesadaran kepada masyarakat tentang optimalisasi penggunaan pupuk;
4. Rehabilitasi dan restorasi lahan.

SASARAN 12

Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2024	2025			Target Akhir RPD (2026)	Capaian 2025 Terhadap Target Akhir RPD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
5.12.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,1	71,85	77,76	108,23	71,96	108,06
Rata-rata Capaian Kinerja					108,23		108,06

5.12.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu.

Tujuan disusunnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah:

1. Memberikan Informasi kepada para pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan tingkat nasional dan daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program-program pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Indikator yang digunakan dalam perhitungan IKLH adalah :

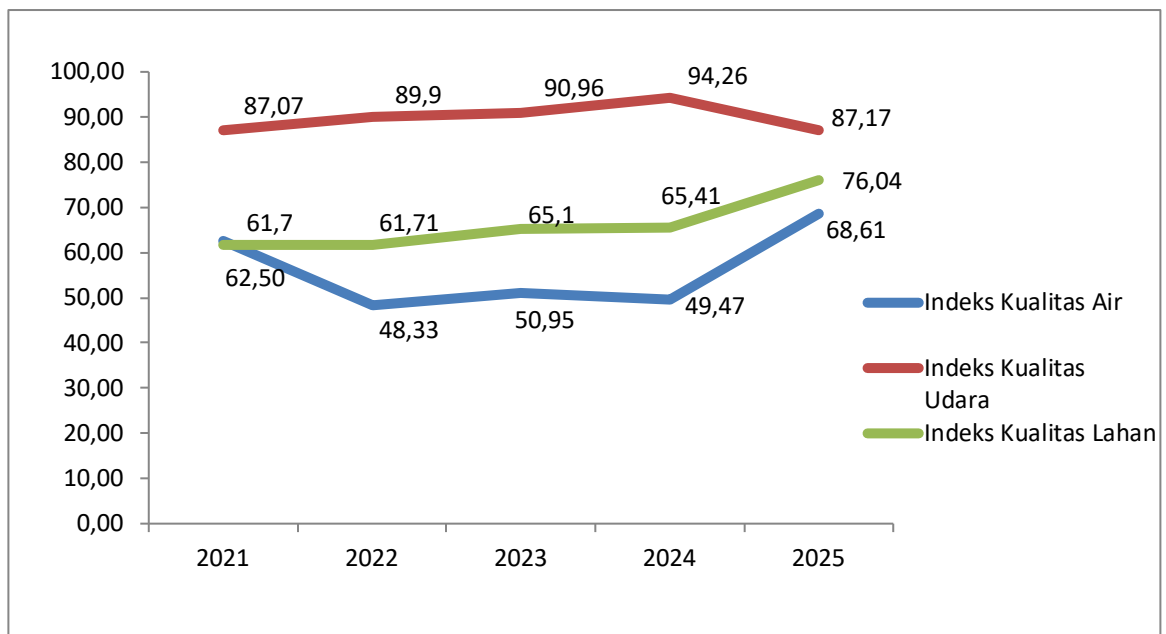
1. Indeks Kualitas/ Pencemaran Air
2. Indeks Kualitas/ Pencemaran Udara
3. Indeks Kualitas Lahan

Kategori Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, sebagai berikut:

Tabel 3.22 Kategori IKA, IKU, IKL

Angka Rentang	Kategori
$90 \leq x \leq 100$	Sangat Baik
$70 \leq x < 90$	Baik
$50 \leq x < 70$	Sedang
$25 \leq x < 50$	Kurang
$0 \leq x < 25$	Sangat Kurang

**Grafik 3.30 Indeks Kualitas Air, Udara, dan Tutupan Lahan
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 - 2025**



Indeks Kualitas Air (IKA) adalah sebuah parameter yang digunakan untuk mengetahui secara umum terhadap baku mutu air. Pengambilan *sample* air biasanya dilakukan terhadap air permukaan, seperti sungai, danau dan air permukaan lainnya yang biasa digunakan masyarakat.

IKA Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025 tergolong dalam tercemar sedang dengan indeks sebesar 68,71, meningkat jika dibandingkan tahun 2024 dengan indeks 49,47. IKA masih tergolong tercemar sedang ini dapat terjadi karena adanya indikasi penurunan kualitas sungai yang dilakukan pemantauan dan terbatasnya jumlah parameter uji yang dianalisa.

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Indeks Kualitas Air, yaitu:

- Meningkatkan peran dunia usaha dalam pelaksanaan pembuangan air limbah ke badan air sesuai dengan perizinan dengan mempertimbangkan alokasi beban pencemar;



- b. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik dan USK khususnya untuk masyarakat;
- c. Meningkatkan pengawasan terhadap pembuangan air limbah USK atau limbah domestik;
- d. Meningkatkan koordinasi dalam perencanaan, penyiapan data dan upaya antara pusat dan daerah.

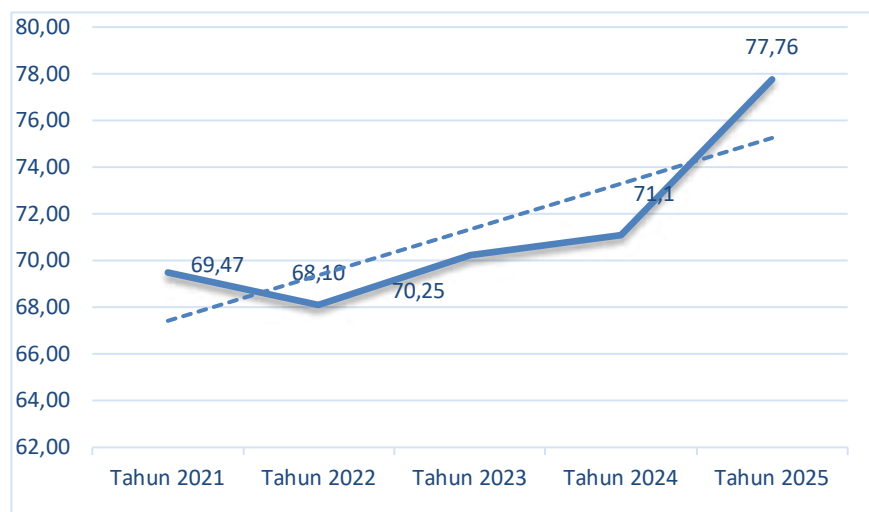
Indeks Kualitas Udara (IKU) yaitu untuk mengetahui kualitas udara yang ada dalam suatu wilayah. Nilai IKU yang semakin tinggi menandakan bahwa kualitas udara di suatu daerah semakin baik, dan begitu pula sebaliknya. IKU Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2025 sebesar 87,17 tergolong Baik. IKU Tahun 2025 mengalami penurunan jika dibanding tahun 2024 dengan IKU 94,26.

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Indeks Kualitas Udara, yaitu:

- a. Melakukan pemantauan kualitas udara dan meningkatkan pengawasan ke sumber pencemar;
- b. Meningkatkan peran serta masyarakat dan *stakeholder* dalam program pengendalian pencemaran udara;
- c. Meningkatkan inovasi dan publikasi ke media terkait program pengendalian pencemaran udara.

Indeks Kualitas Lahan (IKL) merupakan nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambutan Lahan. IKL tahun 2025 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2024, dari IKL 65,41 menjadi 76,04 di tahun 2025.

Grafik 3.31 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 - 2025



IKLH Kabupaten Penajam Paser Utara, empat tahun terakhir mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2025 IKLH Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 77,76 dari target yang ditetapkan 71,85 sehingga capaian kinerjanya sebesar 108,23 atau kategori kinerja Sangat Memuaskan. Nilai IKLH meningkat sebanyak 6,66 poin dari nilai tahun 2024. Peningkatan IKLH ini menggambarkan bahwa semakin baik kondisi lingkungan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD tahun 2026 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2025 sudah mencapai target akhir RPD dengan capaian kinerja sebesar 108,06 %.



Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, antara lain:

1. Meningkatkan Pengelolaan Kualitas Udara
 - Mengendalikan emisi dari kendaraan bermotor dengan uji emisi;
 - Mengawasi emisi industri melalui standar dan teknologi pengendalian polusi.
2. Memperbaiki Pengelolaan Kualitas Air
 - Membangun dan meningkatkan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk rumah tangga dan industri;
 - Memperketat pengawasan terhadap industri;
 - Melakukan rehabilitasi sungai dan menjaga daerah resapan air.
3. Melindungi dan Memulihkan Tutupan Lahan
 - Melaksanakan program reboisasi dan penghijauan di lahan kritis;
 - Melindungi hutan dari penebangan liar dan alih fungsi lahan yang tidak terkendali;
 - Mengembangkan kawasan konservasi dan ruang terbuka hijau di perkotaan.
4. Pengelolaan Sampah yang Berkelanjutan
 - Mendorong pengurangan sampah melalui prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle);
 - Mengembangkan sistem pengelolaan sampah terpadu dan bank sampah;
 - Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai.
5. Penegakan Hukum Lingkungan
 - Memberikan sanksi tegas terhadap pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - Memperketat izin lingkungan bagi industri dan proyek pembangunan;
 - Meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan.
6. Edukasi dan Partisipasi Masyarakat



- Melibatkan masyarakat dalam program penghijauan, pengelolaan sampah, dan konservasi;
- Mendorong gaya hidup ramah lingkungan;
- Memberikan insentif bagi industri yang menerapkan teknologi ramah lingkungan.

Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, yaitu :

1. Program pengelolaan persampahan;
2. Program penanganan pengaduan lingkungan hidup;
3. Program perencanaan lingkungan hidup;
4. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
5. Program pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati);
6. Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3);
7. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
8. Program pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH;
9. Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat;
10. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.



Kawasan Hutan Kota

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dengan pagu anggaran Rp 11.867.771.925,00 terealisasi Rp 9.950.931.991,00 sehingga capaian realisasi anggaran 83,85 %. Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis ini sebesar 108,23 %, maka efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar 22,53 %. Jika rasio efisien -20 % sampai 20 %, maka efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar 22,53 %.



maka penggunaan anggaran sasaran strategis ini berada dalam kategori tidak efisien sehingga dibutuhkan evaluasi dalam menentukan target yang lebih realistis di dalam perencanaan.

**Tabel 3.23 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**

Sasaran Strategis/ Indikator/ Program		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	% Efisiensi
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		11.867.771.925,00	9.950.931.991,00	83,85	108,23	22,53
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup						
1	Program Pengelolaan Persampahan	6.920.020.254,00	5.827.839.192,00			
2	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	33.903.440,00	27.512.625,00			
3	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	15.567.100,00	14.499.840,00			
4	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	468.149.228,00	462.950.232,00			
5	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	4.203.847.868,00	3.400.318.855,00			
6	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	10.414.000,00	10.374.800,00			
7	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	48.696.150,00	46.944.200,00			
8	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	6.503.000,00	6.237.345,00			
9	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	145.176.735,00	139.044.928,00			
10	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	15.494.150,00	15.209.974,00			



SASARAN 13

Peningkatan Ketahanan Kebencanaan

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2024	2025			Target Akhir RPD (2026)	Capaian 2025 Terhadap Target Akhir RPD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
5.13.1	Indeks Risiko Bencana	131,81	120,66	88,54	136,28	120,66	136,28
Rata-rata Capaian Kinerja					136,28		136,28

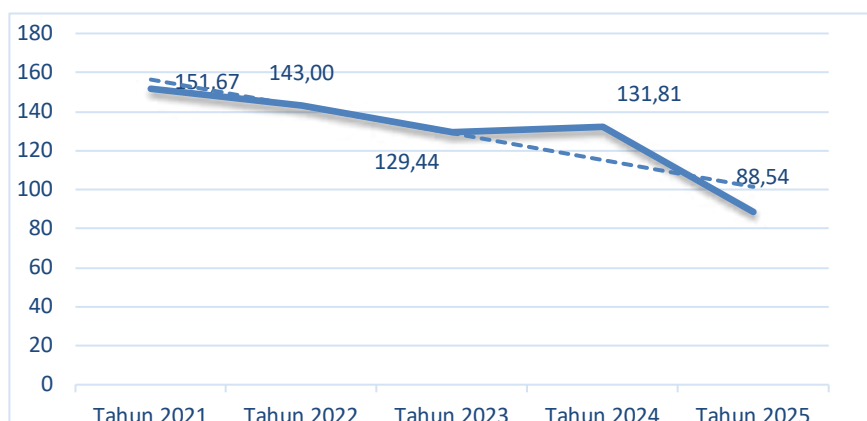
5.13.1. Indeks Risiko Bencana

Indeks Risiko Bencana adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat risiko bencana suatu wilayah. Indeks Risiko Bencana ditentukan oleh nilai indeks bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Semakin tinggi (naik) nilai Indeks Risiko Bencana berarti menggambarkan bahwa upaya mitigasi risiko dan perbaikan manajemen bencana oleh pemerintah semakin rendah, dan sebaliknya semakin rendah (turun) Indeks Risiko Bencana, maka menunjukkan bahwa upaya mitigasi risiko dan perbaikan manajemen bencana semakin baik.

Indeks Risiko Bencana Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2025 ditargetkan 120,66 terealisasi 88,54 dengan capaian kinerja sebesar 136,28 % atau dalam kategori capaian kinerja Sangat Memuaskan. Indeks Risiko Bencana tahun 2025 menurun jika dibandingkan dengan tahun 2024. Penurunan indeks ini menggambarkan bahwa tingkat risiko bencana di Kabupaten Penajam Paser Utara menurun. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD 2026, Indeks Risiko Bencana tahun 2025 mencapai 136,28 %.

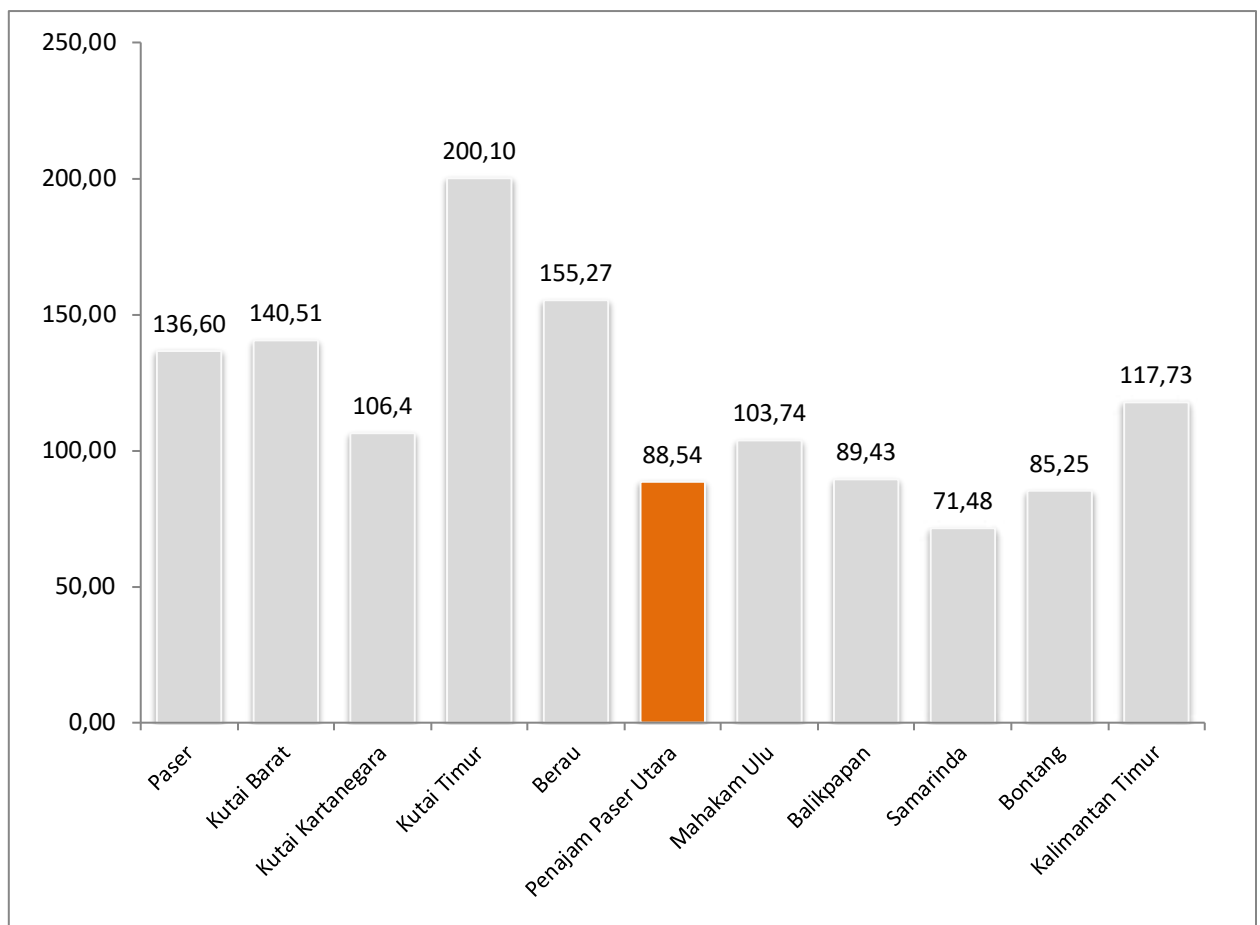


Grafik 3.32 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 - 2025



Dari grafik di atas terlihat tren Indeks Risiko Bencana yang turun, sehingga dapat dikatakan bahwa Kabupaten Penajam Paser Utara telah berhasil mengurangi atau menekan risiko bencana. Jika dibandingkan dengan kabupaten/ kota seKalimantan Timur, Indeks Risiko Bencana Kabupaten Paser Utara berada pada urutan terendah kedua. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat risiko, ancaman, dan potensi dampak negatif akibat bencana di Kabupaten Penajam Paser Utara lebih rendah pada urutan kedua dibanding kabupaten/ kota seKalimantan Timur.

Grafik 3.33 Indeks Risiko Bencana Kabupaten/ Kota seKalimantan Timur, Prov. Kalimantan Timur Tahun 2025



Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Nasional, 2026

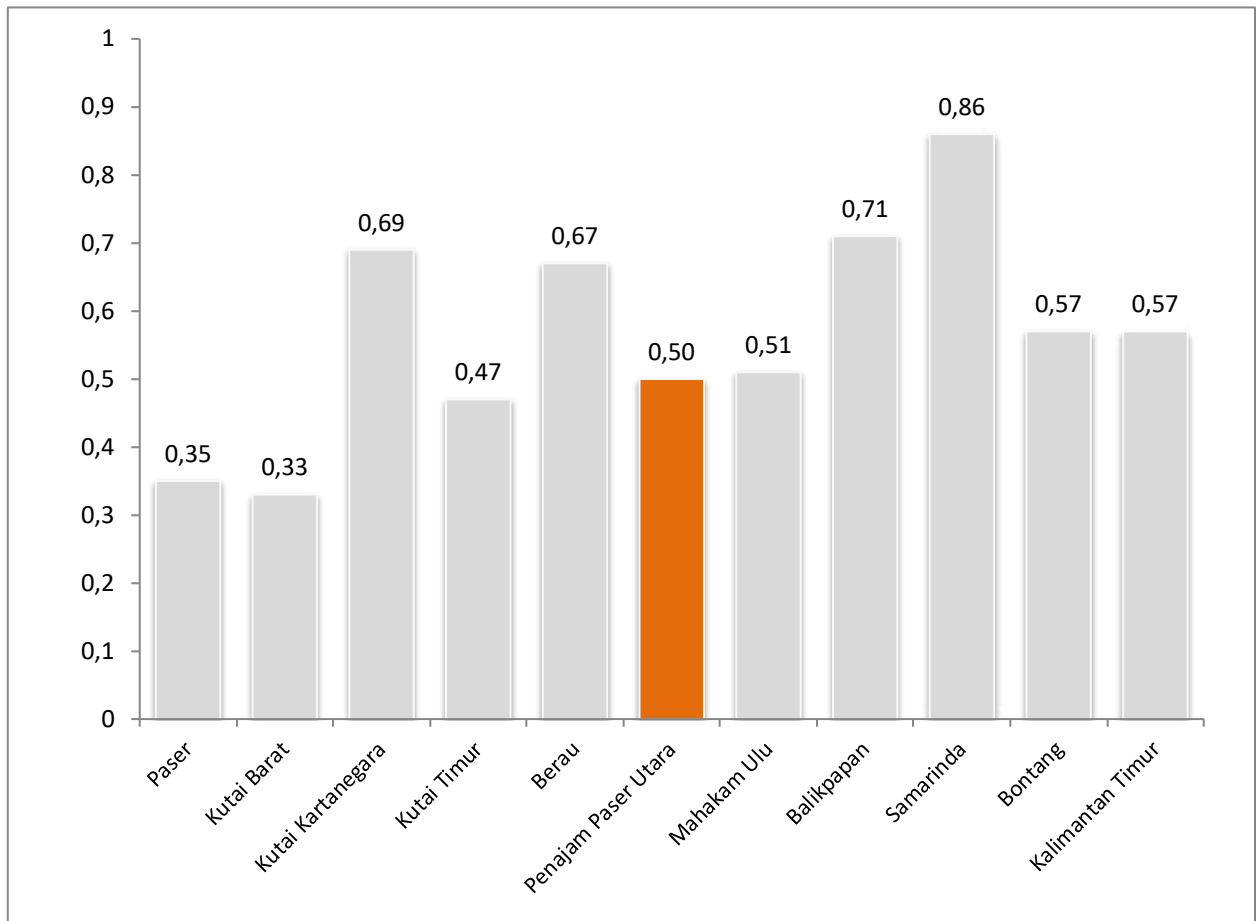
Beberapa upaya yang telah dilakukan dan akan ditingkatkan di tahun depan untuk menurunkan Indeks Risiko Bencana, antara lain:

1. Peningkatan Kapasitas Daerah dalam penanggulangan bencana;
2. Peningkatan pelayanan informasi kebencanaan melalui pemanfaatan teknologi informasi berbasis webGIS;
3. Peningkatan kapasitas desa tangguh bencana;



4. Menghidupkan kembali fungsi hutan;
5. Memberikan sosialisasi dan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat;
6. Terus aktif dalam pencegahan dan mitigasi bencana dengan melakukan peninjauan lapangan, dan koordinasi lintas sektor.

Grafik 3.34 Indeks Kapasitas Daerah Kabupaten/ Kota seKalimantan Timur, Prov. Kalimantan Timur Tahun 2025



Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Nasional, 2026

Semakin tinggi nilai Indeks Kapasitas Daerah, maka semakin tinggi ketahanan atau ketangguhan suatu daerah dalam menghadapi, merespons, dan mengelola risiko bencana. Hal ini juga berbanding terbalik dengan risiko bencana, yang berarti semakin tinggi kapasitas, semakin rendah risiko dampak negatif yang ditimbulkan oleh bencana. Indeks Kapasitas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2025 sebesar 0,50 (kategori sedang) meningkat jika dibandingkan tahun 2024 dengan IKD sebesar 0,50. Nilai IKD Kabupaten Penajam Paser Utara berada pada urutan ke-7 tertinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota seKalimantan Timur.



Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis Peningkatan Ketahanan Kebencanaan, yaitu :

1. Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum;
2. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran;
3. Program Penanggulangan Bencana.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis Peningkatan Ketahanan Kebencanaan dengan pagu anggaran Rp 1.773.429.601,00 terealisasi Rp 1.557.366.946,00 sehingga capaian realisasi anggaran 87,82 %. Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis ini sebesar 136,28 %, maka efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar 35,56 %. Jika rasio efisien -20 % sampai 20 %, maka penggunaan anggaran sasaran strategis ini berada dalam kategori tidak efisien sehingga dibutuhkan evaluasi dalam menentukan target yang lebih realistis di dalam perencanaan.

Tabel 3.24 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis Peningkatan Ketahanan Kebencanaan

Sasaran Strategis/ Indikator/ Program		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	% Efisiensi
Peningkatan Ketahanan Kebencanaan		1.773.429.601,00	1.557.366.946,00	87,82	136,28	35,56
Indeks Risiko Bencana						
1	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	723.840.782,00	716.203.971,00			
2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	995.866.243,00	788.054.455,00			
3	Program Penanggulangan Bencana	53.722.576,00	53.108.520,00			



SASARAN 14**Peningkatan Pelayanan Infrastruktur**

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2024	2025			Target Akhir RPD (2026)	Capaian 2025 Terhadap Target Akhir RPD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
5.14.1	Persentase Pemenuhan Rumah Layak Huni	64,23 %	65,00	65,59	100,91	67	97,90
5.14.2	Persentase Jalan Mantap	33,38 %	30,00	41,94	139,80	32	131,06
Rata-rata Capaian Kinerja					120,35		114,48

5.14.1. Persentase Pemenuhan Rumah Layak Huni

Rumah Layak Huni (RLH) adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehaan, dan kecukupan luas bangunan. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara terus berupaya menyediakan RLH bagi masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara yang memiliki Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), khususnya bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program pemerintah daerah.

Jumlah RTLH di Kabupaten Penajam Paser Utara menurut data e-RTLH sebanyak 3.868 unit. Dari 3.868 unit RTLH telah dilakukan penanganan sebanyak 2.537 unit sampai dengan tahun 2025. Di tahun 2025 dilakukan penanganan 335 unit. Penanganan RTLH selain bersumber dari dana APBD Kabupaten Penajam Paser Utara, dan melalui Program Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni dari APBD Provinsi Kalimantan Timur, Program Bantuan Stimultan Perumahan Swadaya dari APBN, serta melalui CSR.

Persentase Pemenuhan RLH tahun 2025 ditargetkan 65,00 %, terealisasi 65,59 % dengan capaian kinerja sebesar 100,91 % atau dengan kategori capaian Sangat Memuaskan. Realisasi Persentase Pemenuhan RLH tahun 2025 meningkat jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024. Namun, jumlah penanganan RTLH di tahun 2025 sebanyak 335 unit menurun jika dibandingkan dengan tahun 2024 dengan jumlah penanganan RTLH sebanyak 384 unit. Realisasi tahun 2025 ini telah mencapai 97,90 % dari target akhir RPD tahun 2026 (67 %).

Strategi ke depan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Persentase Pemenuhan Rumah Layak Huni, antar lain:

1. Memberikan bantuan stimulan untuk meningkatkan kualitas RTLH;
2. Memfasilitasi alternatif pembiayaan perumahan;
3. Meningkatkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.

5.14.2. Persentase Jalan Mantap

Jalan Kondisi Baik/ Mantap adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi baik menurut kriteria teknis.

Panjang jalan di seluruh wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2025 tercatat sepanjang 1.179,49 km. Jalan tersebut terdiri dari jalan negara sepanjang 140,52 km, jalan provinsi sepanjang 7,58 km, dan jalan kabupaten sepanjang 1.031,39 km.

Kondisi jalan di Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2025 masih didominasi oleh ruas dengan kategori rusak berat. Dari 1.031,39 Km panjang jalan kabupaten, 37,33 % panjang jalan dengan kondisi jalan baik r 33,38 %, sedangkan 62,67 % lainnya masih termasuk kondisi jalan sedang, rusak, dan rusak berat. Dari target 30,00 % Persentase Jalan Mantap yang ditetapkan, terealisasi 41,04 % sehingga capaian kinerjanya sebesar 139,80 % atau dalam kategori kinerja Sangat Memuaskan. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD tahun 2026 Persentase Jalan Mantap tahun 2025 telah mencapai target dengan capaian sebesar 131,06 %.



Tabel 3.25 Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Penajam Paser Utara (Km) Tahun 2021 - 2025

Kondisi	2021	2022	2023	2024	2025
1. Baik	439,20	328,74	285,72	296,40	385,01
2. Sedang	471,78	149,60	49,90	68,52	38,68
3. Rusak	227,52	103,10	9,54	24,38	6,73
4. Rusak Berat	102,80	662,36	686,23	642	600,96
Total	1.241,29	2.275,19	1.031,39	1.031,4	1.031,39

Berdasarkan kondisi infrastruktur jalan tersebut perlu diupayakan untuk meningkatkan kondisi jalan menjadi kondisi baik karena untuk mendorong kegiatan perekonomian membutuhkan aksesibilitas antar wilayah. Peningkatan kondisi jalan semestinya dapat ditingkatkan melalui keberadaan UPT. PU yang ada di setiap kecamatan.



UPT. PU membantu mewujudkan kehadiran pemerintah dalam penyediaan pelayanan publik pada sektor infrastruktur bagi masyarakat, seperti pembangunan prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, pengelolaan sumber daya air, dan lain sebagainya.

Strategi ke depan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Persentase Jalan Mantap, antara lain:

- a. Meningkatkan percepatan pembangunan infrastruktur jalan;
- b. Meningkatkan pengelolaan, pemeliharaan rutin, dan rekonstruksi jalan;
- c. Melakukan survei kondisi jalan untuk mengetahui kondisi perkerasan, kerusakan, dan tipe perkerasan dengan memperhatikan faktor-faktor seperti beban lalu lintas, kondisi tanah, dan iklim.

Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis Peningkatan Pelayanan Infrastruktur, yaitu :

1. Program Pengembangan Perumahan;
2. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh;
3. Program Kawasan Permukiman;
4. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi;
5. Program Penyelenggaraan Jalan;
6. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
7. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
8. Program Pengelolaan Pelayaran;
9. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
10. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
11. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
12. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya;
13. Program Penataan Bangunan Gedung.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis Peningkatan Pelayanan Infrastruktur dengan pagu anggaran Rp 39.866.107.549,06 terealisasi Rp 31.068.078.384,00 sehingga capaian realisasi anggaran 77,93%. Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis ini sebesar 120,35 %, maka efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar 35,25 %. Jika rasio efisien -20 % sampai 20 %, maka penggunaan anggaran sasaran strategis ini berada dalam kategori tidak efisien sehingga



dibutuhkan evaluasi dalam menyusun perencanaan sehingga tidak terjadi input yang tidak digunakan secara proporsional.

**Tabel 3.26 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis
Peningkatan Pelayanan Infrastruktur**

Sasaran Strategis/ Indikator/ Program		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	% Efisiensi
Peningkatan Pelayanan Infrastruktur		39.866.107.549,06	31.068.078.384,00	77,93	120,35	35,25
	Persentase Pemenuhan Rumah Layak Huni					
	Persentase Jalan Mantap					
1	Program Pengembangan Perumahan	2.470.198.951,00	2.282.363.670,00			
2	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	2.518.144.600,00	2.508.069.750,00			
3	Program Kawasan Permukiman	1.993.785.970,00	1.975.725.930,00			
4	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	277.894.400,00	241.922.887,00			
5	Program Penyelenggaraan Jalan	310.564.321.732,00	290.954.457.594,00			
6	Program Pengembangan Perumahan	8.486.493.245,00	5.707.216.197,00			
7	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	2.263.060.608,00	1.528.480.830,00			
8	Program Kawasan Permukiman	1.387.107.652,00	663.638.041,00			
9	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	35.721.080,00	34.698.442,00			
10	Program Penyelenggaraan Jalan	15.992.492.811,00	15.025.274.691,00			
11	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	500.000.000,00	448.602.358,00			
12	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	678.783.000,00	287.087.534,00			
13	Program Pengelolaan Pelayanan	353.767.919,20	142.836.207,00			

Secara umum seluruh tujuan dan sasaran yang ada di tahun 2024 dapat dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan pada masing-masing indikator. Dari 5 tujuan dan 14 sasaran yang ada, tercapai dengan rentang capaian kinerja sasaran bervariasi. Rata-rata nilai capaian kinerja sasaran sebesar 382,83 persen dengan interpretasi **"sangat memuaskan"**. Demikian juga dengan capaian kinerja tahun 2024 terhadap target akhir RPD tahun 2026, tercapai dengan **"sangat memuaskan"** dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 359,75.



Perolehan rata-rata nilai kinerja tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.27 Perolehan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2025

Tujuan/ Sasaran		% Capaian	Interpretasi	2025 Terhadap Target Akhir RPD
Tujuan 1. Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Pemerataan Kesejahteraan		90,69	Sangat Memuaskan	97,24
1	Peningkatan Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial Kepada Masyarakat Miskin dan Rentan	207,24	Sangat Memuaskan	99,06
2	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-
3	Perluasan Kesempatan Kerja serta Peningkatan Kapasitas dan Perlindungan Tenaga Kerja	46,95	Kurang	45,77
Tujuan 2. Meningkatkan Kualitas Hidup SDM		101,09	Sangat Memuaskan	101,09
4	Peningkatan Kualitas Pendidikan	94,96	Sangat Memuaskan	91,20
5	Peningkatan Kualitas Kesehatan	95,42	Sangat Memuaskan	91,80
6	Peningkatan Kualitas Kehidupan Keluarga Sejahtera dan Responsif Gender	99,63	Sangat Memuaskan	99,29
7	Peningkatan Kualitas Pembangunan Kebudayaan dan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Kepemudaan yang Berwawasan Kebangsaan	157,78	Sangat Memuaskan	129,09
Tujuan 3. Meningkatkan Standar Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		109,89	Sangat Memuaskan	108,38
8	Penguatan Birokrasi yang Efektif dan Efisien	117,24	Sangat Memuaskan	111,38
9	Peningkatan Pelayanan Prima Kepada Publik	99,79	Sangat Memuaskan	95,15
Tujuan 4. Peningkatan Transformasi Ekonomi yang Berdaya Saing		65,2	Baik	65,2
10	Peningkatan Kontribusi PDRB Sektor Non Pertambangan dan Penggalian	144,19	Sangat Memuaskan	143,89
11	Optimalisasi Capaian Investasi/ Penanaman Modal di Daerah	157,51	Sangat Memuaskan	155,3
Tujuan 5. Peningkatan Pelayanan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan		-315,18	Sangat Kurang	-301,56
12	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	108,23	Sangat Memuaskan	108,06
13	Peningkatan Ketahanan Kebencanaan	136,28	Sangat Memuaskan	136,28
14	Peningkatan Pelayanan Infrastruktur	120,35	Sangat Memuaskan	114,48
Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan		-9,88	Sangat Kurang	14,07
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran		121,97	Sangat Memuaskan	109,29

Laporan Kinerja ini selain menyajikan capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja 2025, juga menyajikan capaian indikator kinerja



tujuan dan sasaran tahun 2025 berdasarkan RPJMD tahun 2025-2029. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa Perjanjian Kinerja Tahun 2025 masih berdasarkan RPD Tahun 2024 – 2026 sehingga dianggap perlu untuk menyajikan capaian kinerja yang berdasarkan RPJMD 2025 – 2029. Indikator yang sama dimana telah disajikan analisisnya sebelumnya, selanjutnya hanya akan menyajikan informasi tentang capaian indikator tersebut terhadap target tahun 2025 dan terhadap target akhir RPJMD tahun 2029.

Tabel 3.28 Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029

 Indikator Kinerja		 Target	 Realisasi	 % Realisasi
1	Indeks Pembangunan Manusia	75,00	75,82	101,09
2	Rata-Rata Lama Sekolah	8,59	8,72	101,51
3	Harapan Lama Sekolah	12,92	13,00	100,62
4	Rapor Pendidikan	74,09	74,09	100,00
5	Usia Harapan Hidup	74,51	74,60	100,12
6	Indeks Ketimpangan Gender	0,460	0,474	97,05
7	Indeks Harmoni Indonesia	7,00	-	-
8	Laju Pertumbuhan Ekonomi	7,00	6,52	93,14
9	Indeks Gini	0,256	0,319	80,25
10	Kontribusi Pertanian Terhadap PDRB (Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan)	15,89	12,76	80,30
11	Nilai Investasi	1.053.000.000.000	1.515.050.180.453	143,88
12	Tingkat Kemiskinan	4,40	5,78	76,12
13	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,02	4,26	47,42
14	Indeks Ketahanan Pangan	88,61	75,40	85,09
15	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	7,65	6,71	87,71
16	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,31	77,76	101,90
17	Indeks Risiko Bencana	123,81	88,54	139,84
18	Indeks Reformasi Birokrasi	69,80	70,36	100,80
19	Nilai AKIP Pemerintah Daerah	64,00	61,14	95,53
20	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	55	81,545	148,26
21	Survei Penilaian Integritas KPK	62	71,80	115,81
22	Indeks Pelayanan Publik	3,76	4,23	112,50
23	Indeks Pemerintah Digital	2,90	3,28	113,10
Rata - rata				96,61

Tujuan 1

Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2024	2025			Target Akhir RPJMD (2029)	Capaian 2025 Terhadap Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.1	Indeks Pembangunan Manusia	74,94	75,00	75,82	101,09	76,97	98,51
Rata-rata Capaian Kinerja					101,09		98,51

1.1. Indeks Pembangunan Manusia

Target Indeks Pembangunan Manusia tahun 2025 sebesar 75,00 terealisasi 75,82 sehingga capaian kinerjanya sebesar 101,09. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2029, Indeks Pembangunan Manusia telah tercapai 98,51 %. Informasi lebih lengkap tentang Indeks Pembangunan Manusia telah disajikan sebelumnya pada Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun 2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

SASARAN 1

Meningkatnya Akses dan Mutu Pembangunan

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2024	2025			Target Akhir RPJMD (2029)	Capaian 2025 Terhadap Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.1.1	Rata-rata Lama Sekolah	8,57	8,59	8,72	101,51	8,69	100,35
1.1.2	Harapan Lama Sekolah	12,87	12,92	13,00	100,62	13,17	98,71
1.1.3	Rapor Pendidikan	73,61	74,09	74,09	100,00	81	91,47
Rata-rata Capaian Kinerja					100,71		96,84

1.1.1. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah tahun 2025 di Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 8,72 tahun dari target 8,59, sehingga capaian kinerjanya sebesar 101,51 %. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2029 sebesar 8,69, Rata-rata Lama Sekolah tahun 2025 telah melebihi target akhir RPJMD.

1.1.2. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah tahun 2025 di Kabupaten Penajam Paser Utara melebihi dari yang ditargetkan 12,92 terealisasi 13,00 tahun, sehingga diperoleh capaian kinerja 100,62 %. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2029 Harapan Lama Sekolah selama 13,17 tahun, realisasi tahun 2025 telah mencapai sebesar 98,71 %.

1.1.3. Rapor Pendidikan

Rapor pendidikan merupakan hasil evaluasi sistem pendidikan yang mencakup hasil belajar murid, proses pembelajaran, pemerataan kualitas layanan, kualitas pengelolaan sekolah, serta kualitas sumber daya manusia yang terlibat di sekolah. Rapor Pendidikan digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan strategi peningkatan kualitas layanan pendidikan.

Rapor pendidikan Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2024 berada pada kategori Tuntas Pratama dengan nilai 74,09. Capaian tersebut meningkat dari capaian tahun 2023 dengan Rapor Pendidikan 73,61, dan masih berada pada kategori Tuntas Pratama. Rapor Pendidikan *Tuntas Pratama* menunjukkan bahwa sekolah atau daerah telah memenuhi kriteria minimum dan menunjukkan prakarsa yang baik dalam peningkatan mutu. Ini berarti satuan pendidikan atau pemerintah daerah telah mencapai tingkat kualitas yang layak, namun masih memiliki peluang besar untuk peningkatan lebih lanjut.

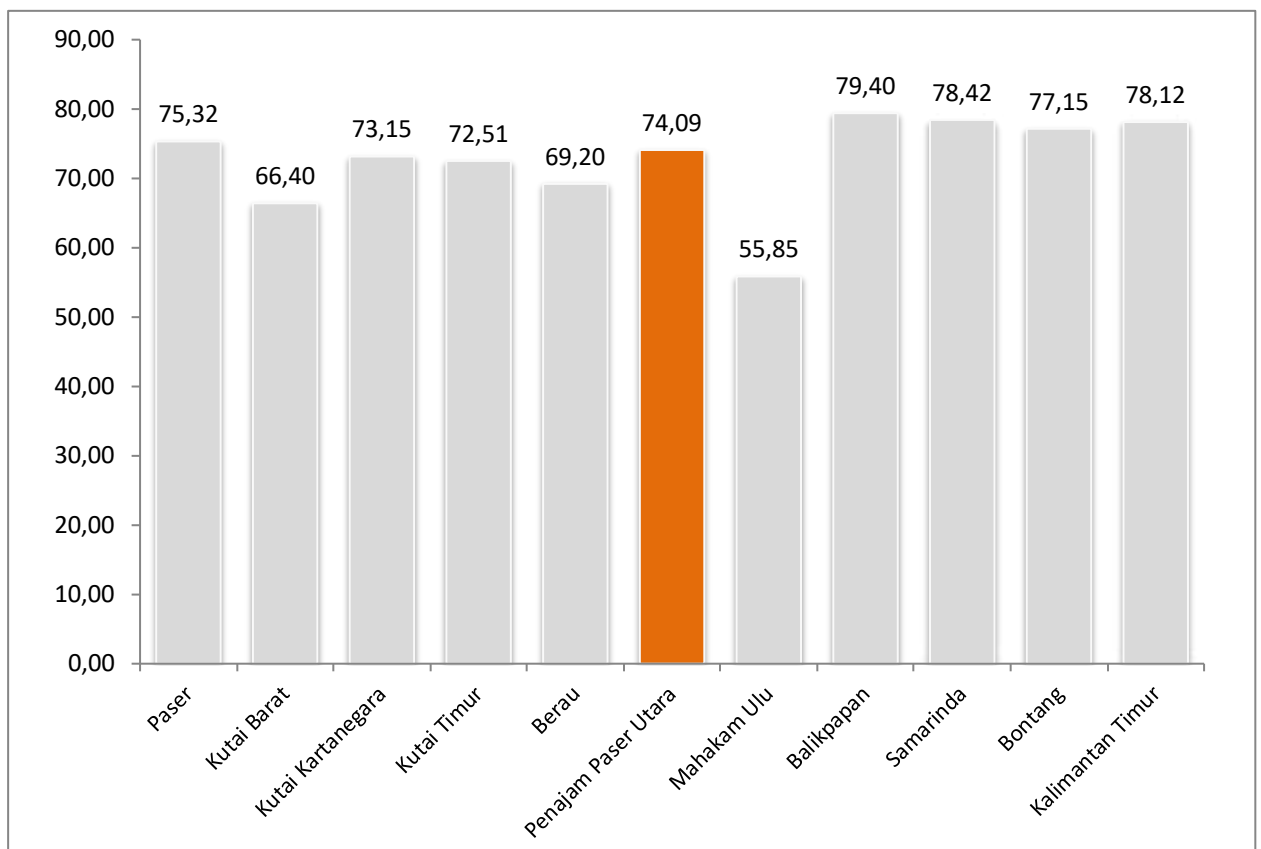


Rapor Pendidikan Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2024 berada pada urutan ke-5 tertinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota seKalimantan Timur, dan berada di bawah Provinsi Kalimantan Timur.



Monitoring SDN

**Grafik 3.35 Rapor Pendidikan Kabupaten/ Kota
seKalimantan Timur, Prov. Kalimantan Timur Tahun 2024**



Sumber : Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2025

Dari hasil Rapor Pendidikan Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2024, diperoleh rekomendasi sebagai berikut:

1. Mengajarkan dan membiasakan anak untuk berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat;
2. Mendorong kegiatan pembelajaran yang menerapkan pola komunikasi dua arah antara guru dengan murid;
3. Memberikan pendampingan kepada satuan PAUD untuk meningkatkan kualitas layanan agar lebih siap saat diakreditasi;
4. Memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kekerasan termasuk kegiatan anti perundungan, kekerasan seksual, dan hukuman fisik secara sistematis melalui kebijakan, pembelajaran, pembekalan bagi pendidik dan orang tua/wali di satuan PAUD;
5. Meningkatkan pemahaman masyarakat, orang tua, serta dunia kerja dan industri terkait kebutuhan dan kemampuan anak disabilitas serta cerdas istimewa dan berbakat istimewa (CIBI);



6. Mendorong terwujudnya kolaborasi antara orang tua dan satuan pendidikan guna memastikan kesinambungan pembelajaran antara lingkungan sekolah dan rumah, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara holistik;
7. Meningkatkan kesadaran atas pentingnya pendidikan anak sejak usia minimal 5 tahun dan mempermudah akses untuk memperoleh pendidikan kepada semua anak termasuk anak dengan disabilitas.

Berikut ini upaya ke depan yang perlu dilakukan atau ditingkatkan untuk mendorong kualitas pendidikan, yang sejalan dengan peningkatan nilai Rapor Pendidikan, antara lain:

1. Peningkatan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah;
2. Peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan berbasis kebutuhan;
3. Penguatan kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat;
4. Penguatan budaya belajar siswa dengan pengembangan karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler, proyek sosial, dan pembiasaan;
5. Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi.

SASARAN 2

Derajat Kesehatan Masyarakat Semakin Meningkat

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2024	2025			Target Akhir RPJMD (2029)	Capaian 2025 Terhadap Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.2.1	Usia Harapan Hidup	74,27	74,51	74,60	100,12	75,19	99,22
Rata-rata Capaian Kinerja					100,12		99,22

1.1.4. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2025 melebihi dari yang ditargetkan 74,51 tahun terealisasi 74,60 tahun, sehingga diperoleh capaian kinerja 100,12 %. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2029 Usia Harapan Hidup 75,19 tahun, realisasi tahun 2025 telah mencapai sebesar 99,22 % dari target akhir RPJMD.

SASARAN 3

Meningkatnya Kesenjangan Gender

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2024	2025			Target Akhir RPJMD (2029)	Capaian 2025 Terhadap Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.3.1	Indeks Ketimpangan Gender	0,474	0,460	0,474	97,05	0,424	89,45
Rata-rata Capaian Kinerja					97,05		89,45

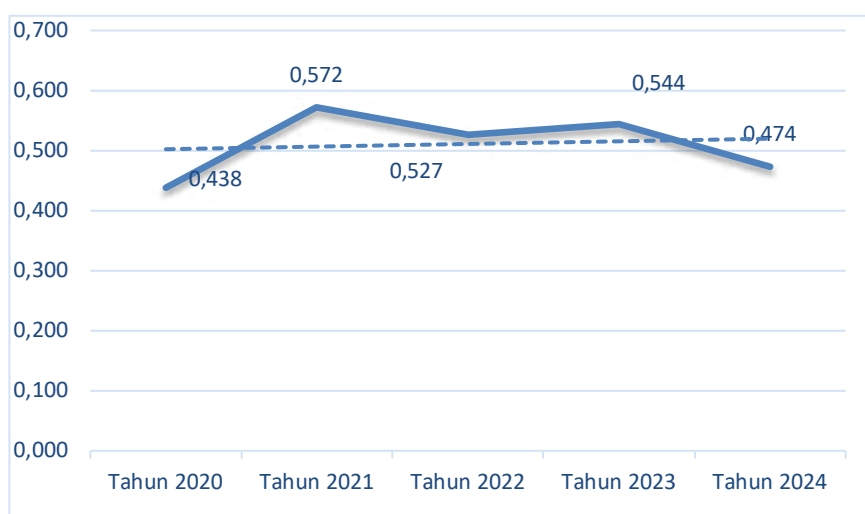
1.1.5. Indeks Ketimpangan Gender

Pada tahun 2025, fokus pengukuran ketimpangan gender di Indonesia beralih menggunakan Indeks Ketimpangan Gender (IKG), menggantikan atau melengkapi Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IKG dianggap lebih komprehensif karena mengukur ketimpangan tiga dimensi: kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar kerja. Dengan demikian, IPG tidak lagi menjadi fokus utama karena pemerintah lebih menonjolkan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) yang memberikan potret kesenjangan yang lebih akurat dan terperinci. IKG memiliki rentang nilai antara 0 hingga 1 dengan sifat negatif, yang berarti semakin tinggi nilai IKG suatu daerah, semakin besar ketimpangan gender yang terjadi. Sebaliknya, semakin rendah nilai IKG, semakin kecil ketimpangan gender, yang menunjukkan peningkatan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan angka fluktuatif. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, Indeks Ketimpangan Gender tahun 2024 mengalami penurunan indeks. Penurunan ini menunjukkan bahwa semakin kecil ketimpangan gender di Kabupaten Penajam Paser Utara. Target IKG 0,460 di tahun 2025 terealisasi 0,474, sehingga capaian kinerja sebesar 97,05 %. Realisasi IKG tahun 2025 terhadap target RPJMD tahun 2029 telah mencapai 89,45 %.



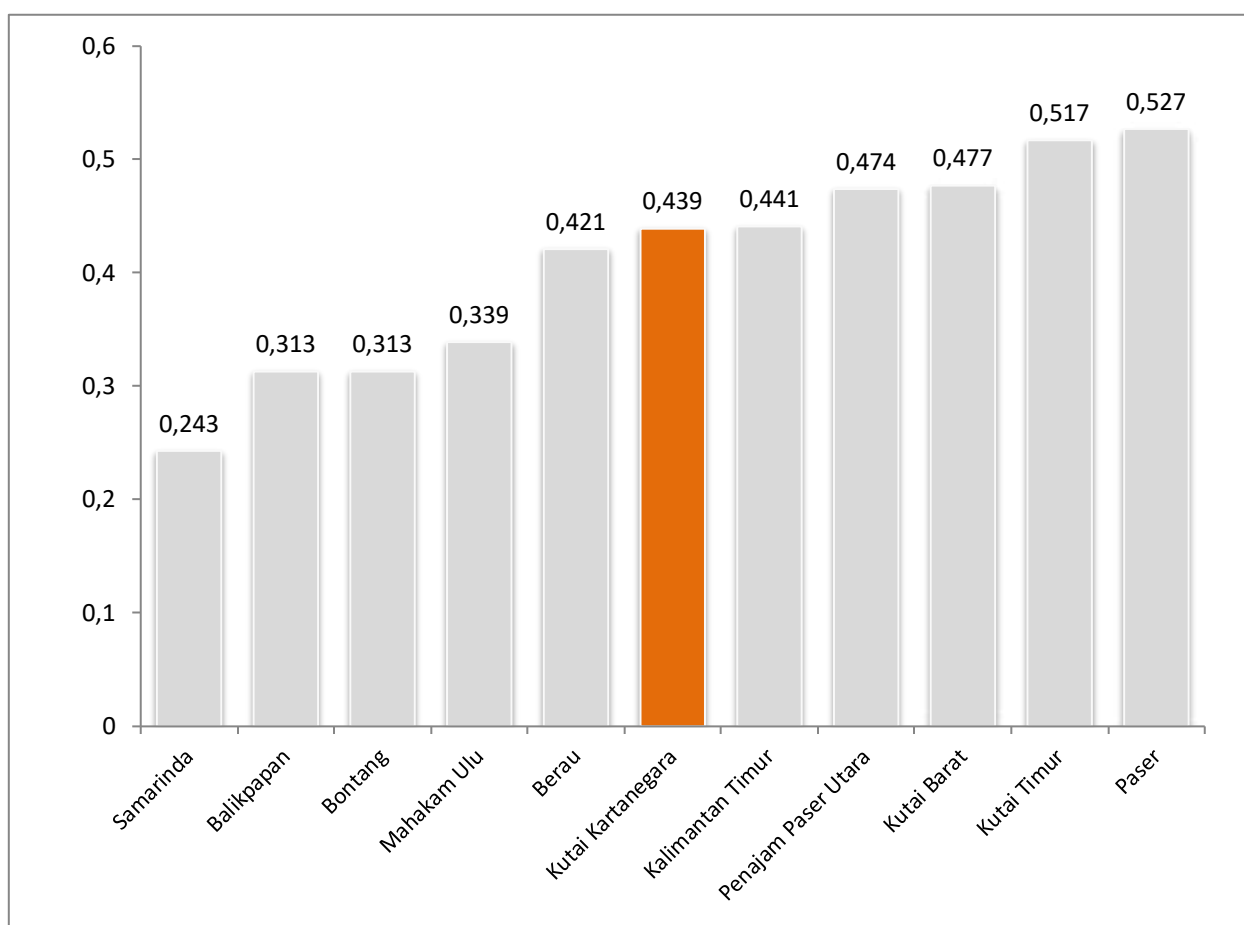
Grafik 3.36 Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 - 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara, 2026

Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2024 berada pada urutan ke-7 terendah dibandingkan dengan kabupaten/kota seKalimantan Timur, dan berada di atas Provinsi Kalimantan Timur.

Grafik 3.37 Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten/ Kota seKalimantan Timur, Prov. Kalimantan Timur Tahun 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara, 2026

Dimensi pembentuk Indeks Ketimpangan Gender, yaitu:

1. Dimensi Kesehatan Reproduksi

Proporsi persalinan tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan usia melahirkan pertama di bawah 20 tahun, sehingga terjadi penurunan signifikan pada angka melahirkan di luar fasilitas kesehatan. Hal ini didorong oleh program "PPU Sehat" dan peningkatan akses puskesmas di wilayah penyangga IKN (Sepaku).

2. Dimensi Pemberdayaan

Persentase penduduk perempuan usia 25+ dengan pendidikan minimal SMA/ sederajat mencapai 47,2%, namun keterwakilan di Parlemen dan Tingkat Pendidikan Menengah ke Atas masih menjadi tantangan untuk mencapai kuota 30% di DPRD Penajam Paser Utara karena masih 4 % dari kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara.

3. Dimensi Pasar Tenaga Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan mengalami kenaikan menjadi 51,8% (naik dari 49,0% pada 2024). Peningkatan ini dipicu oleh banyaknya peluang kerja di sektor jasa dan administrasi yang muncul seiring pembangunan IKN.

Beberapa kendala dan tantangan dalam penurunan Indeks Ketimpangan Gender tahun 2024 di Kabupaten Penajam Paser Utara, antara lain:

1. Hambatan Kultural

Di beberapa wilayah perdesaan, pernikahan usia dini masih menjadi faktor yang menghambat dimensi kesehatan reproduksi dan pendidikan.

2. Kesenjangan Keterampilan

Masuknya investasi besar di tahun 2024 ke Penajam Paser Utara menuntut keahlian teknis tinggi yang saat ini masih didominasi oleh angkatan kerja laki-laki.

Upaya yang dapat dilakukan ke depan untuk menurunkan Indeks Ketimpangan Gender, antara lain:

1. Penguatan Ekonomi Terintegrasi Ibukota Negara

Penajam Paser Utara akan mengalami pergeseran struktur ekonomi dari agraria ke jasa dan industri. Pemerintah harus memastikan perempuan tidak tertinggal dalam transisi ini.

a. Program Reskilling & Upskilling: Menyelenggarakan pelatihan kerja spesifik (seperti teknologi informasi, manajemen logistik, dan kuliner standar internasional) bagi perempuan untuk mengisi rantai pasok Ibukota Negara.



- b. Akses Permodalan UMKM Perempuan: Mempermudah skema kredit mikro tanpa agunan berat bagi kelompok usaha perempuan di tingkat desa/kelurahan.
2. Peningkatan Derajat Kesehatan Reproduksi
- Salah satu indikator IKG adalah rasio angka kematian ibu dan tingkat kelahiran remaja.
- a. Layanan Kesehatan Mobile

Mengingat geografi PPU, penyediaan unit kesehatan keliling yang fokus pada pemeriksaan kehamilan (ANC) dan edukasi KB di daerah terpencil sangat diperlukan.
 - b. Kampanye Pencegahan Pernikahan Dini

Bekerja sama dengan tokoh adat dan agama untuk menekan angka pernikahan anak yang sering kali menjadi penghambat utama pendidikan perempuan.
3. Kesetaraan dalam Pasar Tenaga Kerja
- a. Kebijakan Ramah Ibu Bekerja

Mendorong instansi pemerintah dan sektor swasta di Penajam Paser Utara untuk menyediakan fasilitas *daycare* (tempat penitipan anak) dan ruang laktasi yang layak.
 - b. Sertifikasi Keahlian Khusus

Memberikan subsidi sertifikasi bagi tenaga kerja perempuan di sektor non-tradisional (seperti konstruksi ringan atau teknisi) agar memiliki daya saing yang setara.
4. Pemberdayaan Politik dan Pengambilan Keputusan
- IKG juga diukur dari keterwakilan perempuan di parlemen dan posisi strategis.
- a. Kaderisasi Kepemimpinan Perempuan

Membuat program "Sekolah Politik Perempuan" untuk mempersiapkan calon legislatif dan pemimpin birokrasi yang kompeten melalui pembinaan organisasi perempuan.
 - b. Musrenbang Perempuan

Memastikan forum khusus perempuan dalam perencanaan pembangunan desa agar kebutuhan spesifik gender (seperti penerangan jalan yang aman atau akses air bersih) terakomodasi.



SASARAN 4

Meningkatnya Harmoni Sosial Budaya Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2024	2025			Target Akhir RPJMD (2029)	Capaian 2025 Terhadap Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.4.1	Indeks Harmoni Indonesia	-	7,00	-	-	7,80	-
Rata-rata Capaian Kinerja					-	-	-

1.4.1. Indeks Harmoni Indonesia

Indeks Harmoni merupakan metrik komposit yang mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, dan keberagaman untuk mengukur, mengevaluasi, dan merefleksikan tingkat keselarasan dan/ atau keseimbangan serta kualitas hidup secara Harmoni dan Sejahtera dalam suatu masyarakat atau negara. Pelaksanaan pengukuran Indeks Harmoni tahun 2025 atas dimensi, variabel dan indikator dilakukan dengan menggunakan *e-Survey* Indeks Harmoni.

Indeks Harmoni Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2025 tidak dapat diukur dikarenakan jumlah responden yang melakukan *e-Survey* tidak memenuhi persyaratan target minimal responden. Sama seperti Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten/ Kota yang lain di Provinsi Kalimantan Timur juga tidak dapat mengukur Indeks Harmoni dikarenakan kurangnya jumlah responden yang melakukan *e-Survey*.

Di tahun yang akan datang Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik akan melakukan strategi dan upaya agar masyarakat atau yang menjadi target responden dapat berpartisipasi dalam pengisian *e-Survey*. Sementara itu, adapun upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Indeks Harmoni Kabupaten Penajam Paser Utara, antara lain:

1. Dimensi Sosial dan Toleransi

- Dialog Antarumat Beragama: Mengaktifkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan mengadakan dialog rutin untuk mencegah radikalisme.
- Pendidikan Multikultural: Menanamkan nilai-nilai kebersamaan, menghormati perbedaan, dan toleransi sejak dini melalui jalur pendidikan.

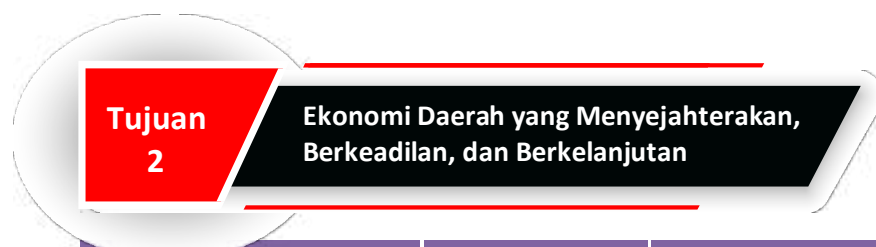
- c. Kampanye Sosial: Menyebarkan pesan persatuan, keberagaman, dan moderasi beragama melalui media sosial maupun media konvensional.
- d. Gotong Royong: Mengadakan aksi sosial bersama untuk meningkatkan kohesi sosial dan kesadaran antar budaya.

2. Dimensi Ekonomi

- a. Pemberdayaan UMKM: Memperkuat ekonomi masyarakat melalui pendampingan UMKM dan akses modal.
- b. Bantuan Tepat Sasaran: Memastikan distribusi bantuan sosial (bansos) dan stabilisasi harga pokok untuk mengurangi ketimpangan.
- c. Pelatihan Vokasi: Membuka program magang dan pelatihan kerja untuk meningkatkan kesejahteraan pemuda.

3. Dimensi Budaya dan Keamanan

- a. Pelestarian Budaya Lokal: Menyelenggarakan festival seni dan budaya untuk memperkuat identitas.
- b. Pencegahan Konflik: Melakukan penyuluhan bahaya radikalisme dan meningkatkan partisipasi pemuda dalam kegiatan positif.



No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2024	2025			Target Akhir RPJMD (2029)	Capaian 2025 Terhadap Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
2.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	30,68	7,00	6,52	93,14	9,4	69,36
2.2	Indeks Gini	0,258	0,256	0,319	80,25	0,238	74,61
Rata-rata Capaian Kinerja					86,70		71,98

2.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2025 sebesar 6,52 %, menurun jika dibandingkan dengan tahun 2024 dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi 30,68. Dari target 7,00 % terealisasi 6,52 % sehingga capaian kinerja sebesar 93,14 % dalam



kategori Sangat Memuaskan. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2029, realiasi Laju Pertumbuhan Ekonomi tahun 2025 mencapai 69,36 %.

2.2. Indeks Gini

Target Indeks Gini Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2025 sebesar 0,256 dapat terealisasi 0,319, sehingga capaian kinerja sebesar 80,25 %. Indeks Gini tahun 2025 meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang berarti ketimpangan distribusi pendapatan atau pengeluaran pada tahun 2025 di suatu wilayah semakin melebar/tinggi. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2029 Indeks Gini 0,238, realisasi tahun 2025 mencapai sebesar 71,98 % dari target akhir RPJMD.

SASARAN 5

Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2024	2025			Target Akhir RPJMD (2029)	Capaian 2025 Terhadap Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
2.5.1	Kontribusi Pertanian Terhadap PDRB (Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan)	12,26	15,89	12,76	80,30	19,32	66,05
2.5.2	Nilai Investasi	3.705.197.869.077	1.053.000.000.000	1.515.050.180.453	143,88	1.167.328.800.000	129,79
Rata-rata Capaian Kinerja					112,09		97,92

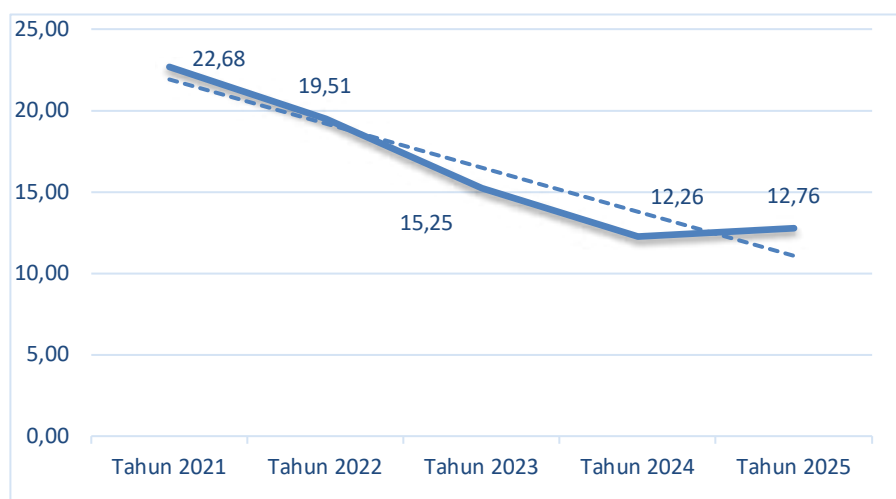
2.5.1 Kontribusi Pertanian Terhadap PDRB (Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan)

Kontribusi sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sangat penting dan perlu ditingkatkan karena sektor ini merupakan tulang punggung perekonomian daerah, penyedia utama kebutuhan pokok, serta penopang mata pencaharian mayoritas penduduk.



Kontribusi sektor pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan perikanan terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Penajam Paser Utara dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 besarnya fluktuatif. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, terjadi peningkatan kontribusi sebesar 0,50 persen. Peningkatan ini terjadi karena terdapat peningkatan jumlah produksi pertanian dan perikanan di tahun 2025.

Grafik 3.38 Kontribusi Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 - 2025



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara, 2026

Dari target 15,89 persen yang ditetapkan pada tahun 2025, Kontribusi Pertanian terhadap PDRB (Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan) terealisasi 12,76 % sehingga capaiannya sebesar 80,30 %, dalam kategori kinerja Memuaskan. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD tahun 2026 capaian kinerja tahun 2025 telah mencapai 66,05 %.

Berikut ini upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk meningkatkan Kontribusi Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan, antara lain:

1. Meningkatkan Produktivitas melalui Modernisasi alat dan teknologi pertanian serta perikanan (mesin pertanian, teknologi budidaya ikan, irigasi modern), Penggunaan benih unggul dan bibit ikan berkualitas, Penerapan teknologi digital dan sistem informasi untuk pemantauan produksi dan cuaca.
2. Meningkatkan Infrastruktur dengan membangun dan memperbaiki irigasi, jalan produksi, pelabuhan perikanan, dan cold storage, serta memperbaiki rantai distribusi agar hasil produksi cepat sampai ke pasar dan tidak mudah rusak.



3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan peternak tentang teknik budidaya modern, pengolahan hasil, dan manajemen usaha melalui pelatihan dan penyuluhan pertanian, peternakan dan perikanan secara rutin oleh tenaga ahli.
4. Pengembangan Industri Pengolahan dengan mendorong agroindustri agar produk memiliki nilai tambah.
5. Meningkatkan Akses Permodalan dan Pembiayaan serta pemberian bantuan.
6. Perluasan Pasar dan Promosi dengan membantu pemasaran produk melalui pasar digital dengan mengembangkan branding produk lokal agar memiliki daya saing.

1.4.2. Nilai Investasi

Nilai Investasi di Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp 1.053.000.000.000,00 dapat terealisasi dengan total Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 1.515.050.180.453,00, sehingga capaian kinerja sebesar 76,12 %, dalam kategori Sangat Baik. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2029 dengan target Nilai Investasi Rp 1.167.328.800.000,00, realisasi tahun 2025 telah melebihi target akhir RPJMD dengan capaian sebesar 129,79 %.

SASARAN 6

Menurunnya Kemiskinan

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2024	2025			Target Akhir RPJMD (2029)	Capaian 2025 Terhadap Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
2.6.1	Tingkat Kemiskinan	6,69	4,40	5,78	76,12	4,32	74,74
Rata-rata Capaian Kinerja					76,12		74,74

2.6.1. Tingkat Kemiskinan

Pada tahun 2025 Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 5,78 persen dari target yang ditetapkan 4,40 persen sehingga capaian kinerjanya sebesar

76,12 atau kategori kinerja Sangat Baik. Nilai Tingkat atau Persentase Kemiskinan menunjukkan hal yang positif, dimana mengalami penurunan di tahun 2025 dibanding tahun 2024. Penurunan Tingkat Kemiskinan ini menggambarkan bahwa kesejahteraan ekonomi masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara secara umum membaik dan kualitas hidupnya meningkat. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD tahun 2026 Tingkat Kemiskinan tahun 2025 masih mencapai 74,74 %.

SASARAN 7

Menurunnya Pengangguran

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2024	2025			Target Akhir RPJMD (2029)	Capaian 2025 Terhadap Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
2.7.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,05	2,02	4,26	47,42	1,92	45,07
Rata-rata Capaian Kinerja					47,42		45,07

2.7.1. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2025 sebesar 4,26 persen, meningkat dibandingkan tahun 2024. Tingkat Pengangguran Terbuka 4,26 persen artinya bahwa dari setiap 100 orang angkatan kerja (penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi), terdapat sekitar 4 hingga 5 orang yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha.

Target Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2025 sebesar 2,2 persen terealisasi 4,26 persen, sehingga capaian kinerja sebesar 47,42 % atau dalam kategori kinerja Kurang. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2029 sebesar 1,92 persen, capaian kinerja indikator ini mencapai 45,07 %, masih jauh dari target akhir RPJMD.

SASARAN 8

Meningkatnya Ketahanan Pangan

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2024	2025			Target Akhir RPJMD (2029)	Capaian 2025 Terhadap Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
2.8.1	Indeks Ketahanan Pangan	88,11	88,61	75,40	85,09	90,61	83,21
Rata-rata Capaian Kinerja					85,09		83,21

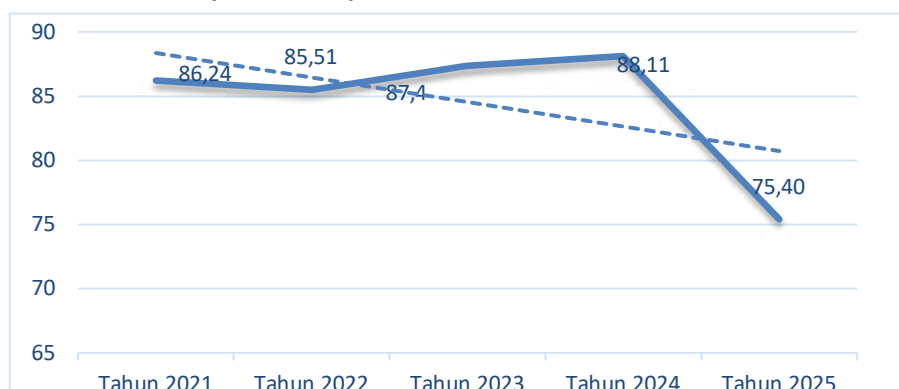
2.8.1. Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan adalah nilai komposit yang mengukur ketersediaan, aksesibilitas, pemanfaatan, dan stabilitas pangan di suatu wilayah. Indeks ini bertujuan untuk mengukur kondisi ketahanan pangan suatu wilayah yang akan dijadikan dasar penetapan prioritas intervensi program pemerintah untuk mengatasi rentan rawan pangan, menurunkan stunting, dan meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, serta pemanfaatan pangan.

Target Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2025 sebesar 88,31, sedangkan realisasi capaian sebesar 75,40. Dengan demikian, target belum tercapai. Hal ini disebabkan oleh perubahan metodologi penghitungan IKP oleh Badan Pangan Nasional tahun 2025 yang menggunakan versi terbaru dengan penambahan indikator dan perbedaan variabel dibandingkan metode sebelumnya, sehingga berdampak signifikan terhadap penurunan nilai capaian dan hasil tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan tahun-tahun sebelumnya.



**Grafik 3.39 Indeks Ketahanan Pangan
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 - 2025**



Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara, 2026

Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami nilai yang fluktuatif, namun terjadi tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Namun, pada tahun 2025 terjadi penurunan yang cukup signifikan menjadi 75,40. Penurunan ini bukan semata-mata mencerminkan penurunan kondisi ketahanan pangan secara riil, tetapi lebih disebabkan oleh perubahan metodologi penghitungan Indeks Ketahanan Pangan oleh Badan Pangan Nasional yang menggunakan versi terbaru dengan penambahan jumlah indikator serta perbedaan variabel dibandingkan metode sebelumnya. Perubahan tersebut menyebabkan hasil pengukuran tahun 2025 tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, sehingga tren penurunan yang terjadi lebih bersifat metodologis daripada substantif. Pada penyusunan Peta FSVA Tahun 2025 sesuai dengan Petunjuk serta arahan Badan Pangan Nasional, Kabupaten/kota dalam penyusunan Peta FSVA menggunakan 2 versi yaitu metode lama dan metode baru. Badan Pangan Nasional tahun 2025 telah mempergunakan versi terbaru dimana ada penambahan jumlah indikator dan berbeda dengan yang lama, dengan demikian sangat mempengaruhi atas pencapaian Angka Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten.

Realisasi Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara sampai tahun 2025 belum mencapai target 88,61, dengan capaian kinerja 85,09 % dalam kategori Memuaskan. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2029 sebesar 90,61, realisasi tahun 2025 masih mencapai 83,21 %. Ketidak tercapaian target tahun 2025 maupun target akhir RPJM dikarenakan bahwa penetapan target tersebut masih menggunakan metodologi pengukuran yang lama. Selain faktor metodologis, terdapat pula faktor teknis dan struktural yang memengaruhi capaian kinerja, antara lain keterbatasan data sektoral yang belum sepenuhnya terintegrasi lintas perangkat daerah, variasi kemampuan wilayah dalam memenuhi indikator-indikator baru, serta tantangan dalam pemenuhan aspek keterjangkauan dan pemanfaatan pangan masyarakat, khususnya pada kelompok rentan, juga Penyebab penurunan Indikator Ketahanan Pangan IKP tahun 2025.

Adapun alternatif solusi dan upaya perbaikan yang telah dan sedang dilakukan antara lain:

1. Melakukan penyesuaian indikator dan target kinerja daerah agar selaras dengan metodologi terbaru Badan Pangan Nasional;
2. Memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pengumpulan dan validasi data ketahanan pangan;



3. Meningkatkan intervensi program pada aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan, termasuk melalui penguatan cadangan pangan pemerintah daerah, stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta edukasi gizi masyarakat;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian indikator-indikator baru sebagai dasar perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

SASARAN 9

Meningkatnya Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2024	2025			Target Akhir RPJMD (2029)	Capaian 2025 Terhadap Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
2.9.1	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	-	7,65	6,71	87,71	7,85	85,48
Rata-rata Capaian Kinerja					87,71		85,48

2.9.1. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur

Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur adalah indikator yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas, ketersediaan, dan efektivitas sarana infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah. Indeks ini berfungsi untuk menginventarisasi keinginan masyarakat, menilai kinerja pembangunan, dan menjadi acuan evaluasi kebijakan pelayanan publik terkait infrastuktur.



Dari hasil survei Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur di Kabupaten Penajam Paser Utara, dapat terlihat variasi skor antar aspek yang menunjukkan tingkat ketersediaan, kualitas, kesesuaian, kebermanfaatan, pelibatan tenaga lokal, hingga kontribusi perekonomian. Secara umum, infrastruktur pendidikan (7,21), kesehatan (7,08), serta gedung pemerintahan (6,97) memperoleh skor tertinggi dalam Grand Total, yang menandakan ketiganya dianggap cukup baik dalam mendukung pelayanan publik. Infrastruktur pendidikan bahkan menunjukkan skor tinggi pada semua indikator, terutama kontribusi perekonomian (7,62) dan kebermanfaatan (7,61). Hal ini menegaskan bahwa

layanan pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas penting dan memberikan dampak luas bagi masyarakat.

Di sisi lain, beberapa infrastruktur masih mendapat nilai rendah, khususnya pada aspek transportasi (terminal dan halte) dengan skor 4,11 dan pelatihan tenaga terampil dengan skor 5,27. Rendahnya indeks ini menunjukkan keterbatasan baik dari sisi ketersediaan, kualitas, maupun kebermanfaatan sehingga masih perlu perhatian serius. Kondisi ini dapat menghambat mobilitas masyarakat dan penguatan kapasitas SDM lokal. Sementara itu, infrastruktur jalan dan jembatan (6,57), saluran irigasi (6,10), serta sarana pendukung seperti lapangan dan PJU (6,44) berada pada kategori menengah. Artinya, meskipun sudah cukup tersedia, kualitas dan pemanfaatannya belum optimal. Aspek pelibatan tenaga lokal di hampir seluruh infrastruktur relatif masih moderat (sekitar 6), menunjukkan bahwa potensi pemberdayaan masyarakat lokal belum sepenuhnya maksimal. Secara keseluruhan, indeks kualitas layanan infrastruktur di Penajam Paser Utara menunjukkan capaian baik pada sektor-sektor dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan gedung pemerintahan. Namun, masih terdapat kesenjangan pada transportasi umum, sanitasi, serta pelatihan tenaga kerja. Hal ini memberikan gambaran prioritas perencanaan ke depan, yakni meningkatkan layanan transportasi, memperkuat pelatihan keterampilan, serta memperluas pelibatan masyarakat lokal dalam pembangunan infrastruktur.

Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2025 ditargetkan 7,65 dapat terealisasi 6,71 sehingga capaian kinerja sebesar 87,71 %, dalam kategori Memuaskan. Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena pengukuran Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur baru dilakukan pada tahun 2025. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2029 dengan target 7,85 terealisasi sebesar 85,48 % di tahun 2025.

Berikut ini upaya yang dapat dilakukan di tahun akan datang untuk meningkatkan Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Kabupaten Penajam Paser Utara, antara lain:

1. Optimalisasi Infrastruktur Dasar dan Pengelolaan Aset Terpadu dengan memprioritaskan peningkatan kualitas infrastruktur dasar, khususnya jalan, air bersih, dan sanitasi yang sejalan dengan misi daerah untuk memperkuat konektivitas kawasan dan meningkatkan pelayanan dasar masyarakat;
2. Peningkatan Kualitas, Keselamatan, dan Inklusivitas Infrastruktur Publik melalui melaksanakan audit keselamatan dan aksesibilitas pada gedung pemerintahan serta



fasilitas publik lainnya, terutama fasilitas layanan masyarakat seperti sekolah dan puskesmas;

3. Penguatan Infrastruktur Air Bersih, Sanitasi, dan Pengairan melalui peningkatan pada cakupan layanan air minum aman, sistem pengolahan air limbah, serta jaringan irigasi. Penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) sanitasi di wilayah pesisir, seperti bio-septic tank komunal dan sistem pengolahan berbasis alam. Pengembangan sistem *rain water harvesting* (penampungan air hujan) terutama di kawasan pesisir dan permukiman padat yang memiliki keterbatasan sumber air baku;
4. Pembentukan Tim Pemeliharaan dan Koordinasi Teknis Lintas Sektor yang melibatkan Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, dan Dinas Perumahan dan Permukiman guna menjamin keberlanjutan sarana transportasi, jaringan PJU, dan fasilitas publik lainnya;
5. Penguatan Sistem Data dan Evaluasi Berbasis Indeks Kualitas Layanan Infastruktur Pemerintah daerah dengan mengembangkan Sistem Data Infrastruktur Terpadu berbasis IKLI yang dapat diperbarui secara berkala untuk memantau kesenjangan layanan, mengevaluasi efektivitas program, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

SASARAN 10

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Bencana

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2024	2025			Target Akhir RPJMD (2029)	Capaian 2025 Terhadap Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
2.10.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,1	76,31	77,76	101,90	76,99	101,00
2.10.2	Indeks Risiko Bencana	131,81	123,81	88,54	139,84	91,81	103,69
Rata-rata Capaian Kinerja					120,87		102,35

2.10.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Penajam Paser Utara empat tahun terakhir terus mengalami kenaikan. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin baik. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2025

sebesar 77,76, terealisasi melebihi yang ditargetkan 76,31 dengan capaian kinerja sebesar 101,90 % atau dalam kategori Sangat Memuaskan. Realisasi tahun 2025 ini jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 76,99 juga telah tercapai dengan capaian kinerja sebesar 101,00 %.

2.10.2. Indeks Risiko Bencana

Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami nilai fluktuatif yang dipengaruhi oleh perubahan dinamis pada tiga komponen utama, yaitu ancaman (bahaya), kerentanan, dan kapasitas daerah. Indeks Risiko Bencana tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan bahwa upaya mitigasi risiko dan perbaikan manajemen bencana semakin baik. Target Indeks Risiko Bencana tahun 2025 sebesar 123,81 terealisasi 88,54 sehingga capaian kinerja sebesar 139,84 atau dalam kategori Sangat Memuaskan. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2029 dengan target 91,81, indikator ini telah mencapai 103,69 %. Indeks Risiko Bencana sebesar 88,54 termasuk dalam Risiko Bencana Sedang, menggambarkan bahwa wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2025 memiliki tingkat ancaman bencana yang moderat, tidak terlalu tinggi namun tidak rendah.

Tujuan 3 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas								
No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2024		2025			Target Akhir RPJMD (2029)	Capaian 2025 Terhadap Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
3.1	Indeks Reformasi Birokrasi	69,53		69,80	70,36	100,80	70,32	100,06
Rata-rata Capaian Kinerja						100,80		100,06

3.1. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2025 mengalami peningkatan skor, dimana Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2024 sebesar 69,53 menjadi 70,36 di tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kualitas tata kelola



pemerintahan di Kabupaten Penajam Paser Utara semakin baik, pelayanan publik semakin berkualitas, perbaikan akuntabilitas kinerja, serta penyelesaian masalah prioritas pembangunan nasional di hilir semakin konkrit. Target Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2025 sebesar 69,80 terealisasi 70,36 dengan capaian kinerja sebesar 100,80 atau dalam kategori Sangat Memuaskan. Realisasi tahun 2025 ini jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2029 sebesar 70,32, telah tercapai dengan capaian 100,06 %.

SASARAN 11

Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Kolaboratif

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2024	2025			Target Akhir RPJMD (2029)	Capaian 2025 Terhadap Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
3.11.1	Nilai AKIP Pemerintah Daerah	62,19	64,00	61,14	95,53	69,80	87,59
3.11.2	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	53,631	55	81,545	148,26	59	138,21
3.11.3	Survei Penilaian Integritas KPK	61,28	62	71,80	115,81	68	105,59
Rata-rata Capaian Kinerja					119,87		110,46

3.11.1. Nilai AKIP Pemerintah Daerah

Nilai AKIP Pemerintah Daerah merupakan skor hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI terhadap penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang bertujuan untuk peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Nilai AKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, mengalami peningkatan skor sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dan berada pada predikat B. Pada tahun 2025 terdapat penurunan skor menjadi 61,14. Dari empat komponen yang dievaluasi, komponen Perencanaan Kinerja dan Pelaporan Kinerja mengalami peningkatan skor, namun komponen Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Internal mengalami penurunan skor.



**Tabel 3.29 Nilai AKIP Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2022 - 2025**

No.	Komponen	Bobot (%)	Nilai			
			2022	2023	2024	2025
1	Perencanaan Kinerja	30	20,81	20,85	21,09	21,37
2	Pengukuran Kinerja	30	16,76	16,82	17,14	16,55
3	Pelaporan Kinerja	15	10,11	10,17	9,99	10,03
4	Evaluasi Internal	25	12,58	13,28	13,96	13,19
	Total	100	60,26	61,11	62,19	61,14

Nilai AKIP Pemerintah Daerah tahun 2025 ditargetkan 64,00 terealisasi 61,14 sehingga capaian kinerja sebesar 95,53 %. Jika dibandingkan dengan Nilai AKIP Pemerintah Daerah tahun 2024 dengan skor 62,19 terdapat penurunan sebesar 1,05 poin di tahun 2025. Terhadap target akhir RPJMD tahun 2029 dengan target 69,80, capaian tahun 2025 ini baru mencapai sebesar 87,59 %.

Strategi ke depan yang dapat dilakukan dalam meningkatkan Nilai AKIP Pemerintah Daerah, antara lain:

1. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi AKIP oleh evaluator pemerintah pusat;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan intens terkait tindak lanjut atas hasil evaluasi AKIP terhadap seluruh perangkat daerah;
3. Meningkatkan pendampingan kepada seluruh perangkat daerah untuk memperdalam pemahaman tentang AKIP;
4. Meningkatkan kolaborasi dan sinergitas seluruh perangkat daerah untuk bersama-sama berupaya meningkatkan kualitas AKIP;
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia evaluator AKIP Kabupaten Penajam Paser Utara;
6. Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan AKIP.



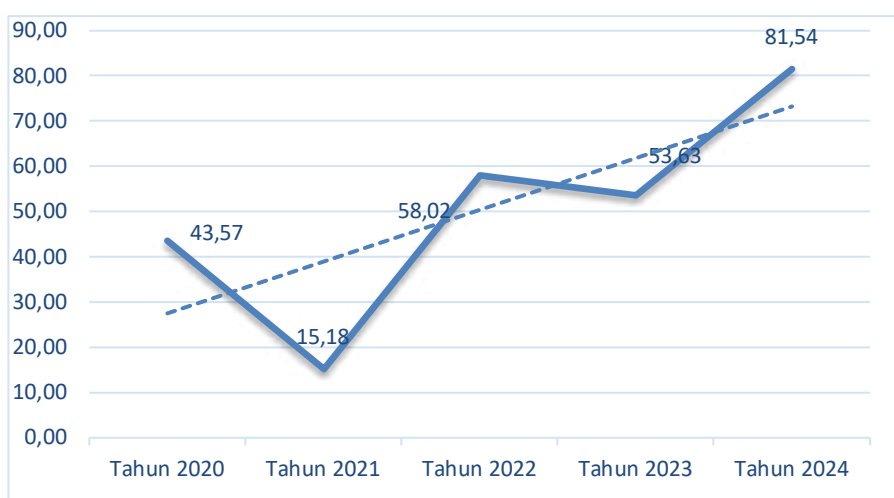
3.11.2. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) merupakan satuan ukuran yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri untuk menilai kinerja, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas keuangan daerah berdasarkan enam dimensi (perencanaan, belanja, transparansi, penyerapan, kondisi keuangan, dan opini BPK). Pengelolaan keuangan daerah yang benar akan mendorong peningkatan ekonomi daerah.

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami nilai fluktuatif dengan capaian tertinggi pada tahun 2024 (pelaksanaan pengukuran di tahun 2025). Nilai IPKD 81,54 menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara sudah dalam kategori Baik, meningkat dari tahun sebelumnya dimana masih dalam kategori perbaiki. Jika dibandingkan dengan target IPKD tahun 2025 sebesar 55 terealisasi 81,54 sehingga capaian kinerja sebesar 148 % dalam kategori Sangat Memuaskan. Realisasi tahun 2025 ini terhadap target akhir RPJMD 2029 sebesar 59 telah tercapai 138,21 %.



Grafik 3.40 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 - 2024

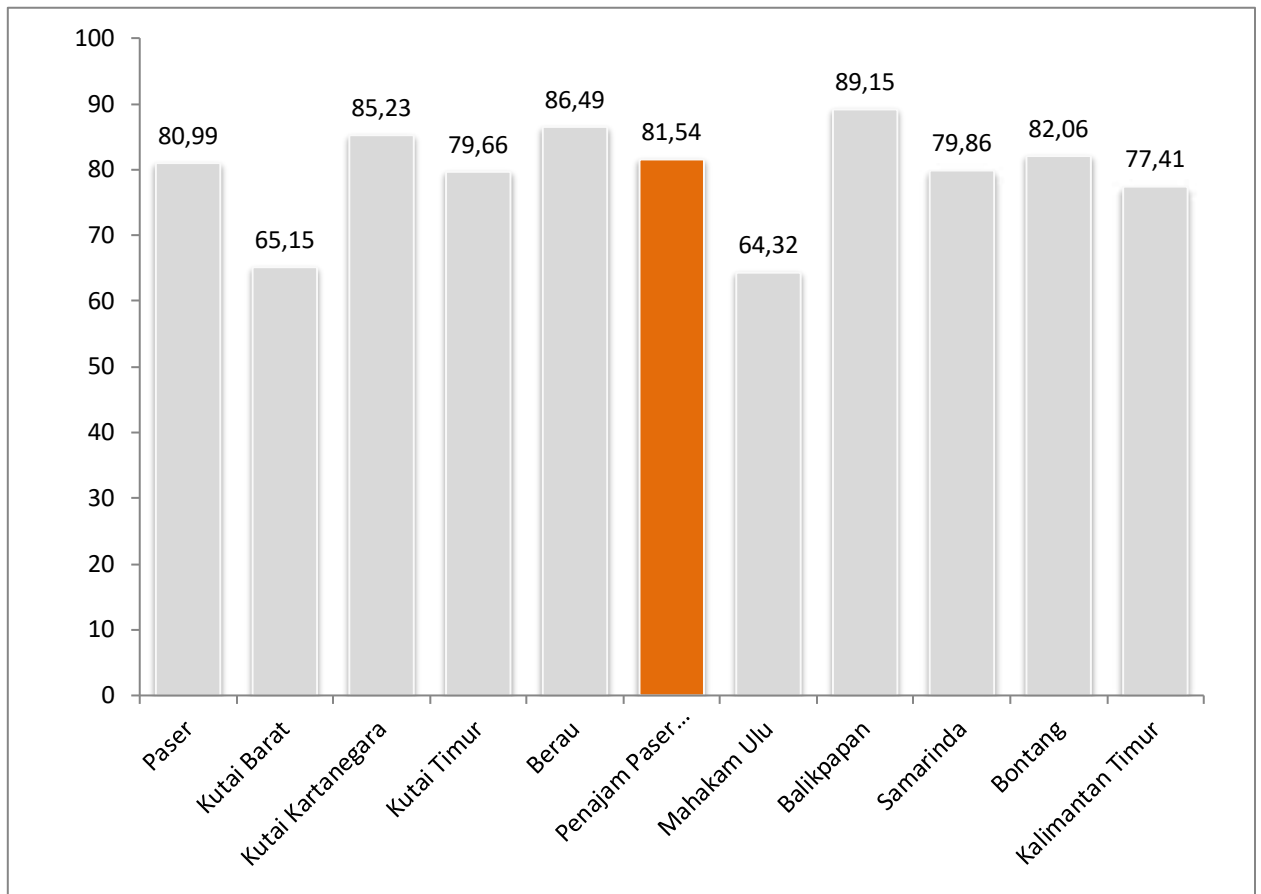


Sumber : data.kaltimprov.go.id, 2026

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2024 berada pada urutan ke-5 tertinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota seKalimantan Timur, dan berada di atas Provinsi Kalimantan Timur.



Grafik 3.41 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/ Kota seKalimantan Timur, Prov. Kalimantan Timur Tahun 2024



Sumber : data.kaltimprov.go.id, 2026

Upaya di masa akan datang yang dapat dilakukan dalam peningkatan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran dengan menyusun APBD yang realistis dan berbasis kebutuhan masyarakat, menggunakan perencanaan berbasis kinerja (performance based budgeting), serta menyelaraskan program daerah dengan RPJMD dan RKPD agar penggunaan anggaran lebih efektif;
2. Memperkuat transparansi dan akuntabilitas dengan membuka informasi keuangan kepada publik, menyusun laporan keuangan yang berkualitas, tepat waktu, dan sesuai standar akuntansi pemerintahan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran;
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dengan melakukan pelatihan dan sertifikasi bagi aparatur pengelola keuangan daerah;
4. Memperkuat sistem pengawasan dengan menindaklanjuti hasil pemeriksaan lembaga audit secara cepat dan tepat dan menerapkan sistem pengendalian internal yang kuat;



5. Meningkatkan pendapatan daerah dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan investasi, pajak dan retribusi yang efektif, mengelola aset daerah secara produktif, serta mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat;
6. Mendorong efisiensi dan efektivitas belanja dengan memprioritaskan belanja pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat.

3.11.3. Survei Penilaian Integritas KPK

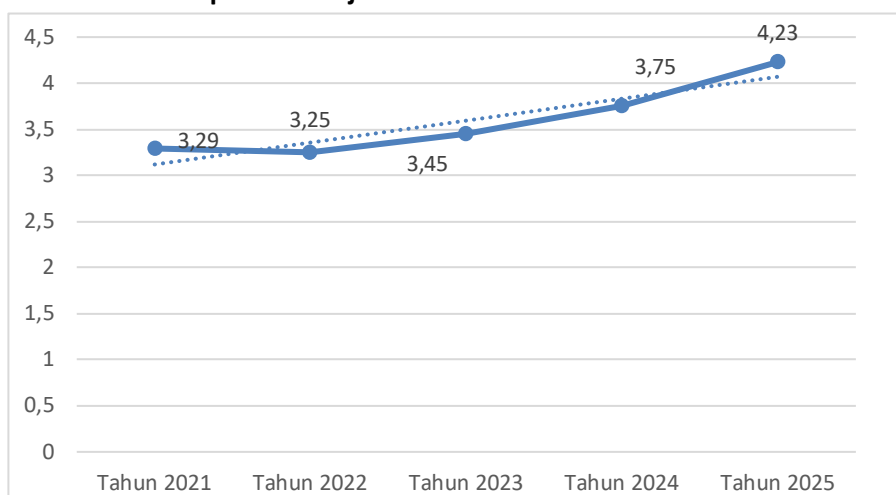
Survei Penilaian Integritas KPK merupakan survei nasional yang diadakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memetakan risiko korupsi dan mengukur tingkat integritas. Responden survei ini melibatkan pegawai instansi pemerintah, mitra kerja/ pengguna layanan, dan para ahli. Survei ini mengukur budaya organisasi, pengelolaan SDM dan anggaran, serta sistem anti korupsi internal.

Tabel 3.30 Kategori Indeks Integritas

	Nilai	Kategori
1	78,00 – 100	Terjaga
2	73,00 – 77,99	Waspada
3	00,00 – 72,99	Rentan

Indeks Survei Penilaian Integritas KPK Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2025 sebesar 71,80 dalam kategori Rentan, artinya Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara di tahun 2025 memiliki kerentanan tinggi terhadap tindak pidana korupsi. Indeks ini meningkat sebanyak 10,52 poin jika dibandingkan dengan tahun 2024 dengan indeks 61,28. Peningkatan indeks ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam memperbaiki tata kelola dan kesadaran anti korupsi.

**Grafik 3.42 Indeks Integritas
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 - 2025**



Sumber : Inspektorat Daerah Kab. Penajam Paser Utara, 2026

Indeks Survei Penilaian Integritas KPK Kabupaten Penajam Paser Utara selama lima tahun terakhir mengalami nilai fluktuatif dengan tren indeks integritas yang meningkat.

Target Indeks Survei Penilaian Integritas KPK tahun 2025 sebesar 62 terealisasi 71,80 dengan capaian kinerja 115 % atau dalam kategori Sangat Memuaskan. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2029 Indeks Integritas sebesar 68, realisasi tahun 2025 telah mencapai 105,59 %.

Adapun upaya ke depan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Indeks Integritas, antara lain :

1. Memperkuat sistem pencegahan korupsi dengan membangun sistem yang mampu mencegah praktik korupsi sejak awal;
2. Meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi melalui keterbukaan informasi kepada masyarakat terkait kebijakan, anggaran, dan pelayanan publik;
3. Memperkuat pengawasan dan akuntabilitas melalui peningkatan pengawasan internal dan eksternal agar setiap penggunaan anggaran dan pelaksanaan program dapat dipertanggungjawabkan;
4. Meningkatkan integritas aparatur dengan menanamkan nilai-nilai integritas kepada aparatur sipil negara melalui pendidikan anti korupsi, pelatihan etika kerja, serta penerapan kode etik yang tegas;
5. Meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik melalui peningkatan penggunaan sistem digital seperti e-government, e-procurement, dan pelayanan berbasis online;
6. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan melalui mekanisme pengaduan masyarakat, survei kepuasan layanan, dan forum konsultasi publik;
7. Memberikan sanksi yang tegas pada setiap pelanggaran integritas atau tindak korupsi.



SASARAN 12

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2024	2025			Target Akhir RPJMD (2029)	Capaian 2025 Terhadap Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
3.12.1	Indeks Pelayanan Publik	3,75	3,76	4,23	112,50	3,82	110,73
3.12.2	Indeks Pemerintah Digital	2,8	2,90	3,28	113,10	1,90	-
Rata-rata Capaian Kinerja					112,80		110,73

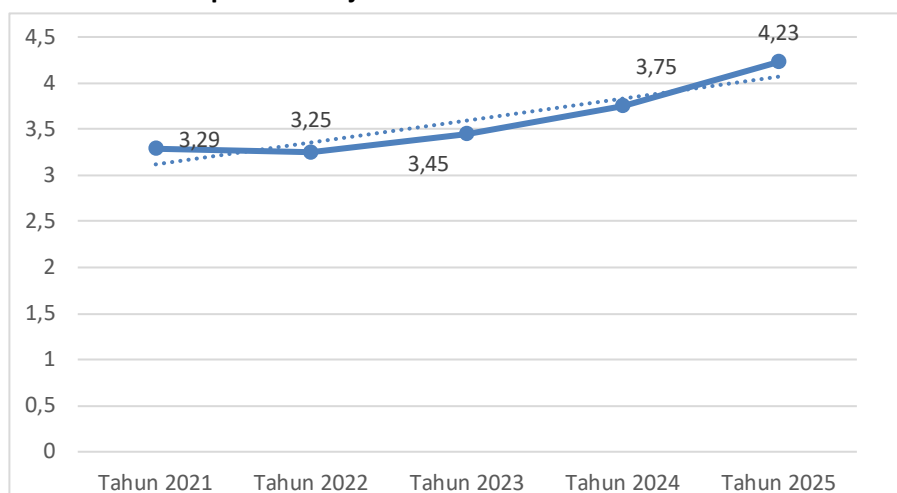
3.12.1. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik merupakan alat ukur kinerja yang digunakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI untuk menilai kualitas pelayanan unit kerja pemerintah berdasarkan enam aspek, yaitu kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan, serta Inovasi. Indeks Pelayanan Publik menggambarkan tingkat kualitas, kinerja, dan profesionalisme unit penyelenggara pelayanan publik.

Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun. Selama lima tahun terakhir, pencapaian Indeks Pelayanan Publik tertinggi di tahun 2025. Indeks Pelayanan Publik tahun 2025 atas evaluasi pelayanan publik terhadap 23 perangkat daerah/ unit kerja memperoleh nilai 4,23 dalam kategori A- atau Sangat Baik yang berarti bahwa unit pelayanan sudah menerapkan seluruh aspek dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai peraturan perundang-undangan tetapi masih terdapat kekurangan di beberapa indikator.

Indeks Pelayanan Publik tahun 2025 telah melebihi dari target yang ditetapkan. Target 3,76 terealisasi 4,23 sehingga capaian kinerja sebesar 112,50 % atau dalam kategori Sangat Memuaskan. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2029 dengan target akhir 3,82 telah tercapai sebesar 110,73 % di tahun 2025.

**Grafik 3.43 Indeks Pelayanan Publik
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 - 2025**

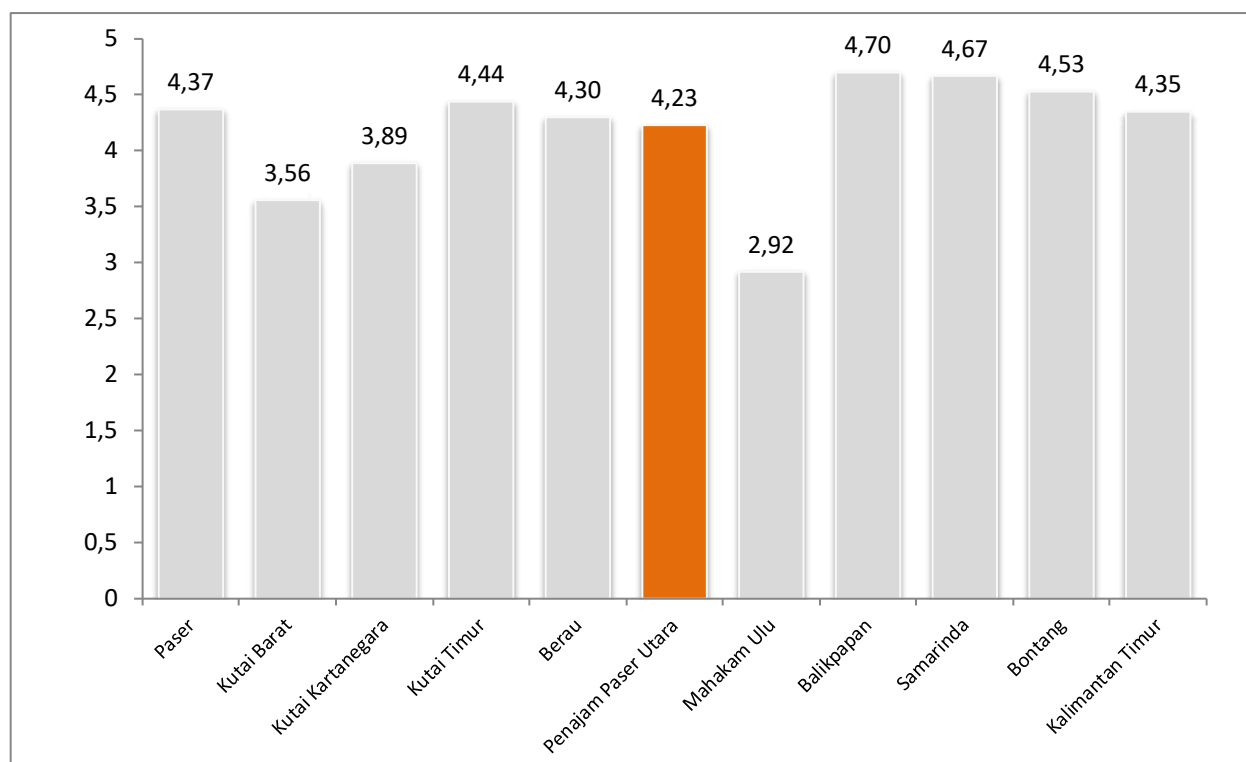


Sumber : Kementerian PAN dan RB RI, 2026

Secara umum kendala/ hambatan dalam peningkatan indeks pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara di tahun 2025 terletak pada aspek sarana prasarana yang memadai masih minim memadai di beberapa unit pelayanan, dan aspek inovasi yang belum diterapkan sesuai kebutuhan.

Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2025 berada pada urutan ke-7 tertinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota seKalimantan Timur, dan berada di atas Provinsi Kalimantan Timur.

**Grafik 3.44 Indeks Pelayanan Publik Kabupaten/ Kota
seKalimantan Timur, Prov. Kalimantan Timur Tahun 2025**



Sumber : Kementerian PAN dan RB RI, 2026

Upaya ke depan yang dapat dilakukan dalam peningkatan Indeks Pelayanan Publik, yaitu:

1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan kepada aparatur sipil negara (ASN) mengenai pelayanan prima, etika pelayanan, dan profesionalisme serta integritas;
2. Pemanfaatan teknologi digital (E-Government) dengan mengembangkan layanan berbasis digital atau online agar masyarakat dapat mengakses layanan dengan mudah;
3. Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Memadai dengan memperbaiki fasilitas pelayanan seperti ruang tunggu, sistem antrean, akses bagi penyandang disabilitas, dan fasilitas informasi, serta menjamin kenyamanan masyarakat saat mengakses layanan publik;
4. Menyediakan Mekanisme Pengaduan Masyarakat melalui saluran pengaduan dan aspirasi seperti hotline, website, atau aplikasi pengaduan, serta menindaklanjuti setiap keluhan masyarakat secara cepat dan transparan;
5. Evaluasi dan Penilaian Berkala dengan melakukan pemantauan dan evaluasi secara rutin.

3.12.2. Indeks Pemerintah Digital

Indeks Pemerintah Digital merupakan alat ukur evaluasi lanjutan dari Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) yang menilai sejauh mana instansi pemerintah memanfaatkan data, teknologi, dan strategi digital untuk transformasi birokrasi, peningkatan layanan publik, dan tata kelola yang berpusat pada manusia. Indeks Pemerintah Digital mengukur 9 aspek yaitu Strategi dan Rencana, Tata Kelola dan Manajemen, Teknologi Digital, Audit Teknologi Digital, Keamanan Siber, Kapabilitas dan Budaya Digital, Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi, Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah, dan Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah.

Indeks Pemerintah Digital yang disamakan dengan Indeks SPBE Kabupaten Penajam Paser Utara, tahun 2025 sebesar 3,28 dengan predikat Baik. Nilai ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2024 dengan indeks SPBE sebesar 2,8. Target tahun 2025 sebesar 2,90 terealisasi 3,28 dengan capaian kinerja sebesar 113,10 % atau dalam kategori Sangat Memuaskan. Realisasi tahun 2025 ini tidak dapat dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2029 karena target akhir RPJMD merupakan target Indeks Pemerintah Digital, bukan target Indeks SPBE.



Strategi ke depan yang dapat dilakukan dalam peningkatan Indeks Pemerintah Digital Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, antara lain:

1. Penguatan Infrastruktur Digital
 - a. Membangun jaringan internet yang cepat dan merata hingga daerah terpencil.
 - b. Mengembangkan pusat data nasional dan sistem komputasi awan pemerintah.
 - c. Memastikan keamanan siber untuk melindungi data dan sistem pemerintah.
2. Integrasi Sistem dan Data Pemerintah
 - a. Menghubungkan berbagai sistem informasi antar perangkat daerah agar data tidak terpisah.
 - b. Menerapkan satu data pemerintah agar data lebih akurat, konsisten, dan mudah digunakan.
 - c. Mengembangkan platform interoperabilitas antar instansi.
3. Pengembangan Layanan Publik Digital
 - a. Mengubah layanan manual menjadi layanan berbasis digital (online).
 - b. Mengembangkan portal layanan terpadu sehingga masyarakat dapat mengakses banyak layanan dalam satu platform.
4. Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur
 - a. Melatih aparatur sipil negara dalam keterampilan digital dan teknologi informasi.
 - b. Merekrut tenaga ahli di bidang teknologi, data, dan keamanan siber.
 - c. Mendorong budaya kerja yang adaptif terhadap inovasi digital.
5. Partisipasi dan Literasi Digital Masyarakat
 - a. Meningkatkan literasi digital agar masyarakat mampu menggunakan layanan digital pemerintah.
 - b. Menyediakan kanal pengaduan dan umpan balik secara online.
6. Pemanfaatan Teknologi Inovatif

Menggunakan teknologi seperti big data, kecerdasan buatan (AI), dan analitik data untuk pengambilan keputusan.

Di samping capaian kinerja tersebut di atas, berikut penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara selama tahun 2025, antara lain:

1. Terbaik I Pengelolaan Dampak Sosial Kemasyarakatan Kategori Keberhasilan Pembangunan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;



2. Terbaik II Bidang Penanggulangan Bencana Kategori Keberhasilan Pembangunan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
3. Perolehan Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Timur;
4. Penghargaan atas Program Revitalisasi Bahasa Daerah Pada Ajang Festival Bahasa Ibu Nasional 2025 dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Penghargaan atas Komitmennya dalam Pembiayaan maupun Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Air Minum dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dari Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI);
6. Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Dengan Predikat Informatif Pada Kategori Pemerintah Kabupaten/ Kota dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
7. Paritrana Award 2025 dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Realisasi Anggaran

Efektivitas dan efisiensi alokasi belanja Negara dengan mengacu kepada penerapan anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*). Belanja daerah digunakan untuk mendukung berbagai agenda kebijakan strategis dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Belanja daerah diutamakan pada program prioritas yang mendesak untuk segera dilaksanakan berupa agenda pembangunan yang mempunyai dampak terhadap pelayanan kepada masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2025 sebesar Rp 2.413.452.379.652,00, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah Rp 228.211.158.361,00, Pendapatan Transfer Rp 2.167.167.087.569,00, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 18.074.133.722,00.

Berdasarkan data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2025 *unaudited* dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara bahwa komposisi belanja daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tahun anggaran 2025 terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Transfer. Jumlah pagu anggaran belanja daerah setelah perubahan tahun 2025 sebesar Rp 2.413.452.379.652,00, dan realisasinya sebesar Rp 2.074.176.692.598,30 atau mencapai 85,94 %, dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 3.31 Komposisi Belanja Tahun Anggaran 2025

No.	Jenis Belanja	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Operasi	1.579.184.100.243,58	1.446.150.656.390,34	91,58 %
2	Belanja Modal	693.991.137.212,42	508.483.912.395,60	73,27%
3	Belanja Tak Terduga	4.000.500.000,00	832.560.453,00	20,81%
4	Belanja Transfer	166.434.530.495,00	141.350.700.237,00	84,93%
Total		2.443.610.267.951,00	2.096.817.829.475,94	85,81%



Efisiensi pada pelaporan ini dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran sasaran dengan capaian sasaran dan realisasi anggaran sasaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran sasaran dengan capaian sasaran sesuai dengan Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Jika melihat efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja pada setiap sasaran yang telah disajikan sebelumnya, secara umum rata-rata berada dalam kategori tidak efisien. Hal ini disebabkan oleh indikator dan target yang ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 masih mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah 2024 – 2026, sehingga terdapat target yang tidak realistis.

Jika rasio efisien -20 % sampai 20 %, maka penggunaan anggaran, maka dari 14 sasaran yang ada terdapat 5 sasaran dalam kategori efisien dan 9 sasaran dalam kategori inefisien. Dari 9 sasaran yang dalam kategori inefisien, 8 sasaran menjadi bahan evaluasi dalam pencermatan penentuan target di dalam dokumen perencanaan, dimana target harus dapat dicapai namun tetap menantang, dan 1 sasaran juga menjadi bahan evaluasi agar anggaran yang digunakan tepat sasaran dalam pencapaian kinerja sesuai dengan yang ditargetkan.

**Tabel 3.32 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran
Sasaran Strategis Kabupaten Penajam Paser Utara 2025**

Sasaran Strategis/ Indikator/ Program	Pagu	Realisasi	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	% Efisiensi
1. Peningkatan Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial Kepada Masyarakat Miskin dan Rentan	28.281.668.445,00	25.190.393.220,00	89,07	207,24	57,02
Persentase Masyarakat Miskin Mendapat Bantuan/ Jaminan Sosial					
Program Rehabilitasi Sosial	1.442.587.369,00	902.949.907,00			
Program Pemberdayaan Sosial	676.289.422,00	666.564.760,00			
Program perlindungan dan jaminan sosial	2.481.732.532,00	2.422.867.170,00			
Program Penanganan Bencana	303.024.320,00	82.243.699,00			
Program Penanganan Kerawanan Pangan	561.919.582,00	484.824.428,00			
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	22.816.115.220,00	20.630.943.256,00			
2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	3.600.809.891,20	3.070.435.386,00	85,27	100	14,73
Indeks Desa Membangun					
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1.788.430.191,20	1.554.551.173,00			
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	53.440.190,00	60.727.425,00			
Program Peningkatan Kerja Sama Desa	116.380.000,00	113.180.000,00			
Program Administrasi Pemerintahan Desa	1.299.651.050,00	1.240.098.549,00			
Program Penataan Desa	271.990.245,00	36.658.356,00			
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	70.918.215,00	65.219.883,00			
3. Perluasan Kesempatan Kerja serta Peningkatan Kapasitas dan Perlindungan Tenaga Kerja	8.689.088.789,00	8.325.208.888,00	95,81	46,95	-104,07
Tingkat Pengangguran Terbuka					
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	3.070.744.494,00	2.941.680.510,00			
Program Penempatan Tenaga Kerja	306.326.572,00	302.853.874,00			
Program Hubungan Industrial	3.748.042.859,00	3.598.176.135,00			
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	649.869.272,00	607.458.383,00			
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	622.913.844,00	611.566.004,00			
Program Pengembangan UMKM	291.191.748,00	263.473.982,00			
4. Peningkatan Kualitas Pendidikan	73.740.179.721,64	69.990.928.120,57	94,92	94,96	0,05
Harapan Lama Sekolah					
Rata-rata Lama Sekolah					
Program Pengelolaan Pendidikan	73.573.842.481,64	69.989.058.120,57			



Sasaran Strategis/ Indikator/ Program	Pagu	Realisasi	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	% Efisiensi
Program Pengembangan Kurikulum	145.152.000,00	-			
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	21.185.240,00	1.870.000,00			
5. Peningkatan Kualitas Kesehatan	53.417.227.997,83	48.865.591.701,00	91,48	95,42	4,13
Usia Harapan Hidup					
Prevalensi Stunting					
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	49.250.420.044,00	45.495.588.666,00			
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.693.361.541,00	1.266.288.536,00			
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	735.201.000,00	549.361.614,00			
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	198.995.480,83	170.055.790,00			
Program Pengawasan Keamanan Pangan	99.216.097,00	91.170.127,00			
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.440.033.835,00	1.293.126.968,00			
6. Peningkatan Kualitas Kehidupan Keluarga Sejahtera dan Responsif Gender	3.701.978.589,88	3.278.691.525,00	88,57	99,63	11,11
Indeks Pembangunan Gender					
Program Pengendalian Penduduk	165.780.367,18	99.893.330,00			
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.423.953.757,00	1.345.397.377,00			
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	628.987.628,00	586.726.741,00			
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	5.432.391,00	5.418.000,00			
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	11.198.820,00	10.848.000,00			
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	45.861.800,00	32.538.895,00			
Program Perlindungan Khusus Anak	93.071.861,50	88.360.387,00			
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1.186.474.299,20	976.557.432,00			
Program Perlindungan Perempuan	141.217.666,00	132.951.363,00			
7. Peningkatan Kualitas Pembangunan Kebudayaan dan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Kepemudaan yang Berwawasan Kebangsaan	26.010.241.646,00	24.879.791.169,00	95,65	157,78	39,38
Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kepemudaan, Kebudayaan dan Kemasyarakatan					
Program Pengembangan Kebudayaan	790.617.366,00	783.883.268,00			
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	126.975.062,00	102.792.750,00			
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Olahraga	15.100.526.497,00	14.374.010.593,00			
Program Pengembangan Kapasitas Keparamukaan	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00			
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	3.140.019.890,00	2.937.689.102,00			
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	436.493.123,00	422.956.610,00			



Sasaran Strategis/ Indikator/ Program		Pagu	Realisasi	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	% Efisiensi
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	256.808.120,00	234.606.097,00			
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	3.182.637.244,00	3.079.525.293,00			
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	1.288.699.600,00	1.268.196.456,00			
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	537.464.744,00	526.131.000,00			
8. Penguatan Birokrasi yang Efektif dan Efisien		24.643.086.260,46	21.273.453.209,00	86,33	117,24	26,37
Rata-rata Capaian SAKIP Perangkat Daerah						
Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah						
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	512.424.838,83	405.519.563,00			
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	716.923.000,00	643.375.049,00			
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.616.876.801,05	752.488.130,00			
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	697.812.884,00	641.423.429,00			
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	9.383.621.242,00	8.720.810.314,00			
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	1.288.699.600,00	1.268.196.456,00			
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	3.812.321.650,00	3.029.460.024,00			
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.394.527.123,62	2.283.899.030,00			
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1.044.719.650,00	478.595.940,00			
	Program Kepegawaian Daerah	1.659.219.018,96	1.557.413.375,00			
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.515.940.452,00	1.492.271.899,00			
9. Peningkatan Pelayanan Prima Kepada Publik		338.102.519.906,96	330.245.815.904,00	97,68	99,79	2,12
Indeks Kepuasan Masyarakat						
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	352.419.826,00	256.527.718,00			
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	200.968.878,00	176.845.461,00			
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	3.624.418.177,00	3.289.701.149,00			
	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	38.172.308.753,23	37.151.870.391,00			
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	587.596.850,00	482.330.652,00			
	Program Pencatatan Sipil	178.653.545,00	160.123.507,00			



Sasaran Strategis/ Indikator/ Program	Pagu	Realisasi	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	% Efisiensi
Program Pendaftaran Penduduk	705.868.369,00	628.571.468,00			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	293.990.545.399,73	287.836.911.115,00			
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	25.920.000,00	18.599.999,00			
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	263.820.109,00	244.334.444,00			
10. Peningkatan Kontribusi PDRB Sektor Non Pertambangan dan Penggalian	32.607.717.008,88	23.161.137.480,00	71,03	144,19	50,74
LPE Non Pertambangan dan Penggalian					
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	361.936.482,00	214.586.500,00			
Program Perizinan Usaha Pertanian	32.168.020,00	31.737.220,00			
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	12.314.587.768,00	8.179.379.430,00			
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.633.093.478,00	1.222.968.339,00			
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	174.298.422,00	158.767.323,00			
Program Penyuluhan Pertanian	797.422.235,00	752.233.494,00			
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	186.416.006,00	135.954.700,00			
Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	19.734.170,00	17.900.000,00			
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.554.629.386,00	1.083.132.727,00			
Program Pengendalian Izin Usaha Industri	5.100.000,00	5.020.000,00			
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	2.821.000,00	2.660.000,00			
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	2.173.723.805,88	848.918.637,00			
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	78.161.002,00	64.868.555,00			
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	2.289.539.135,00	1.864.298.673,00			
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	6.723.833.848,00	4.520.651.689,00			
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	417.546.580,00	404.793.801,00			
Program Pemasaran Pariwisata	2.019.838.195,00	1.996.766.164,00			
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	408.980.124,00	350.784.688,00			
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	9.583.600,00	8.670.000,00			
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	302.611.400,00	269.345.900,00			
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	189.332.950,00	187.828.073,00			



Sasaran Strategis/ Indikator/ Program		Pagu	Realisasi	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	% Efisiensi
	Program Perekonomian dan Pembangunan	688.242.633,00	626.265.557,00			
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	13.738.250,00	13.610.000,00			
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	210.378.519,00	199.996.010,00			
11. Optimalisasi Capaian Investasi/ Penanaman Modal Investor di Daerah		407.946.972,00	370.206.950,00	90,75	157,51	42,39
Nilai Realisasi PMDN dan PMA						
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	37.926.981,00	33.830.646,00			
	Program Promosi Penanaman Modal	8.424.000,00	8.412.578,00			
	Program Pelayanan Penanaman Modal	129.671.076,00	116.924.386,00			
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	199.750.671,00	181.854.940,00			
	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	32.174.244,00	29.184.400,00			
12. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		11.867.771.925,00	9.950.931.991,00	83,85	108,23	22,53
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup						
	Program Pengelolaan Persampahan	6.920.020.254,00	5.827.839.192,00			
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	33.903.440,00	27.512.625,00			
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	15.567.100,00	14.499.840,00			
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	468.149.228,00	462.950.232,00			
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	4.203.847.868,00	3.400.318.855,00			
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	10.414.000,00	10.374.800,00			
	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	48.696.150,00	46.944.200,00			
	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	6.503.000,00	6.237.345,00			
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	145.176.735,00	139.044.928,00			
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	15.494.150,00	15.209.974,00			
13. Peningkatan Ketahanan Kebencanaan		1.773.429.601,00	1.557.366.946,00	87,82	136,28	35,56
Indeks Risiko Bencana						
	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	723.840.782,00	716.203.971,00			



Sasaran Strategis/ Indikator/ Program		Pagu	Realisasi	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	% Efisiensi
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	995.866.243,00	788.054.455,00			
	Program Penanggulangan Bencana	53.722.576,00	53.108.520,00			
14. Peningkatan Pelayanan Infrastruktur		39.866.107.549,06	31.068.078.384,00	77,93	120,35	35,25
Persentase Pemenuhan Rumah Layak Huni						
Persentase Jalan Mantap						
	Program Pengembangan Perumahan	8.486.493.245,00	5.707.216.197,00			
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	2.263.060.608,00	1.528.480.830,00			
	Program Kawasan Permukiman	1.387.107.652,00	663.638.041,00			
	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	35.721.080,00	34.698.442,00			
	Program Penyelenggaraan Jalan	15.992.492.811,00	15.025.274.691,00			
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	500.000.000,00	448.602.358,00			
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	678.783.000,00	287.087.534,00			
	Program Pengelolaan Pelayaran	353.767.919,20	142.836.207,00			
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	3.155.939.234,00	2.467.293.470,00			
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	1.285.726.275,00	1.049.515.737,00			
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	2.376.596.129,86	1.178.794.929,00			
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	473.160.000,00	246.312.696,00			
	Program Penataan Bangunan Gedung	2.877.259.595,00	2.288.327.252,00			



Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai bentuk upaya pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan serta sebagai tolak ukur untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pemerintah daerah dalam rangka perwujudan *good governance* dengan penetapan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsif, dan berkeadilan.

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2025 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian tujuan atau sasaran strategis yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam upayanya mencapai seluruh kinerja yang direncanakan dan ditetapkan pada tahun 2025.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dari 14 sasaran strategis diperoleh rata-rata sebesar 121,97 persen, dimana sebanyak 8 sasaran sudah mencapai target atau lebih dari 100 persen, 1 sasaran masih dalam kategori Kurang dan sisanya berada di antara 90 sampai 100 persen. Sasaran strategis dengan jumlah 26 indikator yang terdiri dari 8 indikator tujuan dan 18 indikator sasaran. Sebanyak 22 indikator atau sebanyak 84,62 persen dalam kategori Sangat Memuaskan, 1 indikator atau sebanyak 3,85 persen dalam kategori Memuaskan, 1 indikator atau 3,85 persen dalam kategori Baik, 1 indikator atau 3,85 persen dalam kategori Cukup, sementara 1 indikator dalam kategori Sangat Kurang.

Dalam hal efisiensi penggunaan sumber daya anggaran terlihat bahwa terdapat sasaran dengan kategori tidak efisien, hal ini disebabkan adanya rasio realisasi kinerja jauh lebih besar dari anggaran, sehingga perlu evaluasi dalam menetapkan target di dalam perencanaan agar lebih realistis.

Secara umum capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2025 sudah sangat baik, namun masih terdapat sasaran yang belum mencapai 100 persen seperti yang ditargetkan. Capaian kinerja yang belum sepenuhnya dapat tercapai 100 persen ini menjadi suatu motivasi untuk dapat meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Dari hasil capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2025, dapat dirumuskan beberapa strategi solusi ke depan yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan dan penyempurnaan kinerja yang lebih baik, antara lain:



1. Melakukan perbaikan pada dokumen penjenjangan kinerja dengan menyelaraskan tujuan/sasaran strategis, indikator, dan target kinerja dari tingkat tertinggi hingga level operasional yang memperhatikan logical framework dan critical success factor;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi serta perbaikan secara berkala atas pengukuran kinerja agar dapat dilakukan upaya perbaikan kinerja yang masih belum optimal serta sebagai bahan pertimbangan perencanaan pembangunan di masa mendatang;
3. Melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap dokumen perencanaan sehingga memenuhi kriteria SMART. Terutama pada penentuan target pada indikator kinerja, dimana target harus realistis, dapat dicapai namun tetap menantang.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi serta perbaikan secara berkala atas efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan agar dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
5. Melakukan koordinasi dan konsolidasi organisasi dalam rangka memperkuat komitmen semua aparatur Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara terhadap peningkatan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
6. Mendorong lahirnya strategi atau inovasi baru untuk menciptakan solusi dalam mengatasi kendala atas permasalahan pencapaian kinerja dengan tujuan perbaikan atau perubahan positif demi kepuasan pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder dan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama tahun 2025, sehingga program dan kegiatan pemerintah dapat terlaksana.

Akhirnya, besar harapan kami Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara ini mampu dijadikan sebagai alat pertanggungjawaban publik yang transparan dan akuntabel, serta dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk evaluasi dalam melakukan pengelolaan kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang.



LAMPIRAN



Rencana Kinerja Tahunan

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2025**

Tujuan 1. Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Pemerataan Kesejahteraan			
	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Persentase Kemiskinan	Persen	%
2	Rasio Gini	Rasio	
Sasaran Strategis 1.1. Peningkatan Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial kepada Masyarakat Miskin dan Rentan			
	Persentase Masyarakat Miskin Mendapat Bantuan/Jaminan Sosial	Persen	%
Sasaran Strategis 1.2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat			
	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,8255 (Mandiri) Mandiri : 22 Desa Maju : 8 Desa Berkembang : 0 Desa
Sasaran Strategis 1.3. Perluasan Kesempatan Kerja serta Peningkatan Kapasitas dan Perlindungan Tenaga Kerja			
	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2,00 %
Tujuan 2. Meningkatkan Kualitas Hidup SDM			
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	75
Sasaran Strategis 2.1. Peningkatan Kualitas Pendidikan			
	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,45 Tahun
	Rata - Rata Lama Sekolah	Tahun	9,35 Tahun

	Indikator Kinerja	Satuan	Target
	Sasaran Strategis 2.2. Peningkatan Kualitas Kesehatan		
	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,50 Tahun
	Prevalensi Stunting	Persen	10,92 %
	Sasaran Strategis 2.3. Peningkatan Kualitas Kehidupan Keluarga Sejahtera dan Responsif Gender		
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		87,55 %
	Sasaran Strategis 2.4. Peningkatan Kualitas Pembangunan Kebudayaan dan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Kepemudaan yang Berwawasan Kebangsaan		
	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kepemudaan, Kebudayaan dan Kemasyarakatan	Persen	45 %
Tujuan 3. Meningkatkan standar tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			
	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Indeks	63,70 (Baik)
	Indeks SPBE	Indeks	3 (Baik)
	Sasaran Strategis 3.1. Penguatan Birokrasi yang Efektif dan Efisien		
	Rata - Rata Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Kategori	B
	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	8,50
	Sasaran Strategis 3.2. Peningkatan Pelayanan Prima Kepada Publik		
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85,88
Tujuan 4. Peningkatan Transformasi Ekonomi yang Berdaya Saing			
	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	10,00
	Sasaran Strategis 4.1. Peningkatan Kontribusi PDRB Sektor Non Pertambangan dan Penggalian		
	LPE Non Pertambangan dan Penggalian	Persen	4,82

	Indikator Kinerja	Satuan	Target
	Sasaran Strategis 4.2. Optimalisasi Capaian Investasi/ Penanaman Modal di Daerah		
	Nilai Realisasi PMDN & PMA	Rupiah	Rp 1.053.366.000.000
Tujuan 5. Peningkatan Pelayanan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan			
	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	67 (Cukup)
	Persentase Penurunan Emisi GRK	Persen	24,40 %
	Sasaran Strategis 5.1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	71,85
	Sasaran Strategis 5.2. Peningkatan Ketahanan Kebencanaan		
	Indeks Resiko Bencana	Indeks	120,66
	Sasaran Strategis 5.3. Peningkatan Pelayanan Infrastruktur		
	Persentase Pemenuhan Rumah Layak Huni	Persen	65,00 %
	Persentase Jalan Mantap	Persen	30,00 %



Perjanjian Kinerja

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

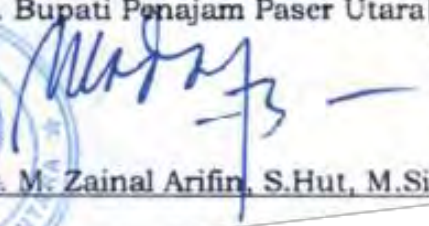
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Drs. M. Zainal Arifin, S.Hut, M.Si

Jabatan : Pj. Bupati Penajam Paser Utara

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Penajam, 20 Januari 2025
Pj. Bupati Penajam Paser Utara

Dr. M. Zainal Arifin, S.Hut, M.Si



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PEMERINTAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	(1)	(2)	(3)
1	Peningkatan Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial kepada Masyarakat Miskin dan Rentan	Persentase Kemiskinan	5,50 %
		Rasio Gini	0,275
		Persentase Masyarakat Miskin Mendapat Bantuan/Jaminan Sosial	47,80 %
2	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75
		Indeks Desa Membangun	0,8255 (Mandiri) Mandiri : 22 Desa Maju : 8 Desa Berkembang : 0
3	Perluasan Kesempatan Kerja serta Peningkatan Kapasitas dan Perlindungan Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,00 %
4	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	13,45 Tahun
		Rata - Rata Lama Sekolah	9,35 Tahun

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	(1)	(2)	(3)
5	Peningkatan Kualitas Kesehatan	Usia Harapan Hidup	74,50 Tahun
		Prevalensi Stunting	10,92 %
6	Peningkatan Kualitas Kehidupan Keluarga Sejahtera dan Responsif Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	87,55 %
7	Peningkatan Kualitas Pembangunan Kebudayaan dan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Kepemudaan yang Berwawasan Kebangsaan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kepemudaan, Kebudayaan dan Kemasyarakatan	45 %
8	Penguatan Birokrasi yang Efektif dan Efisien	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	63,70 (Baik)
		Rata - Rata Capaian SAKIP Perangkat Daerah	B
		Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	8,50
9	Peningkatan Pelayanan Prima Kepada Publik	Indeks SPBE	3 (Baik)
		Indeks Kepuasan Masyarakat	85,88
10	Peningkatan Kontribusi PDRB Sektor Non Pertambangan dan Penggalian	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	10,00
		LPE Non Pertambangan dan Penggalian	4,82

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	(1)	(2)	(3)
11	Optimalisasi Capaian Investasi/ Penanaman Modal di Daerah	Nilai Realisasi PMDN & PMA	Rp 1.053.366.000.000
12	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase Penurunan Emisi GRK	24,40 %
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,85
13	Peningkatan Ketahanan Kebencanaan	Indeks Resiko Bencana	120,66
14	Peningkatan Pelayanan Infrastruktur	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	67 (Cukup)
		Persentase Pemenuhan Rumah Layak Huni	65,00 %
		Persentase Jalan Mantap	30,00 %

No.	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Administrasi Pemerintahan Desa	2.406.367.104,00
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	42.166.619.176,00
3	Program Hubungan Industrial	3.617.450.000,00
4	Program Kawasan Permukiman	2.208.263.914,00
5	Program Kepegawaian Daerah	3.040.333.516,50
6	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	956.055.112,53
7	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	6.842.688.500,00
8	Program Pelayanan Penanaman Modal	316.585.276,00
9	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	166.241.407,00
10	Program Pemasaran Pariwisata	2.295.843.000,00
11	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	291.652.887,00
12	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.540.472.083,00
13	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	196.102.800,00
14	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	2.106.575.040,30
15	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	449.216.209,00
16	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	28.099.619.891,00
17	Program Pemberdayaan Sosial	949.554.968,00
18	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	758.252.400,00
19	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	451.467.205,00
20	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	42.685.170,00

No.	Program	Anggaran (Rp)
21	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	527.623.933,00
22	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1.549.084.736,00
23	Program Pembinaan Perpustakaan	973.486.185,61
24	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	71.520.328,00
25	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	126.715.183.023,00
26	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	30.882.387.937,22
27	Program Penanganan Bencana	375.309.840,00
28	Program Penanganan Kerawanan Pangan	615.994.645,00
29	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	76.022.150,00
30	Program Penanggulangan Bencana	3.096.604.107,00
31	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	12.285.416.921,00
32	Program Penataan Bangunan Gedung	2.171.492.000,00
33	Program Penataan Desa	489.939.335,00
34	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	222.489.045,00
35	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.902.002.371,00
36	Program Pendaftaran Penduduk	730.523.553,00
37	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	9.985.240,00
38	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.485.961.376,00
39	Program Penempatan Tenaga Kerja	489.768.837,00
40	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	6.503.000,00

No.	Program	Anggaran (Rp)
41	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1.225.244.629,00
42	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	27.476.500,00
43	Program Pengawasan Keamanan Pangan	120.235.501,00
44	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	206.859.134,00
45	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	5.972.790.069,00
46	Program Pengelolaan Arsip	622.248.348,24
47	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	864.715.337,00
48	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	500.000.000,00
49	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	22.144.559.614,00
50	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	4.900.000.000,00
51	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	62.359.936,00
52	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	513.422.824,00
53	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	35.717.119.973,00
54	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	46.800.032.720,00
55	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	195.141.829.342,00
56	Program Pengelolaan Pelayaran	932.321.200,00
57	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.708.425.921,00
58	Program Pengelolaan Pendidikan	176.730.035.564,20
59	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	6.506.998.506,00
60	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	2.283.107.683,00

No.	Program	Anggaran (Rp)
61	Program Pengelolaan Persampahan	9.615.699.251,00
62	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	54.529.668,00
63	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	18.599.000,00
64	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	8.012.000,00
65	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	63.360.201.633,00
66	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	198.054.614,00
67	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	9.583.600,00
68	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	383.012.235,00
69	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	912.927.000,00
70	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	25.921.884.006,60
71	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.177.614.828,00
72	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	500.000.000,00
73	Program Pengembangan Kebudayaan	1.079.100.459,00
74	Program Pengembangan Perumahan	9.996.978.987,00
75	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.028.258.273,68
76	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	159.511.400,00
77	Program Pengembangan UMKM	783.249.600,00
78	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	20.679.800,00
79	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	42.859.568,00
80	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	22.115.400,00

No.	Program	Anggaran (Rp)
81	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	254.555.921,00
82	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	156.619.510,00
83	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	617.560.720,00
84	Program Pengendalian Penduduk	185.387.582,00
85	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	267.374.550,00
86	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	518.946.815,00
87	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	3.796.562.811,05
88	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	353.696.800,00
89	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.605.174.291,00
90	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.872.674.863,00
91	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	233.116.600,00
92	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.004.705.614,00
93	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	3.384.484.000,00
94	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	8.398.488,00
95	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	19.611.150,00
96	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	1.411.949.600,00
97	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	70.550.504.820,00
98	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	5.699.408.050,00
99	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.252.558.280.472,62
100	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	5.261.731.335,00

No.	Program	Anggaran (Rp)
101	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	10.993.227.308,00
102	Program Penyelenggaraan Jalan	283.700.691.403,47
103	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	14.513.355.084,00
104	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	14.606.517.562,00
105	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	873.604.000,00
106	Program Penyelenggaraan Pengawasan	3.843.114.650,00
107	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	699.790.174,00
108	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	337.188.830,00
109	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	3.427.777.894,00
110	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	586.119.530,00
111	Program Penyuluhan Pertanian	776.929.419,00
112	Program Perekonomian dan Pembangunan	4.802.660.024,93
113	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	1.759.364.015,05
114	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	60.122.267,00
115	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	423.712.100,00
116	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.750.508.807,00
117	Program Perizinan Usaha Pertanian	90.776.585,00
118	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	2.792.489.856,00
119	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	38.220.485,00
120	Program Perlindungan Khusus Anak	560.113.848,00

No.	Program	Anggaran (Rp)
121	Program Perlindungan Perempuan	742.418.292,00
122	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	2.916.790.000,00
123	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1.096.222.690,00
124	Program Promosi Penanaman Modal	16.640.000,00
125	Program Rehabilitasi Sosial	2.101.777.102,00
126	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	735.201.000,00
127	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	443.408.940,00
128	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	38.885.740,00
Jumlah Anggaran		2.610.340.369.946,00

Penajam, 20 Januari 2025
Pj. Bupati Penajam Paser Utara

Dr. M. Zainal Arifin, S.Hut, M.Si



Pengukuran Kinerja

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025 TERHADAP TARGET RPD 2024 - 2026

Tujuan 1. Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Pemerataan Kesejahteraan							
	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2024	Tahun 2025			Target Akhir RPD (2026)	Capaian 2025 Terhadap Target Akhir RPD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
	Persentase Kemiskinan	6,69	5,50 %	5,78	95,16	6,62	114,53
	Rasio Gini	0,258	0,275	0,319	86,21	0,255	79,94
Sasaran Strategis 1.1. Peningkatan Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial kepada Masyarakat Miskin dan Rentan							
	Persentase Masyarakat Miskin Mendapat Bantuan/Jaminan Sosial	70,19	47,80 %	99,06	207,24	100	99,06
Sasaran Strategis 1.2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat							
	Indeks Desa Membangun	0,8205 (Mandiri) Mandiri : 21 Desa Maju : 9 Desa Berkembang : 0 Desa	0,8255(Mandiri) Mandiri : 22 Desa Maju : 8 Desa Berkembang : 0 Desa	- Mandiri : 22 Desa Maju : 8 Desa Berkembang : 0 Desa	100	0,8305 (Mandiri) Mandiri : 25 Desa Maju : 5 Desa	-
Sasaran Strategis 1.3. Perluasan Kesempatan Kerja serta Peningkatan Kapasitas dan Perlindungan Tenaga Kerja							
	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,05	2,00 %	4,26	46,95	1,95	45,77
Tujuan 2. Meningkatkan Kualitas Hidup SDM							
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,94	75	75,82	101,09	75,00	101,09
Sasaran Strategis 2.1. Peningkatan Kualitas Pendidikan							
	Harapan Lama Sekolah	12,87	13,45 Tahun	13,00	96,65	13,85	93,86
	Rata - Rata Lama Sekolah	8,57	9,35 Tahun	8,72	93,26	9,85	88,53

	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2024	Tahun 2025			Target Akhir RPD (2026)	Capaian 2025 Terhadap Target Akhir RPD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
	Sasaran Strategis 2.2. Peningkatan Kualitas Kesehatan						
	Usia Harapan Hidup	74,27	74,50 Tahun	74,60	100,13	74,50	100,13
	Prevalensi Stunting	11,55	10,92 %	12,04	90,70	10,05	83,47
	Sasaran Strategis 2.3. Peningkatan Kualitas Kehidupan Keluarga Sejahtera dan Responsif Gender						
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	86,93	87,55 %	87,23	99,63	87,85	99,29
	Sasaran Strategis 2.4. Peningkatan Kualitas Pembangunan Kebudayaan dan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Kepemudaan yang Berwawasan Kebangsaan						
	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kepemudaan, Kebudayaan dan Kemasyarakatan	95	45 %	71	157,78	55	129,09
Tujuan 3. Meningkatkan standar tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik							
	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	68,5	63,70 (Baik)	70,36	110,46	65,50	107,42
	Indeks SPBE	2,87 (Baik)	3 (Baik)	3,28	109,33	3 (Baik)	109,33
	Sasaran Strategis 3.1. Penguatan Birokrasi yang Efektif dan Efisien						
	Rata - Rata Capaian SAKIP Perangkat Daerah	B	B	BB (70,31)	123,18	B	123,18
	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	6,12	8,50	9,46	111,29	9,50	99,58
	Sasaran Strategis 3.2. Peningkatan Pelayanan Prima Kepada Publik						
	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,57	85,88	85,70	99,79	90,07	95,15
Tujuan 4. Peningkatan Transformasi Ekonomi yang Berdaya Saing							
	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	30,68	10,00	6,52	65,20	10	65,20

	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2024	Tahun 2025			Target Akhir RPD (2026)	Capaian 2025 Terhadap Target Akhir RPD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
	Sasaran Strategis 4.1. Peningkatan Kontribusi PDRB Sektor Non Pertambangan dan Penggalian						
	LPE Non Pertambangan dan Penggalian	33,16	4,82	6,95	144,19	4,83	143,89
	Sasaran Strategis 4.2. Optimalisasi Capaian Investasi/ Penanaman Modal di Daerah						
	Nilai Realisasi PMDN & PMA	Rp 3.705.197.869.077	Rp 1.053.366.000.000	1.659.150.735.922	157,51	1.068.366.000.000	155,30
Tujuan 5. Peningkatan Pelayanan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan							
	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	-	67 (Cukup)	89,39 (Sangat Baik)	133,42	70	127,70
	Persentase Penurunan Emisi GRK	-	24,40 %	-186,36	-763,77	25,50	-730,82
	Sasaran Strategis 5.1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup						
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,1	71,85	77,76	108,23	71,96	108,06
	Sasaran Strategis 5.2. Peningkatan Ketahanan Kebencanaan						
	Indeks Resiko Bencana	131,81	120,66	88,54	136,28	120,66	136,28
	Sasaran Strategis 5.3. Peningkatan Pelayanan Infrastruktur						
	Persentase Pemenuhan Rumah Layak Huni	64,23	65,00 %	65,59	100,91	67	97,90
	Persentase Jalan Mantap	33,38	30,00 %	41,04	139,80	32	131,06

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025 TERHADAP TARGET RPJMD 2025 -2029

Tujuan 1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing							
	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2024	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD (2029)	Capaian 2025 Terhadap Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
	Indeks Pembangunan Manusia	74,94	75,00	75,82	101,09	76,97	98,51
	Sasaran Strategis 1.1. Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan						
	Rata-Rata Lama Sekolah	8,57	8,59	8,72	101,51	8,69	100,35
	Harapan Lama Sekolah	12,87	12,92	13,00	100,62	13,17	98,71
	Rapor Pendidikan	-	74,09	74,51	100,00	81	91,47
	Sasaran Strategis 1.2. Derajat Kesehatan Masyarakat Semakin Meningkat						
	Usia Harapan Hidup	74,27	74,51	74,60	100,12	75,19	99,22
	Sasaran Strategis 1.3. Meningkatnya Kesenjangan Gender						
	Indeks Ketimpangan Gender	0.470	0,460	0,474	97,05	0,424	89,45
	Sasaran Strategis 1.4. Meningkatnya Harmoni Sosial Budaya Masyarakat						
	Indeks Harmoni Indonesia	-	7,00	-	-	7,80	-
Tujuan 2. Ekonomi Daerah yang Menyejahterakan, Berkeadilan, dan Berkelanjutan							
	Laju Pertumbuhan Ekonomi	30,68	7,00	6,52	93,14	9,4	69,36
	Indeks Gini	0,258	0,256	0,319	80,25	0,238	74,61
	Sasaran Strategis 2.1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah						
	Kontribusi Pertanian terhadap PDRB (Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan)	12.26	15,89	12,76	80,30	19,32	66,05
	Nilai Investasi	3.705.197.869.077,00	1.053.000.000.000,00	1.515.050.180.453,00	143,88	1.167.328.800.000,00	129,79

	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2024	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD (2029)	Capaian 2025 Terhadap Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
	Sasaran Strategis 2.2. Menurunnya Kemiskinan						
	Tingkat Kemiskinan	6,69	4,40	5,78	76,12	4,32	74,74
	Sasaran Strategis 2.3. Menurunnya Pengangguran						
	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,05	2,02	4,26	47,42	1,92	45,07
	Sasaran Strategis 2.4. Meningkatnya Ketahanan Pangan						
	Indeks Ketahanan Pangan	88,11	88,61	75,40	85,09	90,61	83,21
	Sasaran Strategis 2.5. Meningkatnya Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas						
	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	-	7,65	6,71	87,71	7,85	85,48
	Sasaran Strategis 2.6. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Bencana						
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,1	76,31	77,76	101,90	76,99	101,00
	Indeks Risiko Bencana	131,81	123,81	88,54	139,84	91,81	103,69
Tujuan 3.1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas							
	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	69,53	69,80	70,36	100,80	70,32	100,06
	Sasaran Strategis 3.1. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Kolaboratif						
	Nilai AKIP Pemerintah Daerah	62,19	64,00	61,14	95,53	69,80	87,59
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	53,631	55	81,545	148,26	59	138,21
	Survei Penilaian Integritas KPK	61,28	62	71,80	115,81	68	105,59
	Sasaran Strategis 3.2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital						
	Indeks Pelayanan Publik	3,75	3,76	4,23	112,50	3,82	110,73
	Indeks Pemerintah Digital	2,87	2,90	3,28	113,10	1,90	-



Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

**EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2025**

Sasaran Strategis/ Indikator/ Program	Pagu	Realisasi	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	% Efisiensi
1. Peningkatan Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial Kepada Masyarakat Miskin dan Rentan	28.281.668.445,00	25.190.393.220,00	89,07	207,24	57,02
Persentase Masyarakat Miskin Mendapat Bantuan/ Jaminan Sosial					
Program Rehabilitasi Sosial	1.442.587.369,00	902.949.907,00			
Program Pemberdayaan Sosial	676.289.422,00	666.564.760,00			
Program perlindungan dan jaminan sosial	2.481.732.532,00	2.422.867.170,00			
Program Penanganan Bencana	303.024.320,00	82.243.699,00			
Program Penanganan Kerawanan Pangan	561.919.582,00	484.824.428,00			
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	22.816.115.220,00	20.630.943.256,00			
2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	3.600.809.891,20	3.070.435.386,00	85,27	100	14,73
Indeks Desa Membangun					
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1.788.430.191,20	1.554.551.173,00			
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	53.440.190,00	60.727.425,00			
Program Peningkatan Kerja Sama Desa	116.380.000,00	113.180.000,00			
Program Administrasi Pemerintahan Desa	1.299.651.050,00	1.240.098.549,00			
Program Penataan Desa	271.990.245,00	36.658.356,00			
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	70.918.215,00	65.219.883,00			

Sasaran Strategis/ Indikator/ Program	Pagu	Realisasi	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	% Efisiensi
3. Perluasan Kesempatan Kerja serta Peningkatan Kapasitas dan Perlindungan Tenaga Kerja	8.689.088.789,00	8.325.208.888,00	95,81	46,95	-104,07
Tingkat Pengangguran Terbuka					
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	3.070.744.494,00	2.941.680.510,00			
Program Penempatan Tenaga Kerja	306.326.572,00	302.853.874,00			
Program Hubungan Industrial	3.748.042.859,00	3.598.176.135,00			
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	649.869.272,00	607.458.383,00			
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	622.913.844,00	611.566.004,00			
Program Pengembangan UMKM	291.191.748,00	263.473.982,00			
4. Peningkatan Kualitas Pendidikan	73.740.179.721,64	69.990.928.120,57	94,92	94,96	0,05
Harapan Lama Sekolah					
Rata-rata Lama Sekolah					
Program Pengelolaan Pendidikan	73.573.842.481,64	69.989.058.120,57			
Program Pengembangan Kurikulum	145.152.000,00	-			
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	21.185.240,00	1.870.000,00			
5. Peningkatan Kualitas Kesehatan	53.417.227.997,83	48.865.591.701,00	91,48	95,42	4,13
Usia Harapan Hidup					
Prevalensi Stunting					
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	49.250.420.044,00	45.495.588.666,00			
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.693.361.541,00	1.266.288.536,00			
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	735.201.000,00	549.361.614,00			
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	198.995.480,83	170.055.790,00			

Sasaran Strategis/ Indikator/ Program		Pagu	Realisasi	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	% Efisiensi
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	99.216.097,00	91.170.127,00			
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.440.033.835,00	1.293.126.968,00			
6. Peningkatan Kualitas Kehidupan Keluarga Sejahtera dan Responsif Gender		3.701.978.589,88	3.278.691.525,00	88,57	99,63	11,11
Indeks Pembangunan Gender						
	Program Pengendalian Penduduk	165.780.367,18	99.893.330,00			
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.423.953.757,00	1.345.397.377,00			
	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	628.987.628,00	586.726.741,00			
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	5.432.391,00	5.418.000,00			
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	11.198.820,00	10.848.000,00			
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	45.861.800,00	32.538.895,00			
	Program Perlindungan Khusus Anak	93.071.861,50	88.360.387,00			
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1.186.474.299,20	976.557.432,00			
	Program Perlindungan Perempuan	141.217.666,00	132.951.363,00			
7. Peningkatan Kualitas Pembangunan Kebudayaan dan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Kepemudaan yang Berwawasan Kebangsaan		26.010.241.646,00	24.879.791.169,00	95,65	157,78	39,38
Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kepemudaan, Kebudayaan dan Kemasyarakatan						
	Program Pengembangan Kebudayaan	790.617.366,00	783.883.268,00			
	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	126.975.062,00	102.792.750,00			
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	15.100.526.497,00	14.374.010.593,00			
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00			

Sasaran Strategis/ Indikator/ Program		Pagu	Realisasi	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	% Efisiensi
	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	3.140.019.890,00	2.937.689.102,00			
	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	436.493.123,00	422.956.610,00			
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	256.808.120,00	234.606.097,00			
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	3.182.637.244,00	3.079.525.293,00			
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	1.288.699.600,00	1.268.196.456,00			
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	537.464.744,00	526.131.000,00			
8. Penguatan Birokrasi yang Efektif dan Efisien		24.643.086.260,46	21.273.453.209,00	86,33	117,24	26,37
Rata-rata Capaian SAKIP Perangkat Daerah						
Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah						
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	512.424.838,83	405.519.563,00			
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	716.923.000,00	643.375.049,00			
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.616.876.801,05	752.488.130,00			
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	697.812.884,00	641.423.429,00			
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	9.383.621.242,00	8.720.810.314,00			
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	1.288.699.600,00	1.268.196.456,00			
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	3.812.321.650,00	3.029.460.024,00			
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.394.527.123,62	2.283.899.030,00			

Sasaran Strategis/ Indikator/ Program		Pagu	Realisasi	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	% Efisiensi
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1.044.719.650,00	478.595.940,00			
	Program Kepegawaian Daerah	1.659.219.018,96	1.557.413.375,00			
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.515.940.452,00	1.492.271.899,00			
9. Peningkatan Pelayanan Prima Kepada Publik		338.102.519.906,96	330.245.815.904,00	97,68	99,79	2,12
Indeks Kepuasan Masyarakat						
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	352.419.826,00	256.527.718,00			
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	200.968.878,00	176.845.461,00			
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	3.624.418.177,00	3.289.701.149,00			
	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	38.172.308.753,23	37.151.870.391,00			
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	587.596.850,00	482.330.652,00			
	Program Pencatatan Sipil	178.653.545,00	160.123.507,00			
	Program Pendaftaran Penduduk	705.868.369,00	628.571.468,00			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	293.990.545.399,73	287.836.911.115,00			
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	25.920.000,00	18.599.999,00			
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	263.820.109,00	244.334.444,00			
10. Peningkatan Kontribusi PDRB Sektor Non Pertambangan dan Penggalian		32.607.717.008,88	23.161.137.480,00	71,03	144,19	50,74
LPE Non Pertambangan dan Penggalian						
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	361.936.482,00	214.586.500,00			
	Program Perizinan Usaha Pertanian	32.168.020,00	31.737.220,00			
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	12.314.587.768,00	8.179.379.430,00			

Sasaran Strategis/ Indikator/ Program	Pagu	Realisasi	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	% Efisiensi
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.633.093.478,00	1.222.968.339,00			
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	174.298.422,00	158.767.323,00			
Program Penyuluhan Pertanian	797.422.235,00	752.233.494,00			
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	186.416.006,00	135.954.700,00			
Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	19.734.170,00	17.900.000,00			
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.554.629.386,00	1.083.132.727,00			
Program Pengendalian Izin Usaha Industri	5.100.000,00	5.020.000,00			
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	2.821.000,00	2.660.000,00			
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	2.173.723.805,88	848.918.637,00			
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	78.161.002,00	64.868.555,00			
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	2.289.539.135,00	1.864.298.673,00			
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	6.723.833.848,00	4.520.651.689,00			
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	417.546.580,00	404.793.801,00			
Program Pemasaran Pariwisata	2.019.838.195,00	1.996.766.164,00			
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	408.980.124,00	350.784.688,00			
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	9.583.600,00	8.670.000,00			
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	302.611.400,00	269.345.900,00			
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	189.332.950,00	187.828.073,00			
Program Perekonomian dan Pembangunan	688.242.633,00	626.265.557,00			
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	13.738.250,00	13.610.000,00			

Sasaran Strategis/ Indikator/ Program	Pagu	Realisasi	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	% Efisiensi
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	210.378.519,00	199.996.010,00			
11. Optimalisasi Capaian Investasi/ Penanaman Modal Investor di Daerah	407.946.972,00	370.206.950,00	90,75	157,51	42,39
Nilai Realisasi PMDN dan PMA					
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	37.926.981,00	33.830.646,00			
Program Promosi Penanaman Modal	8.424.000,00	8.412.578,00			
Program Pelayanan Penanaman Modal	129.671.076,00	116.924.386,00			
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	199.750.671,00	181.854.940,00			
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	32.174.244,00	29.184.400,00			
12. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	11.867.771.925,00	9.950.931.991,00	83,85	108,23	22,53
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup					
Program Pengelolaan Persampahan	6.920.020.254,00	5.827.839.192,00			
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	33.903.440,00	27.512.625,00			
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	15.567.100,00	14.499.840,00			
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	468.149.228,00	462.950.232,00			
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	4.203.847.868,00	3.400.318.855,00			
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	10.414.000,00	10.374.800,00			
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	48.696.150,00	46.944.200,00			
Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	6.503.000,00	6.237.345,00			
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	145.176.735,00	139.044.928,00			

Sasaran Strategis/ Indikator/ Program		Pagu	Realisasi	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	% Efisiensi
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	15.494.150,00	15.209.974,00			
13.	Peningkatan Ketahanan Kebencanaan	1.773.429.601,00	1.557.366.946,00	87,82	136,28	35,56
	Indeks Risiko Bencana					
	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	723.840.782,00	716.203.971,00			
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	995.866.243,00	788.054.455,00			
	Program Penanggulangan Bencana	53.722.576,00	53.108.520,00			
14.	Peningkatan Pelayanan Infrastruktur	39.866.107.549,06	31.068.078.384,00	77,93	120,35	35,25
	Persentase Pemenuhan Rumah Layak Huni					
	Persentase Jalan Mantap					
	Program Pengembangan Perumahan	8.486.493.245,00	5.707.216.197,00			
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	2.263.060.608,00	1.528.480.830,00			
	Program Kawasan Permukiman	1.387.107.652,00	663.638.041,00			
	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	35.721.080,00	34.698.442,00			
	Program Penyelenggaraan Jalan	15.992.492.811,00	15.025.274.691,00			
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	500.000.000,00	448.602.358,00			
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	678.783.000,00	287.087.534,00			
	Program Pengelolaan Pelayanan	353.767.919,20	142.836.207,00			
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	3.155.939.234,00	2.467.293.470,00			
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	1.285.726.275,00	1.049.515.737,00			
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	2.376.596.129,86	1.178.794.929,00			
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	473.160.000,00	246.312.696,00			
	Program Penataan Bangunan Gedung	2.877.259.595,00	2.288.327.252,00			